LOMBOK BARAT

PATUT PATUH PATJU

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis, pelaporan dan tata cara reviunya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta penjelasan tentang Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government.* Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 ini, khususnya seluruh Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini.

LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar SKPD terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah tahun 2021 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Gerung, Maret 2022
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih *(clean and good governance)* pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 misi, 5 tujuan, 12 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 merupakan tahun

kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 dan salah satu media pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah. LAKIP tidak sekedar hanya alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 21 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 19 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**, dan 1 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Baik**. Sedangkan 1 lagi indikator dengan kategori **Sangat Kurang**.

Dalam 21 indikator kinerja, terdapat 11 indikator telah mencapai target RPJMD dengan perolehan persentase di atas 100%. Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase dibawah 100% sebanyak 8 indikator dengan rentang capaian 95% sampai dengan 99,99 %; 1 indikator dengan perolehan capaian 87.34%, serta 1 indikator dengan capaian terendah yakni sebesar 18,43%. Adapun indikator kinerja sasaran di bawah 100 % adalah sebagai berikut.

1) UHH dengan capaian 99,99 %
2) Persentase Rumah layak Huni dengan capaian 99,96 %
3) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 99,13%
4) TPT dengan capaian 98,78 %
5) Persentase RLS dengan capaian 98,77 %
6) Nilai PDRB Perkapita 98,62 %
7) Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian 95,60 %
8) Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan capaian 93,06 %
9) Nilai AKIP Kabupaten dengan kategori B (63.76); 87.34%
10) Nilai Realisasi Investasi PMA dengan capaian 18,43 %

Dalam tahun anggaran 2021, untuk pencapaian 12 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024, telah dianggarkan melalui APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 dengan realisasi sebesar Rp.1,661,793,854,210.49 atau 94.58 %.

Jika dikaitkan antara pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Strategis Daerah yang diturunkan menjadi 17 Program Prioritas dan 21 Indikator Kinerja adalah 102,09% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1,661,793,854,210.49 dari target Rp.1,756,995,830,973.21 atau dalam persentase sebesar

94.58% yang artinya Pemerintah Daerah dapat menghemat Rp.95,201,976,762.72 atau 8.49% dari keseluruhan anggaran

Di samping itu, beberapa prinsip dalam akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan atau pemberi amanah. Sehingga, beberapa upaya dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu perumusan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah agar lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya (*SMART*), termasuk juga di dalamnya terkait penentuan besaran target kinerja agar adanya hasil analisis yang lebih mendalam sehingga pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR GRAFIK ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. GAMBARAN UMUM 2
1.2.1. Data Geografi Wilayah 2
1.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 3
1.2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6
1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi 8
1.2.5. Inflasi 9
1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 11
1.3.1. Permasalahan 11
1.3.1.1. Pendidikan 11
1.3.1.2. Kesehatan 12
1.3.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 13
1.3.1.4. Perumahan Dan Permukiman 13
1.3.1.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14
1.3.1.6. Lingkungan Hidup 14
1.3.1.7. Perhubungan 15
1.3.1.8. Penanaman Modal 15
1.3.1.9. Kemiskinan 15
1.3.2. Isu Strategis 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **19**
2.1. RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 19
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 25
2.3. PERJANJIAN KINERJA 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **32**
3.1. PENGUKURAN KINERJA 32
3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 34
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 36
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024 42

DAFTAR ISI

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional 44
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja dan Upaya Pemerintah Daerah di Tahun Mendatang 45
3.2.2. Analisis Program yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 118
3.2.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 122
3.2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2021 129

BAB IV INOVASI DAN PRESTASI KERJA 132
4.1. INOVASI 132
4.2. PRESTASI KERJA 137

BAB V PENUTUP 149
5.1. KESIMPULAN 149
5.2. UPAYA PERBAIKAN/PEMULIHAN 151

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Luas Wilayah Munurut Kecamatan, 2021 2
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB..... 4
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021 5
Gambar 1.4 PNS Lombok Barat Berdasarkan Usia, 2021 6
Gambar 1.5 PNS Lombok Barat Berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 7
Gambar 1.6 Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 7
Gambar 1.7 Penyerahan Penghargaan TPID Berprestasi 10
Gambar 2.1 RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2020 20
Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Ombudsman 47
Gambar 3.2 Penyerahan piagam penghargaan oleh Ombudsman RI
Gambar 3.3 Aplikasi sakip.lombokbaratkab.go.id 52
Gambar 3.4 Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, 2021 100
Gambar 3.5 *Screenshot* Nilai IKA Tahun 2021 106
Gambar 3.6 *Screenshot* Nilai IKU Tahun 2021 110
Gambar 3.7 *Screenshot* Nilai IKL Tahun 2021 113
Gambar 3.7 Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021 126
Gambar 3.8 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat, 2021 127

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021 8
Grafik 3.1 Panjang jalan kabupaten tahun 2016-2020 53
Grafik 3.2 Penerimaan PAD Kabupaten Lombok Barat 2016-2021 74
Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021 79
Grafik 3.4 PDRB Perkapita Tahun 2019-2021 79
Grafik 3.5 Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 85
Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2021 89

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 4
Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021 6
Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 9
Tabel 1.4 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016–2020 .....
Tabel 1.5 Rekapitulasi Anggaran Program Penanggulangan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 11
Tabel 1.6 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 16
Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lombok Barat 21
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 30
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 33
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021 34
Tabel 3.3 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 36
Tabel 3.4 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 36
Tabel 3.5 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja . 37
Tabel 3.6 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam pengembangan Wilayah 37
Tabel 3.7 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar 38
Tabel 3.8 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan 38
Tabel 3.9 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat 39
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 39
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan 40
Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .. 40

DAFTAR ISI

Tabel 3.13 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 41
Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 Menurunnya Indeks Risiko Bencana 41
Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024 42
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Standar Nasional 44
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021 54
Tabel 3.18 Capaian Indikator Utama Konektivitas Antar Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 54
Tabel 3.19 Capaian Indikator Utama Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perekonomian (Pasar) Tahun 2021 56
Tabel 3.20 Capaian Indikator Ketersediaan Jalur Trayek Menuju Pusat Pariwisata Tahun 2021 60
Tabel 3.21 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020 66
Tabel 3.22 Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2021 . 67
Tabel 3.23 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 71
Tabel 3.24 Rincian Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2021 74
Tabel 3.25. Perbandingan hasil capaian PAD Tahun 2021 dan 2020 75
Tabel 3.26 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 80
Tabel 3.27 Target dan realisasi jumlah investasi dan nilai investasi PMDN/PMA berfasilitas fiscal tahun 2021 81
Tabel 3.28 Realisasi Nilai Investasi PMDN/ PMA Tahun 2020– 2021 81
Tabel 3.29 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2020 87
Tabel 3.30 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 89
Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90
Tabel 3.32 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan 93
Tabel 3.33 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan 96
Tabel 3.34 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi Pelayanan DP2KBP3A Tahun 2021 97
Tabel 3.35 Capaian Indikator Kabupaten layak Anak 98
Tabel 3.36 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021 Menurut Sumber Dana 101
Tabel 3.37 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 104

DAFTAR ISI

Tabel 3.38 Skor dan Kriteria IKLH 105
Tabel 3.39 Kategori Indeks Kualitas Air (IKA)..... 106
Tabel 3.40 Lokasi Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021..... 108
Tabel 3.41 Kategori Indeks Kualitas Udara (IKU) 110
Tabel 3.42 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 112
Tabel 3.43 Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 113
Tabel 3.44 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 Menurunnya Indeks Risiko Bencana 114
Tabel 3.45 Indeks Kapasitas Daerah 115
Tabel 3.46 Pelayanan Penanggulangan Bencana Tahun 2021..... 116
Tabel 3.47 Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk Tahun 2021 . 120
Tabel 3.48 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 123
Tabel 3.49 PNS Kabupaten Lombok Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 125
Tabel 3.50 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Yang Disetarakan 128
Tabel 3.51 Laporan Realisasi APBD 129
Tabel 4.1 Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Unggulan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 sertaketerdukungan terhadap Program Unggulan provinsi NTB 133
Tabel 5.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 149

BAB -1

PENDAHULUAN

-Pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ini disusun

sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja.

Sebagai sebuah laporan kinerja, LAKIP ini amat penting artinya sebagai salah satu indikator penilaian laporan pertanggungjawaban Bupati di depan sidang DPRD, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1. Data Geografi Wilayah

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografisterletak antara 8,25˚ – 8,55˚ Lintang Selatan dan 115,46˚ – 116,20˚ Bujur Timur, secara geografisnya memiliki batas wilayah sebagai berikut Sebelah Selatan : 8˚55'.19'‘LS – 116˚0’5”BT, Sebelah Barat : 8˚45‘.11,15'‘LS – 115˚49,12’.04”BT, Sebelah Timur Selatan : 8˚52’22.29”LS - 116˚6’33.7”BT, Sebelah Timur Barat : 8˚24‘.33.82”LS - 116˚20’15.62”BT.Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan letak geografis yang menguntungkan.

Dalam segi pembangunan wilayah, pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, maupun sumber air yang melimpah ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat dapat disebut sebagai pintu gerbang bagi Pulau Lombok karena pelabuhan penyeberangan berada di kabupaten ini.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 1.053,92 km^2. Sebesar 50,23% dari luas Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah Kecamatan Sekotong, yaitu dengan luas 529,38 km2 sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan yang paling sempit dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dimana luasnya hanya mencapai 21,56 km2. Walau Kecamatan Sekotong merupakan

Gambar 1.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan, 2021

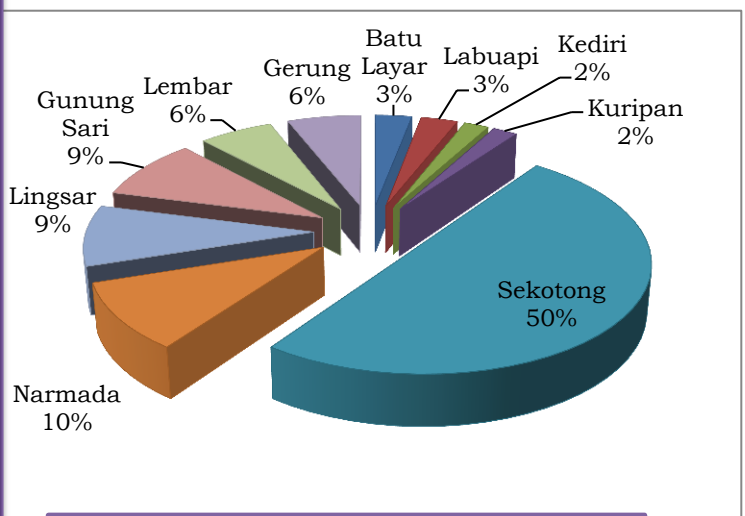

Sumber: Lombok Barat Dalam Anaka Tahun 2022

wilayah terluas di Kabupaten Lombok Barat, ia memiliki perkembangan yang lebih lambat dibanding dengan kecamatan lain. Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :

a. ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
b. ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
c. ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
d. ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut :

a. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
b. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
c. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dan
d. Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

1.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara administrative, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Narmada memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak yaitu 21 desa, dengan 133 dusun. Kecamatan Kuripan sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 6 desa, 40 dusun. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah desa/kelurahan serta luas

wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2021.

Tabel 1.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
1	Sekotong	9	106	529,38	50,23
2	Lembar	10	87	62,66	5,95
3	Gerung	11/3	71	62,30	5,91
4	Labuapi	12	73	28,33	2,69
5	Kediri	10	74	21,64	2,05
6	Kuripan	6	40	21,56	2,05
7	Narmada	21	133	107,62	10,21
8	Lingsar	15	94	96,58	9,16
9	Gunungsari	16	103	89,74	8,51
10	Batulayar	9	63	34,11	3,24
	Jumlah	**119/3**	**844**	**1.053,92**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, penduduk merupakan aset potensial bagi pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan, memungkinkan penggalian sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi, serta merupakan pasar potensial bagi berbagai produk. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar **731.8 ribu jiwa**, dimana angka ini merupakan angka yang menempatkan Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten nomor 3 dalam hal jumlah penduduk di Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil sensus penduduk sepanjang 2020-2021, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat sebesar 1,91 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat masih lebih

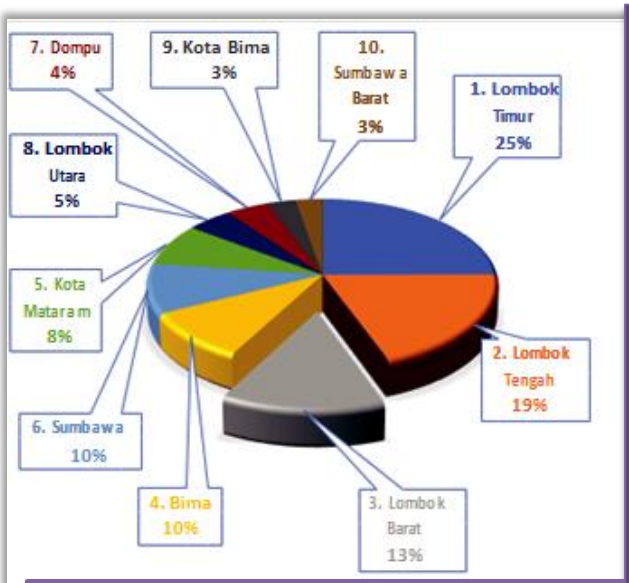

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB

tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2021 yaitu sebesar 1,63 Persen.

Sex rasio di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sebesar 100,82 yang artinya penduduk Laki-laki di Lombok Barat lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu dengan rincian Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 367.390 jiwa dan 364.420 jiwa berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya Kecamatan Narmada merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak 102.620 jiwa, sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit 41.810 jiwa.

Jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk seperti halnya piramida, dimana pada umur muda jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Penduduk usia produktif memang mendominasi di Lombok Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk usia lanjut. Besarnya penduduk usia 0 hingga 19 tahun dapat disikapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pendidikan. Karena penduduk usia tersebut berada pada usia sekolah, apabila mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak maka kualitas SDM Lombok Barat akan rendah.

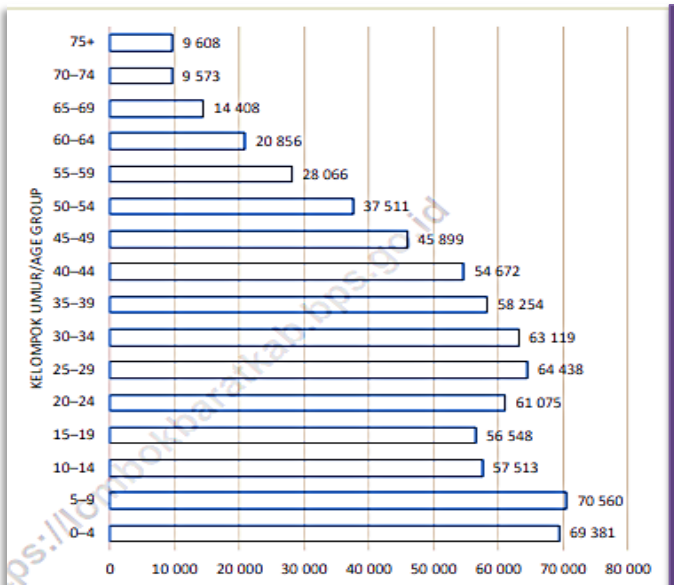

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2022

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan, mencapai 694,37 jiwa/km^2 di tahun 2021. Kecamatan Kediri merupakan kecamatan terpadat di Lombok Barat. Dengan luas wilayah hanya sebesar 21,64 km^2 kepadatan penduduk di Kecamatan Kediri mencapai 2.975,88 jiwa/km^2. Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menjadi kawasan pemukiman penyangga, yaitu Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Batulayar. Sebagai kecamatan penyangga, kepadatan penduduk di lima kecamatan tersebut juga memiliki

kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Status sebagai kecamatan penyangga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/Km)
1	Sekotong	529,38	126,79
2	Lembar	62,66	880,83
3	Gerung	62,3	1.458,76
4	Labu Api	28,33	2.827,04
5	Kediri	21,64	2.975,88
6	Kuripan	21,56	1.966,93
7	Narmada	107,62	967,26
8	Lingsar	96,58	796,04
9	Gunung Sari	89,74	1.073,71
10	Batu Layar	34,11	1.594,43
Lombok Barat		1.053,93	**694,37**

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

1.2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021 sebanyak 6.527 pegawai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah PNS di Kabupaten Lombok Barat menurun sebesar 3,47 persen, dimana tahun sebelumnya 6.764 pegawai. Dilihat dari dari sisi jenis kelamin, 3.447 PNS laki-laki atau 52,83 persen, dan 3.080 PNS perempuan atau 47,17 persen.

Gambar 1.4 PNS Lombok Barat Berdasarkan Usia, 2021

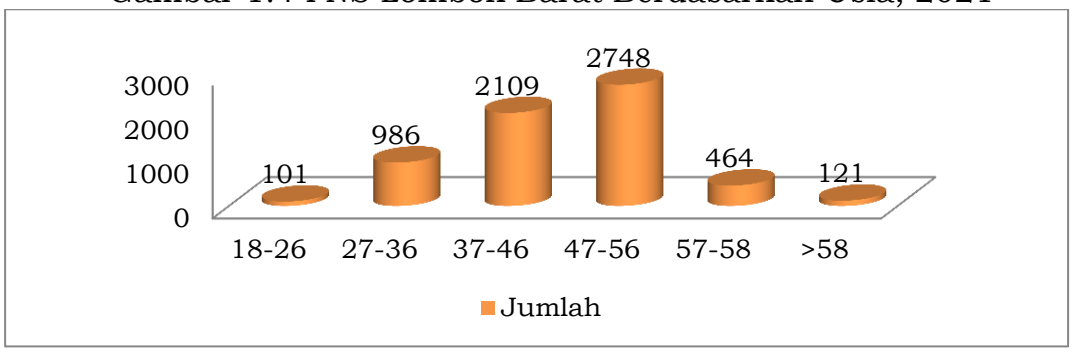

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2021

Kelompok usia 47-56 tahun mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia, disusul dengan kelompok usia 37-46 tahun. Dari

gambar di atas, dapat disimpulkan mayoritas PNS di Lombok Barat mayoritas di umur 47-56 tahun, dengan persentase 42,09%. Dengan adanya perbedaan usia yang jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

Gambar 1.5 PNS Lombok Barat Berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

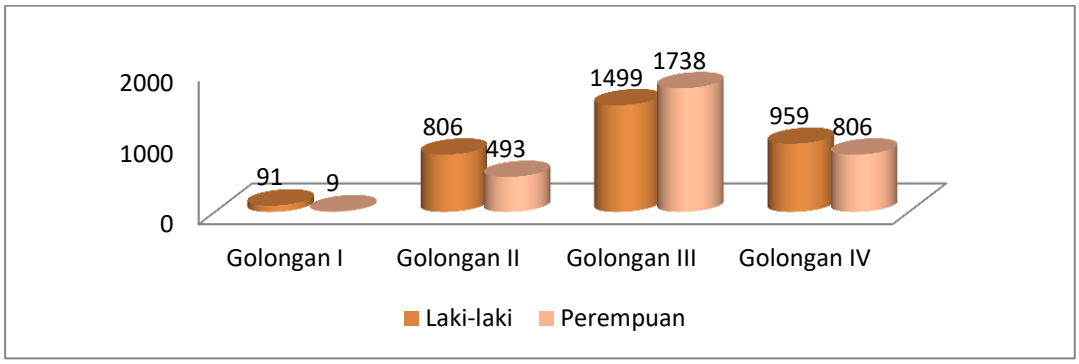

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2021

Golongan III merupakan Golongan dominan dari PNS yaitu sebanyak 51,20% dari total PNS atau berjumlah 3.237 PNS, disusul dengan Golongan IV sebesar 26,45% atau 1.765 dari seluruh PNS. Sedangkan Golongan I berjumlah 1,64% dari total PNS. Besarnya persentase Golongan III memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan D-IV/S-1 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh PNS sesuai pada Grafik di atas.

Gambar 1.6 Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

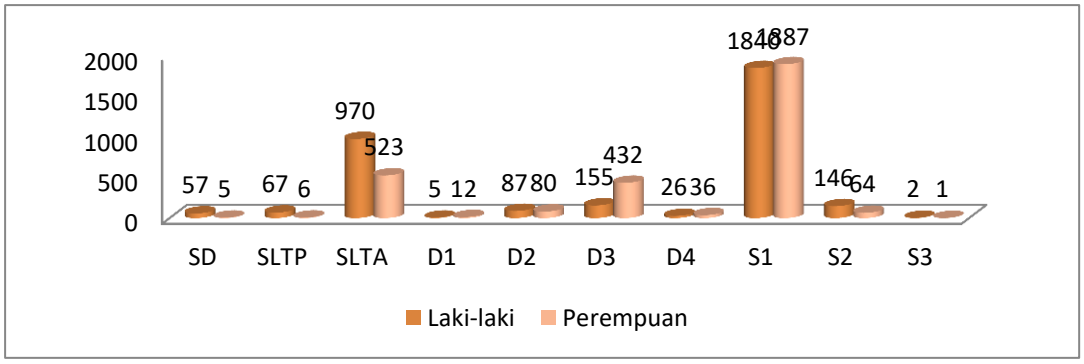

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2021

Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi PNS dengan persentase sebesar 57,67% seperti gambar 5 di atas. Pada gambar 6 di bawah, dapat terlihat detail

pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah Pendidikan terbanyak. Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi dengan jumlah 1.493 orang, disusul dengan lulusan Diploma 3 sebanyak 587 orang dan S2 sebanyak 210 orang. Patut disyukuri, bahwa birokrasi di Lombok Barat juga memiliki kualifikasi Sumberdaya Manusia dengan jenjang pendidikan tertinggi (S3) yaitu sebanyak 3 orang doctor.

1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada tahun 2018 mengalami penurunan akibat gempa bumi. Kenaikan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan kembali dan kini akibat pandemi *covid*-19. Dampak yang paling terasa adalah pada dampak ekonomi karena segala aktifitas menjadi sangat terbatas sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Akan tetapi kondisi ini pun tidak bertahan lama, Pemerintah Daerah mulai sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan event dunia yaitu Mandalika *Super Bike* tahun 2021 sebagai ajang untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang terkenal akan wisata alamnya. Keindahan alam yang masih alami menjadi daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga hal tersebut menjadi sangat berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021

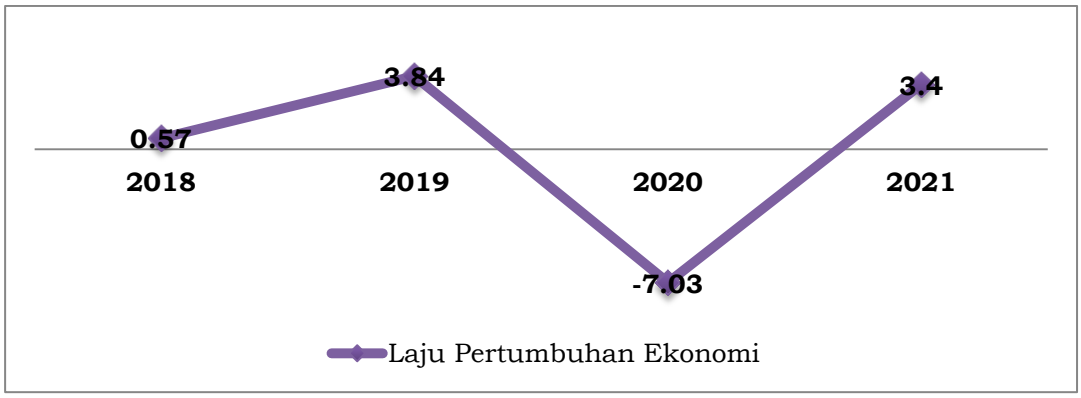

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

Kondisi perekonomian Lombok Barat menunjukkan tanda pemulihan sejak tahun 2017. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus

meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK. dimana untuk tahun 2018 PDRB berdasarkan ADH Berlaku sebesar 14.470 trilyun rupiah, pada tahun sebelumnya sebesar 13.955 trilyun rupiah. Sementara untuk ADH Konstan pada tahun 2018 sebesar 10.491 trilyun rupiah dan sebelumnya sebesar 10.432 trilyun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)		
Tahun	***ADH Berlaku***	***ADH Konstan***
2017	**13.955.402**	**10.432.305**
2018	**14.470.435**	**10.491.747**
2019	**15.452.078**	**10.894.637**
2020	**14.568.486**	**10.128.396**
2021	15.408.634	**10.472.388**

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

1.2.5. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi. yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016–2020

Uraian		***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
Kab. Lombok Barat	%	2.47	3.59	3.15	1.76	0.58
Provinsi NTB	%	2.61	3.70	3.16	1.87	0.60
Nasional	%	3.02	3.5	3.13	2.27	1.68

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2016- 2020 cenderung berfluktuasi seperti halnya inflasi di tingkat provinsi NTB dan inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,59% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar

0,58%. Rata-rata inflasi Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun terakhir adalah yang terendah dibandingkan Provinsi NTB.

Gambar 1.7 Penyerahan Penghargaan TPID Berprestasi

Sumber: Bagian Ekonomi, Setda Lombok Barat

Fokus pengendalian inflasi pada tahun 2021 adalah melakukan Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga, untuk merealisasikan hal tersebut kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapatkan penghargaan atas TPID berprestasi yang sebelumnya pernah diperoleh pada tahun 2019.

Sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah mampu membuat pluktuasi harga di Kabupaten Lombok Barat terkendali, upaya pengendalian harga dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk pemasaran produk UMKM.

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar harga tetap terkendali. Harga yang wajar dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas harga *volatile food* dilakukan melalui upaya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup :

1) Keterjangkauan Harga,
   - Pemantauan Harga Pangan Strategis
   - Pasar Murah Kebutuhan Pokok.
   - Paket Sembako Bagi masyarakat terdampak COVID-19
   - Himbauan Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi
   - Bantuan Permodalan bagi pelaku UKM/IKM

Tabel 1.5 Rekapitulasi Anggaran Program Penanggulangan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Dinas Koperasi & UKM	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	400.000.000,-
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penumbuhan & Pengembangan Industri Kimia,agro dan hasil hutan	799.684.000
3	Dinas Perhubungan	Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	302.000.000
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peralatan Adminduk	499.635.000
5	Dinas Pariwisata	Bantuan bagi Pelaku Wisata	264.487.500
	Total		**2.265.806500**

Sumber: Bagian Ekonomi, Setda. 2021

2) Ketersediaan Pasokan,
   - Pemantauan Dan Inspeksi Di Beberapa Gudang Distributor
3) Kelancaran Distribusi
   - Peningkatan kualitas Jalan Jalur distribusi
   - Pengaturan dan prioritas kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok pada saat-saat tertententu
   - Kerjasama Distribusi pangan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli
4) Komunikasi Efektif

1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.3.1. Permasalahan

1.3.1.1. PENDIDIKAN

Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini, masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2019 berada pada angka 6,16 tahun dan tahun 2020 mencapai 6,41 tahun. Capaian ini masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi NTB yang pada tahun 2019 mencapai 7,27 tahun, dan tahun 2020 mencapai 7,31 tahun, serta masih jauh dibawah rata-rata nasional

yang pada tahun 2019 mencapai 8,34 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Barat masih berada pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas 1 SMP, tepatnya pada semester pertama kelas 1 SMP. Artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan di Lombok Barat.

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI secara umum mengalami penurunan, akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,02 % dari tahun 2019. Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0.39% mengalami penurunan sedikit pada tahun 2017 sebesar 0,12%, akan tetapi pada tahun 2018 naik lagi sebesar 0,30 % dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 0,18%, kemudian tahun 2020 naik di karenakan adanya pandemi covid 19.

Angka partisipasi murni yang belum mencapai 100%, Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini belum mencapai 100%, dan angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun capaian masih sangat rendah yaitu 2,39%, jumlah guru dengan kualifikasi sarjana/DIV juga belum mencapai 100%, serta menurunnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan akibat terjadinya gempa bumi tahun 2018. Selain itu, pandemi Covid – 19 telah berdampak pada tergangunya proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak dapat berjalan secara optimal. Banyak kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya metode ini diantaranya kepemilikan perangkat yang terbatas, kurangnya pennguasaan teknologi, tidak optimalnya pendampingan siswa dirumah dalam mengikuti metode pembelajaran daring, dan biaya yang mahal yg ditimbulkan akibat penyediaan kebutuhan internet dan lainnya.

1.3.1.2. KESEHATAN

Dibidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi prioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius seperti angka kematian bayi. Capaian AKB selama tahun 2016-2020 mengalami trend fluktuatif. Tahun 2016 capaian sebesar 2,75. Pada tahun 2017, menurun menjadi 0,65, meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,74, pada tahun 2019 sebesar 3,35 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,90. Angka Kematian Ibu secara signifikan meningkat pada tahun 2020 menjadi 98,50. Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Selain itu Stunting juga perlu mendapat penanganan serius, karena meskipun trend angkanya menurun dari 2016 sebesar 33,02, dan tahun 2020 mencapai 20,89, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Selain itu Covid – 19 yang dinyatakan sebagai pandemic dan melanda dunia sangat memerlukan perhatian serius pemerintah. Dengan jumlah kejadian di Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai arahan pemerintah pusat, perlu menyiapkan secara khusus untuk vaksinasi agar eliminasi Covid – 19 dapat diwujudkan.

Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat walaupun trend-nya cenderung meningkat yakni pada tahun 2016 mencapai 65,48 tahun meningkat menjadi 66,51 tahun pada tahun 2020 serta belum tercapainya imunisasi dasar lengkap serta masih tingginya kasus TBC dan kasus HIV/AIDS.

1.3.1.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kemantapan jalan dalam rangka meningkatkan konektifitas antar wilayah baru mencapai 69,56% sehingga belum optimal memperkuat antar simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan multiplier effect cukup besar.Pembangunan infrastruktur harus didesain secara berkelanjutan baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan kawasan di kabupaten lombok barat cendrung terjadi secara alami. pada kawasan tertentu terjadi pertumbuhan lebih pesat dari konsep tata ruang yang telah di tetapkan sehingga mobiltas masyarakat, kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat yang berdampak pada kurang terkendalinya pemanfaatan ruang, tidak terpenuhinya akses aman air minum baik kualitas maupun kuantitas, penurunan kualitas lingkungan dan penuruan kualitas sistim drainase.

1.3.1.4. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rumah Layak Huni (RLH) belum mencapai 100%. Jumlah dan proporsi penduduk yang semakin lama semakin bertambah, berdampak pula pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang untuk perumahan dan permukiman yang berakibat pada meningkatnya harga tanah sehingga harga jual rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman beserta sarana pendukungnya.

Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. .permukiman kumuh terus meningkat, pada tahun 2014 Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :1197.A/51/ Bappeda/2014 luas wilayah kumuh 230,6 Ha meningkat pada tahun

2020 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 649.A/42/04-Bappeda/2020 Luas wilayah kumuh 420,66 Ha. permukiman kumuh yang terus meningkat belum selaras denga pembangunan yang telah dilakukan, hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh penanganan permukiman kumuh yang kurang komprehensif dan kolaboratif.

Penanganan rumah rusak terdampak bencana belum optimal. penangnan rumah rusaak terdampak gempa bumi sampai tahun 2020 baru mencapai 49.08 % dari 72834 unit rumah, hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya backlog.

1.3.1.5. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak. Hal ini terkait juga ketersediaan dan akurasi terkait data perlindungan perempuan dan anak, serta capaian Lombok Barat sebagai Kabupaten Layak Anakyang masih memerlukan proses panjang untuk pencapaiannya. Saat Skor Kabupaten Layak anak mencapai 30 atau setara dengan skor 500 untuk metode perhitungan yang baru, dan masih terpaut cukup jauh untuk menjadikan Lombok Barat menjadi Kabupaten layak Anak dengan skor1000. Pembangunan manusia berbasis gender dan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi masalah di Kabupaten Lombok Barat

1.3.1.6. LINGKUNGAN HIDUP

a. Masih luasnya lahan kritis yang belum tertangani ;
b. Berkurangnya sumber mata air;
c. Terjadinya konversi lahan hutan, illegal logging dan perambahan hutan;
d. Masih terjadinya penambangan illegal
e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Lombok Barat baru mencapai 61,03%, sementara sisanya adalah tidak terkelola.
f. Indeks kualitas air sungai yang masih rendah. Pengukuran kualitas bakteriologi air sungai berdasarkan sifat biologi masih terdapat permasalahan, yaitu sampai tahun 2019 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat. Hal ini berpengaruhterhadap persentase kualitas air sungai

secara keseluruhan, termasuk juga terhadap antisipasi pencegahan penurunan kualitas air sungai

1.3.1.7. PERHUBUNGAN

a. Pelayanan moda transportasi umum masih terbatas;
b. Persentase wilayah terhubung dengan moda transportasi baru mencapai 48,38%
c. Persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar) sebesar 75%. Artinya masih terdapat pasar yang belum dilalui oleh jalur trayek yang aktif. Dari 32 pasar yang ada di Lombok Barat, terdapat 8 pasar yang belum dilalui jalur trayek yang aktif yaitu terdapat di Kecamatan Sekotong1 pasar, Lembar 1 pasar, Gerung 1 pasar, Kuripan 3 pasar,dan Gunungsari sebanyak 2 pasar.

1.3.1.8. PENANAMAN MODAL

a. Rendahnya realisasi investasi PMA. Pada tahun 2020 realisasi investasi PMA menurun drastis mencapai angka 31,77 jutaUS$ atau hanya mencapai 26,17% dari target sebesar 121,39 US$. Menurunnya investasi PMA pada tahun 2020 disebabkan banyak investor asing yang menunda untuk merealisasikan investasinya karena Covid-19.
b. Masih rendahnya iklim investasi

1.3.1.9. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2017-2021) mengalami penurunan. Untuk data tahun terakhir yakni pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat mencapai 14,28% atau sebanyak 100,25 ribu jiwa. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan semakin berkurang. Indeks keparahan kemiskinan dapat ditekan menjadi 0.95 poin, demikian juga dengan indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 3,07 poin.

Tabel 1.6 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Tahun	*Jumlah Penduduk (Ribu)*	*Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)*	*Penduduk Miskin (%)*
2017	675,2	110,85	16,73
2018	685,2	110,69	16,46
2019	695,0	103,77	15,20
2020	721,5	105,04	15,17
2021	731,8	100,25	14,28

Penurunan Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan yang terendah di Propinsi NTB merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lombok Barat dimana rata-rata angka kemiskinan disemua kabupaten meningkat namun tingkat pendapatan antara penduduk kaya dan miskin dapat ditekan sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang terlalu tinggi di Kabupaten Lombok Barat.

1.3.2. Isu Strategis

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut
   a. Nilai PDRB Per kapita belum optimal
   b. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
   c. IPM
   d. Angka Rata – Rata Lama Sekolah
   e. Angka Usia Harapan Hidup
   f. Persentase Balita Gizi Buruk
   g. Tingkat Pengangguran Terbuka
   h. Indeks Kepuasan Masyarakat
   i. Persentase PAD terhadap Pendapatan masih rendah
   j. Opini BPK
   k. Skor PPH
   l. Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB belum optimal
   m. Pertumbuhan Industri kecil masih rendah

2. Aspek Pelayanan Umum Dalam rangka berupaya memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat diuraikan beberapa isu dibawah ini
   a. Angka partisipasi murni masih dibawah 100%

b. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menurun akibat terjadinya bencana
c. Masih adanya kasus kematian bayi
d. Masih adanya kasus kematian ibu
e. Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi
f. Tingginya kasus stunting
g. Belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap
h. Masih tingginya kasus TBC
i. Pandemi Covid-19
j. Persentase jalan mantap masih terbatas
k. Akses terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%
l. Akses terhadap air minum layak belum mencapai 100%
m. Masih terbatasnya ruang tebuka hijau
n. Rumah layak huni belum mencapai 100%
o. Indeks Risiko Bencana masih rendah
p. Cakupan mitigasi penanggulangan dan pemulihan sarana dan prasarana terdampak bencana belum otpimal
q. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih rendah
r. Penegakkan perda belum optimal
s. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum optimal
t. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
u. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah
v. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi
w. Luas lahan bersertifikat masih rendah
x. Kualitas air sungai masih rendah
y. Mata air mulai berkurang
z. Pengelolaan sampah belum optimal
aa. Kepemilikan dokumen kependudukan belum optimal
bb. Jumlah LPM aktif renda
cc. Total Fertility Rate tinggi
dd. Pelayanan moda transportasi belum lancar

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat ke depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isu Tata Kelola Pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Isu Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur belum merata
3. Isu Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Masih rendahnya peranan perekonomian sector unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Isu Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan
5. Isu Pembangunan Manusia. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
6. Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya resiko bencana daerah

BAB -2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

-Kesenian Gendeng Beleq, Suku Sasak--

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 tahun.

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Lombok Barat disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024, dan sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat hingga ke level perencanaan tahunan.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019- 2024 baru berlangsung selama 1 (satu) tahun. Namun demikian terjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis disertai wabah Pandemi Covid – 19 yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, permasalahan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, prirotas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Sehingga pada Tahun 2021, beberapa target dari Indikator Kinerja Utama Daerah mengalami perubahan akan tetapi tidak merubah visi dan misi daerah.

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 adalah “

BAB 2

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA, DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU".

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Gambar 2.1 RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2020

AMAN, SEJAHTERA, BERPRESTASI

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lombok Barat

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU			
MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, MELAYANI SERTA BERBASIS TRANSPARANSI, AKUNTABILTAS YANG EFISIEN DAN MEMILIKI INTEGRITAS			
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahanyang Baik dan Bersih	1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	1.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana publik
			1.1.1.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi
			1.1.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
			1.1.1.4 Meningkatkan akurasi dan penyediaandata sectoral
			1.1.1.5 Meningkatkan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
			1.1.1.6 Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat
			1.1.1.7 Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku
			1.1.1.8 Peningkatan Kerjasama Kemitraan Melalui Aliansi Strategis Multi Pihak
			1.1.1.9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Legislatif dan Intensitas Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
			1.1.1.10 Meningkatkan kapasitas ASN melaluipendidikan dan pelatihan
			1.1.1.11 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu
			1.1.1.12 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
			1.1.1.13 Meningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
			1.1.1.14 Meningkatkan peran dan koordinasi seluruh stakeholder (Toga, Toma, AparatPenegak Hukum) dalam penyelesaian konflik

	1.2. Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangandaerah		1.1.2.1	Meningkatkan Pengeloaan dan Pelaporan keuangan serta Aset Daerah
			1.1.2.2	Menerapkan penggunaaan Sistem Informasi terintegrasi
	1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		1.1.3.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			1.1.3.2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah serta pengendalian dan evaluasipembangunan daerah
			1.1.3.3	Meningkatkan pengembangan inovasi daerah
			1.1.3.4	Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			1.1.3.5	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
MISI II				
MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN AKSES INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR SECARA BERKEADILAN				
TUJUAN	***SASARAN STRATEGIS***	***STRATEGI***		***ARAH KEBIJAKAN***
2. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	2.2.1	Meningkatkan Konektivitasantar wilayah dan akses infrastruktur dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, moda transportasi, rumah layakhuni, air minum layak dansanitasi layak	2.1.1.1 Meningkatkan jalan mantap
				2.1.1.2 Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
				2.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga TerampilKonstruksi
				2.1.1.4 Peningkatan Pengawsan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				2.1.1.5 Meningkatkan ketersediaan rumah layakhuni
	2.2. Meningkatnya akses infrastruktur dasar			2.2.1.1 Meningkatkan ketersediaan rumah layakhuni
				2.2.1.2 Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak
				2.2.1.3 Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak

MISI III			
MEWUJUDKAN KONEKTIFITAS PEREKONOMIAN ANTARA PELAKU USAHA DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT			
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
3. Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomiyang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1 Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	3.1.1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemitraan usaha daniklim investasi yang kondusif	3.1.1.1 Mengoptimalkan potensi sumber PAD akibat covid-19
			3.1.1.2 Meningkatkan Jaringan Irigasi Permukaan
			3.1.1.3 Meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif (covid-19)
			3.1.1.4 Meningkatkan produksi perikanan melalui diversifikasi usaha perikanan kelautan (covid-19)
			3.1.1.5 Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan (covid-19)
			3.1.1.6 Keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk local (covid-19)
			3.1.1.7 Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan (covid-19)
			3.1.1.8 Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Destinasi Wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta mendorong pertumbuhan desa wisata (covid-19)
			3.1.1.9 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan serta penggunaan IT dalam pelaksanaan proses perijinan (covid-19)
	3.2. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat		3.2.1.1 Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan (covid-19)
			3.2.1.2 Meningkatkan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan (covid-19)
			3.2.1.3 Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan peningkatan sarana prasaranapendukung
			3.2.1.4 Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan potensi desa dalam mengembangkan perekonomianmasyarakat
			3.2.1.5 Meningkatkan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja (covid-19)
			3.2.1.6 Meningkatkan peran serta masyarakatdalam upaya transmigrasi swakarsa (covid-19)

MISI IV			
MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING			
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
4. Meningkatnya KualitasHidup Masyarakat	4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1 Meningkatkan UsiaHarapan Hidup	4.1.1.1 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta Meningkatkan pemenuhan serta kapasitas sumber daya manusia Kesehatan (covid-19)
			4.1.1.2 Meningkatkan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang hidup bersihdan sehat (covid-19)
	4.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	4.2.1 Meningkatkan Rata - RataLama Sekolah	4.2.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dan Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
			4.2.1.2 Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan
			4.2.1.3 Menjaga kelestarian Cagar Budaya
	4.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.3.1 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	4.3.1.1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadapperempuan rentan termarginalkan
			4.3.1.2 Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak
			4.3.1.3 Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk
MISI V			
MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAN SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN			
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengendalian	5.1.1.1 Meningkatkan Pengendalian pemanfataan ruang
			5.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan sampah
			5.1.1.3 Meningkatkan perlindungan mata air,Menurunkan pencemaran air sungai
	5.2. Menurunnya RisikoBencana	5.2.1 pemanfaatan tata ruang Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana	5.2.1.1 Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana (covid-19)

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada akhir periode masa jabatan. Mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran berikut Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat melalui link ikm.lombokbaratkab.go.id	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini BPK	Opini	BPK	BPKAD	Semua OPD
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah	4	Persentase Wilayah terhubung dengan pusat perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Jalan Mantap*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,20	Indeks composit	PUTR, Perindag, Dishub	PUTR, Dishub	PUTR, Dishub, dan Disperindag
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}}$ x 100	%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PUTR
		6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak}}{\text{Jumlah penduduk}}$ X 100	%	Dinas PUTR	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Dinas PUTR
6	Meningkatnya Daya Saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ x 100	%	Bapenda dan BPKAD	Bapenda	OPD Penghasil PAD

		8	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp.Juta	BPS	Seluruh OPD	Seluruh OPD
		9	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :			DPMPTSP	DPMPTSP	Dinas PUTR, Pariwisata dan SETDA
			PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas) tahun yg dihitung	Rp. Milyar			
			PMA	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	$ juta			
7	Meningkatnya Kemandirian ekonomi masyarakat	10	Persentase Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinsos,Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh OPD, Forum CSR, BAZNASDA dan Pemerintah Desa.
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran (Orang)}}{\text{Jumlah angkatan Kerja (Orang)}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Dieperindag, Diskop dan UKM, Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup	Dihitung Berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) berdasarkan registrasi kematian	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Semua OPD
9	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	13	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-*i* yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah

		14	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS^t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E^t_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skors	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A	Bappeda, DP2KBP3A, DPMD,Dikes dan PKK.
		16	Indeks Pembangunan Gender	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$ x 100	Indeks	BPS	Bakesbangpoldagri, Satpol PP,BPBD,Damkar	Seluruh Perangkat Daerah
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Parameter Penghitungan adalah NO2 dan SO2 $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1)\right)$ Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat

		18	Indeks Kualitas Air Sungai	Parameter Penghitungan adalah : pH; BOD; COD; TSS; DO; NO3-N; Total Phosphat; Fecal Coliform IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_A^2}{2}}$	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
		19	Indeks Kualitas Lahan	Tutupan Lahan $IKL = 100 - \left(\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) x\ 100\right)\right) x\ \frac{50}{54.3}\right)$ $DKK = \sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2\ x\ 0,6\ x\ 0,6\ x\ \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2\ x\ 0,6\ x\ 0,4\ x\ \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2\ x\ 0,4\ x\ 0,6\ x\ \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2\ x\ 0,4\ x\ 0,4\ x\ \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2\ x\ 0,6\ x\ 0,6\ x\ \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal)\ x\ 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2\ x\ 0,6\ x\ 0,4\ x\ \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal)\ x\ 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2\ x\ 0,4\ x\ 0,6\ x\ \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar)\ x\ 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2\ x\ 0,4\ x\ 0,4\ x\ \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar)\ x\ 0,6}{Luas\ FLEG}$	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian BNPB	Indeks	BPBD	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran, SatPOLPP, Kesbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment).* Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut .

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

	Sasaran Strategis	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan AKIP Daerah	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20

5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80
		Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	%	82,02
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85
		Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan	8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51
		Program Peningkatan Investasi	9	Nilai Investasi: Nilai PMDN (Fasilitasi)	589,73	
				Nilai Realisasi Investasi PMA	127.46	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Program Penanggulangan Kemiskinan	10	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86
		Program Penurunan Angka Pengangguran	11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	13	Persentase HLS	Tahun	13,75
		Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	14	Persentase RLS	Tahun	6,50
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00
		Program Pengarusutamaan Gender	16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	17	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	61,60
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	18	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,00

BAB -3

AKUNTABILITAS KINERJA

-Kesenian Peresean, Suku Sasak-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambrkan tingkat pencapaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian sasaran dan program/kegaitan dilakukan dengan pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performancegap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Untuk memudahkan interpretasi terhadap kinerja yang telah diperjanjikan, maka kami menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan skala yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥91	Sangat Baik (SB)	
2.	75 –89,99	Baik (B)	
3.	65 – 74,99	Cukup (C)	
4.	50 – 64,99	Kurang (K)	
5.	≤ 50	Sangat Kurang (SK)	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Berikut adalah pencapaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021.

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Kate-Gori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26	86,53	100,31	SB
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	SB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)	63,76 (B)	87.34	B
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20	85,73	104,30	SB
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80	97,76	99,96	SB
		6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	%	82,02	82,13	100,13	SB
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14.91	100.40	SB
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51	14,31	98,62	SB
			Nilai Investasi					
		9	Nilai PMDN (Fasilitasi)	Milyar Rupiah	589,73	1.260,32	213,71	SB
		10	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	127.46	23,49	18,43	SK

7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86	14,47	95,60	**SB**
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,32	98,78	**SB**
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20	67,19	99,99	**SB**
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	Tahun	13,75	13,95	101,45	**SB**
		15	Persentase RLS	Tahun	6,50	6,42	98,77	**SB**
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00	604,92	93,06	**SB**
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00	89,22	99,13	**SB**
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,91	89.73	102.72	**SB**
		19	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,30	54.26	128.27	**SB**
		20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,08	46.83	101,63	**SB**
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	21	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,00	140,88	101,48	**SB**
	Rata-rata Capaian						**102,09**	**SB**

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 21 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 19 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**, dan 1 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Baik**. Sedangkan 1 lagi indikator dengan kategori **Sangat Kurang**.

Dalam 21 indikator kinerja, terdapat 10 indikator telah mencapai target RPJMD dengan perolehan persentase di atas 100%. Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase dibawah 100% sebanyak 9 indikator dengan rentang capaian 95% sampai dengan 99,99 %; 1 indikator dengan perolehan capaian 87.34%, serta 1 indikator dengan capaian terendah yakni sebesar 18,43 %. Adapun indikator kinerja sasaran di bawah 100 % adalah sebagai berikut.

1) UHH dengan capaian 99,99 %
2) Persentase Rumah layak Huni dengan capaian 99,96 %
3) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 99,13 %
4) TPT dengan capaian 98,78 %
5) Persentase RLS dengan capaian 98,77 %
6) Nilai PDRB Perkapita 98,62 %

7) Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian 95,60 %
8) Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan capaian 93,06 %
9) Nilai AKIP Kabupaten dengan kategori B (63,76); 87.34%
10) Nilai Realisasi Investasi PMA dengan capaian 18,43 %

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Sasaran 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.3 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian %	Tahun 2021		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	IKM	%	82,89	85,00	102,55	86,26	86,53	100,31
	Rata-rata Capaian Kinerja				**102,55**			**100,31**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian 102,55% dengan realisasi 85,00% dari target 82,89%. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, Tahun 2021 angka rata-rata capaian sedikit mengalami penurunan akan tetapi sudah melampaui target yang ditentukan yaitu dengan capaian rata-rata 100,31% dengan realisasi 86,53% dari target 86,26%.

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.4 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100**			**100**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Opini BPK sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100% di tahun

2021 dengan sasaran strategisnya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran 3.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.5 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

	Indikator Kinerja	*Satuan*	*Tahun 2020*		*%*	*Tahun 2021*		*%*
			Target	**Realisasi**		**Target**	**Realisasi**	
3	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,00)	B (63,76)	89.80	BB (73,00)	B (63,76)	87.34
	Rata-rata Capaian Kinerja				**89.80**			**87.34**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan akuntabilitas Kinerja di dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 89.80% dengan nilai 63,76 dari target 71,00 pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja pada Tahun 2021 belum bisa dibandingkan karena hasil evaluasi dokumen AKIP belum dikeluarkan oleh KEMENPAN RB sehingga data belum bisa disajikan. Sehingga untuk sementara, data yang dipakai di tahun 2021 adalah data tahun 2020 yaitu 63,76.

Sasaran 4.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah

Tabel 3.6 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam pengembangan Wilayah

	Indikator Kinerja	*Satuan*	*Tahun 2020*		*%*	*Tahun 2021*		*%*
			Target	**Realisasi**		**Target**	**Realisasi**	
4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	80,50	105,16	82,20	85,73	104,29
	Rata-rata Capaian Kinerja				105,16			104,29

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam pengembangan Wilayah adalah telah melampaui target dengan perolehan persentase di atas 100%. Capaian dalam indikator kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 104,29%. Nilai ini sedikit lebih rendah dari tahun lalu yakni Tahun 2020 sebesar 105,16 %.

Sasaran 5.
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Tabel 3.7 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Persentase RLH	%	83,98	97,68	116,31	97,80	97,76	97,76
6	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	%	79,76	81,12	101,71	82,02	82,13	100,13
Rata-rata Capaian Kinerja					109,01			98,95

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020, Sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar dengan indikator kinerja Persentase RLH dan Persentase RT dengan air minum layak memperoleh capaian kinerja masing-masing 116,31% dan 101,71% dengan rata-rata capaian sebesar 109,01%. Tahun 2021, perolehan rata-rata capaian kinerja sedikit mengalami penurunan di angka 98,95%, dengan indikator kinerja Persentase RLH dan Persentase RT dengan air minum layak masing-masing sebesar 97,76% dan 82,13%.

Sasaran 6.
Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan

Tabel 3.8 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan

	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7	Persentase PAD Terhadap pendapatan		%	13,18	12,97	98,41	14,85	14.91	100.40
8	Nilai PDRB Perkapita		Juta Rupiah	17,83	14,03	78,69	14,51	14,31	98.62
9	Nilai Investasi	PMA	US (Juta)	121,39	31,77	26	127,46	23,49	18,43
		PMDN	Milyar (Rupiah)	536,12	1.147,37	214	589,73	1.260,32	213,71
	Rata-rata Capaian Kinerja					104,27			107,79

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan pada tahun 2021

memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 107,79%. Angka ini lebih tinggi dari capaian tahun 2020 yaitu sebesar 104,27%.

Sasaran 7.
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.9 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
10	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8	13,86	14,47	95,60
11	TPT	%	3,20	4,58	56,88	3,28	3,32	98,78
	Rata-rata Capaian Kinerja				80,84			97.19

Dari tabel 3.9 diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Kemandirian Masyarakat memperoleh rata-rata capaian kinerja 97,19%. Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 98,78% yang disebut sebagai Indikator Negatif. Sedangkan indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 95,60% pada tahun 2021. Perolehan capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 80,84%.

Sasaran 8.
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	66,84	66,94	100,15	67,20	67,19	99,99
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,15			99,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja sebesar 100,15 % pada tahun 2020 dan capaian kinerja sebesar 99,99 % pada tahun 2021.

Sasaran 9.
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
13	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,2	13,71	103,86	13,75	13,95	101,45
14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,25	6,41	102,56	6,50	6,42	98,77
	Rata-rata Capaian Kinerja				103.21			99,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,99 % pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,21 %.

Sasaran 10.
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	30,00%	30,00%	100,00	650,00	604,92	93,06
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,00	89,05	100,06	90,00	89,22	99,13
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,03			96,09

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pada Tahun 2021 sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 99,13% dan 93,06%. Berdasarkan hasil reviu RPJMD 2019-2024, Untuk indikator KLA, tahun 2020 menggunakan target persentase, sedangkan tahun 2021 menggunakan target skoring. Secara keseluruhan, perolehan sudah masuk ke dalam kategori Sangat Baik karena di atas 91 persen yaitu 96,09%.

Sasaran 11.
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.13 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,41	60,82	109,76	56,17	67,00	119.28
	1. Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	90,39	-	87,91	89.73	102.72
	2. Indeks Kualitas Sungai	Indeks	-	50,91	-	42,30	54.26	128.27
	3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	-	46,08	-	46,08	46.83	101,63
	Rata-rata Capaian Kinerja				109,76			110,66

Berdasarkan tabel 3.13, diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 110,66%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 109,76%. Indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 mengalami perbedaan dimana target untuk tahun 2020 belum ditetapkan karena baru dimasukkan pada perencanaan perubahan pada Januari Tahun 2021.

Sasaran 12.
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 Menurunnya Indeks Risiko Bencana

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
18	Indeks Risiko Bencana Daerah(IRB)	Indeks	150,39	157,90	95.01	144,30	140,88	101,48
	Rata-rata Capaian Kinerja				95.01			101,48

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Menurunnya Indeks Risiko Bencana mengalami indikator negative dimana target untuk menurunnya risiko bencana yang di targetkan sebesar 150,39% dengan realisasi sebesar 157,90% dengan capaian kinerja sebesar 95,01% pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, perolehan rata-rata capaian kinerja adalah 101,48%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun sebelumnya.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2019-2024 per sasaran strategis terlihat pada table berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD	Rata-rata Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26	86,53	100,31	90,03	96.11 %	**96,11 %**
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100 %	**100,00 %**
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)	63,76 (B)	87.34	83,5 (A)	76.36%	**76.36%**
4	MeningkatnyaKualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20	85,73	104,30	94,00	91.20 %	**91,20 %**
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80	97,76	99,96	98,15	99.60 %	**98,27%**
		6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	%	82,02	82,13	100,13	84,72	96.94 %	
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14,91	100.40	15,73	94.79 %	**90.30%**

		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51	14.31	98.62	15,56	91.97 %	
		9	Nilai Investasi							
			Nilai PMDN (Fasilitasi)	Milyar Rupiah	589,73	1.260,32	213,71	784,93	160.56 %	
		10	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	127.46	23,49	18,43	169,27	13.88 %	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86	14,47	95,60	12,69	114 %	**115,06 %**
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,32	98,78	2,86	116.08 %	
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20	67,19	99,99	67,92	98.93 %	**98,93 %**
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	Tahun	13,75	13,95	101,45	14,50	96.21 %	**92,75 %**
		15	Persentase RLS	Tahun	6,50	6,42	98,77	7,19	89.29 %	
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00	604,92	93,06	910,00	66.47 %	**81,99 %**
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00	89,22	99,13	91,50	97.51 %	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,91	89.73	102.72	88,22	101.71%	**114.04%**
		19	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,30	54.26	128.27	42,60	127.37%	
		20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,08	46.83	101,63	46,50	100.71%	
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	21	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,00	140,88	101,48	128,94	109.26 %	**109,26 %**
			Rata-rata capaian kinerja							**97.02%**

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target akhir dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024. Dapat di lihat, Tahun 2021 merupakan tahun kedua RPJMD, akan tetapi capaian rata-rata jika dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan, capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai yang baik yaitu 97.02%. Terdapat 4 Sasaran yang memperoleh rata-rata capaian kinerja di atas 100%. Selanjutnya terdapat 7 sasaran yang memperoleh capaian 81,00% - 99,99%. Dan yang terakhir adalah 1 sasaran yang memperoleh capaian dibawah 80%.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Standar Nasional

	Indikator Kinerja	*Satuan*	*Tahun 2021*			*Target Nasional*	*Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Nasional*	*Ket.*
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26	86,53	100,31	**71**	**121,87%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	**4 (WTP)**	**100%**	Renja Kemenkeu 2021
3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)	63,76 (B)	87.34	**81.2**	**78.52%**	Renja Kemenkeu 2021
4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20	85,73	104,30	**58,5%**	**146,55%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80	97,76	99,96	**223.180 unit**	**-**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	%	82,02	82,13	100,13	**92,81**	**88,49%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14.91	100,40	**100%**	**-**	Renja Kemenkeu 2021
8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51	14.31	98.62	**3,5-5,2% per tahun**	**-**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
9	Nilai PMDN (Fasilitas)	Milyar Rupiah	589,73	1.260,32	213,71	**858,50 T**	**18,51%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
10	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	127.46	23,49	18,43			
11	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86	14,47	95,60	**19.15-19,55%**	**124,44%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,32	98,78	**6.49**	**148,84%**	BPS Tahun 2021
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20	67,19	99,99	**73.5**	**91.41%**	BPS Tahun 2021
14	Persentase HLS	Tahun	13,75	13,95	101,45	**13,08**	**106.65%**	
15	Persentase RLS	Tahun	6,50	6,42	98,77	**8.56**	**75.00%**	

16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00	604,92	93,06	**1000**	**60.49**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00	89,22	99,13	**73,5**	**121.39**	
18	IKU	Indeks	87,91	89.73	102.72	**84,20**	**106.57%**	Perpres No 86/2020 ttg RKT 2021
19	IKA	Indeks	42,30	54.26	128.27	**55,20**	**98.30%**	
20	IKL	Indeks	46,08	46.83	101,63	**62,50**	**74.93%**	
21	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,0	140,88	101,48	**128,05**	**89,98%**	BNPB Tahun 2021

Data di atas menggunakan data capaian daerah tahun 2021 dan dibandingkan dengan target Nasional. Target Nasional disini adalah Target Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Selain itu, standar Nasional yang digunakan lainnya adalah Rencana Kementerian Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, BPS Tahun 2021 dan data BNPB Tahun 2021. Adapun hasil dari data di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang ada pada indikator kinerja Nasional. Namun masih terdapat indikator kinerja masih belum mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, terlihat beberapa indikator memiliki target yang berbeda.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebelum dilakukan analisis, perlu diketahui bahwa RPJMD Tahun 2019-2024 telah direviu dan mengalami perubahan di beberapa Indikator Kinerja Utama. Sehingga di beberapa IKU, terdapat perbedaan target ataupun satuan target. Namun secara keseluruhan, setiap indikator kinerja dapat dibandingkan capaiannya berdasarkan pesentase rata-rata kinerja.

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Dan Upaya Pemerintah Daerah Di Tahun Mendatang

Secara Umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini melebihi hingga 100% meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Adapaun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 102.55 % (Kategori Sangat Baik), karena dari target sebesar 82,89 % di tahun 2020 terealisasi sebesar 85,00 %. Angka ini sedikit mengalami penurunan di Tahun 2021, yaitu capaian rata-rata sebesar 100,31% dengan realisasi 86,53 dari target 86,26%. Kendati demikian walaupun mengalami penurunan tetapi sudah melampaui target yang diinginkan.

Dari pengolahan data pada aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara kuantitatif pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lombok barat masuk dalam kategori Baik, tetapi secara kualitatif dari responden, ada beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga kedepannya untuk segera melakukan perbaikan terhadap layanan yang ada.

Perangkat daerah yang hasil layanannya mencapai target antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukimam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Gunungsari, Batulayar.

Sedangkan Perangkat Daerah yang layanannya dibawah atau tidak memenuhi target adalah Dinas Pendidikan, RSUD Patut Patuh Patju, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Dewan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber daya manusia, Kecamatan Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar.

Total Responden secara keseluruhan pada 43 OPD yang yang terdata pada aplikasi survei kepuasaan masyarakat adalah sebanyak 3.774 responden, dengan nilai indeks kepuasaan masyarakat sebesar

86,53 yang tergolong kategori "BAIK". Nilai maksimum adalah 97,14 dicapai oleh Bappeda dan nilai minimum adalah 70,83 dicapai oleh Dispar.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih "merangkak" dalam hal perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sempat terkendala oleh pandemi covid-19. Implikasi dari kondisi ini, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan merasionalisasi anggaran di sejumlah Perangkat Daerah. Meskipun ada rasionalisasi anggaran pada program/ kegiatan Perangkat Daerah, namun target kinerja kegiatan/ sub kegiatannya tidak dikurangi atau sama dengan target kinerja anggaran murni hal ini disebabkan output masing-masing kegiatan/ sub kegiatannya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan akan berimbas pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga walaupun dalam 'keterbatasan', Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mampu meraih piagam penghargaan dari Ombudsman atas Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Ombudsman

Dilihat dari analisis penyebab keberhasilan pencapaian target organisasi adalah :

1. Sudah semakin baiknya penerapan Sistem Pengendalian Intansi Pemerintah dengan melakukan monitoring dan Rapat evaluasi secara rutin dan berkala, terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Sudah semakin baik dan intensifnya koordinasi antar bidang, dan koordinasi eksternal Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran pelayanan publik tahun 2021.
3. Semakin tingginya ratio ketersediaan data serta hasil kajian dan penelitian sehingga menunjang kelancaran proses

perumusan kebijakan yang mendukung dan memudahkan proses pelayanan.

Gambar 3.2 Penyerahan piagam penghargaan oleh Ombudsman RI

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Hal-hal Yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil SKM adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan anggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan keramahan petugas pelayanan.
3. Kemudahan bagi responden dalam mendapatkan infromasi dalam mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik.
4. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik
5. Penggunaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Barat

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Opini BPK pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai target WTP dengan rata-rata capaian sebesar 100% pada tahun 2021. WTP juga ditargetkan pada tahun 2022 sampai dengan akhir tahun perencanaan pada RPJMD 2019-2024.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2021 sebesar 100%, berikut analisis penyebab keberhasilan pencapaian target :

1. Berdasarkan pemeriksaan neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan, BPK memberikan opini WTP "Wajar Tanpa Pengecualian" atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
3. Peningkatan sumber daya manusia di bidang keuangan, pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan dan mempercepat penyelesaian atas pemeriksaan BPK tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan koordinasi internal di Lingkungan Pemda Lombok Barat maupun eksternal kepada BPKP Perwakilan NTB untuk proses pendampingan selama pemeriksaan;
5. Peningkatan peran APIP untuk meningkatkan kinerja SPIP;
6. Pencegahan temuan berulang;
7. Deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan.
8. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
9. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Selain melakukan upaya optimal dalam rangka mempertahankan predikat WTP, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti :

1. Atas pemeriksaan BPK tahun berkenaan, hal-hal yang menjadi temuan agar segera ditindaklanjuti dan dipantau oleh pimpinan.
2. Sekretaris daerah sebagai pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembaruan informasi pada KIB secara aktual dan menambahkan informasi yang terkait detail barang dan pemanfaatannya.

Sasaran 3.
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Nilai AKIP pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja belum mencapai target yang diharapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020, target Sakip BB belum bisa dicapai. Dapat dilihat dari capaian rata-rata 2019-2020 yang cenderung menurun dengan perolehan angka masing-masing adalah 89,81% dan 89.80%.

Sebagaimana diketahui SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berusaha memperbaiki diri terkait dengan hasil evaluasi Sakip sesuai dengan arahan Kemenpan RB, dan pada tahun 2019 dan 2020 telah mendapatkan nilai B. Target pada tahun 2021 adalah mendapatkan nilai SAKIP 73,00 (BB), namun sampai LAKIP ini tersusun dan tersajikan, nilai SAKIP tersebut belum direlesase sehingga belum dapat disajikan.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja tahun 2020 adalah 63,76, dengan persentase 89.80%. Angka ini cenderung menurun dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian 89,81%. Hal ini dikarenakan ada beberapa komponen penilaian SAKIP belum

terpenuhi dan belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari KEMENPAN dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi KEMENPAN dan RB, ada beberapa perbaikan yang ditujukan kepada Pemkab, yaitu diantaranya:

1. Kualitas SAKIP belum menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan Sasaran Strategis, kualitas indicator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.
2. Kinerja belum berorientasi hasil dan indicator kinerja belum memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup.
3. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja tidak berjalan optimal.
4. Laporan kinerja pemerintah daerah dan Perangkat Daerah belum menyajikan analisis yang akurat terkait pencapaian kinerja.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Solusi dan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran, indikator kinerja dan targetnya;
2. Konversi program (program yang tidak sesuai/tidak tepat sasaran dihapus);
3. Mereview Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memperbaiki kualitas penyusunan LAKIP;
4. Memperbaiki kualitas reviu internal AKIP;
5. Membangun Aplikasi SAKIP yang sekaligus sebagai upaya monev Perjanjian Kinerja semua Perangkat Daerah yang beralamat : http://www.sakip.lombokbaratkab.go.id;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Gambar 3.3 Aplikasi sakip.lombokbaratkab.go.id

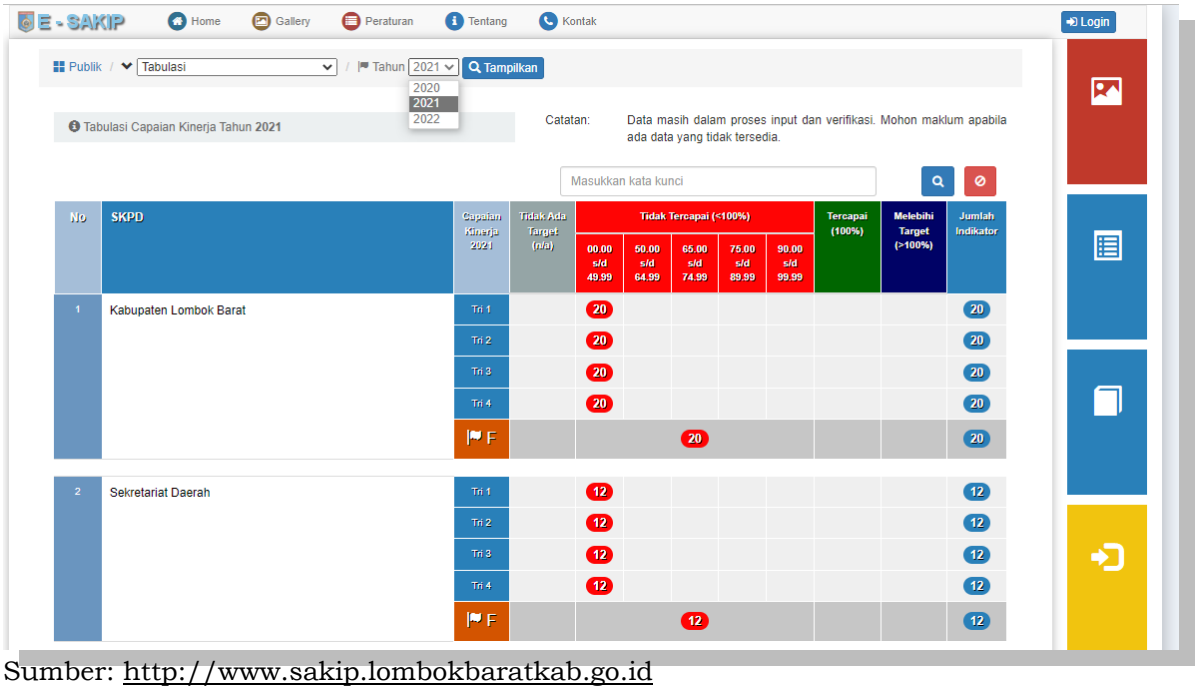

Sumber: http://www.sakip.lombokbaratkab.go.id

Pada aplikasi SAKIP, Pemerintah Daerah dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan Kabupaten dan Perangkat Daerah secara pertriwulan. Pada tahap ini, dapat diketahui sejauh mana tingkat capaian tiap Perangkat Daerah.

Sasaran 4.
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah belum mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 69,56% dari target yang ditetapkan sebesar 76,55% dengan capaian kinerja 90,87%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Tahun 2021 realisasi indikator kinerja meningkat hingga 85,73 dengan capaian 104,3%. Angka ini menjadikan Pemerintah Daerah optimis untuk target akhir tahun RPJMD sebesar 94,00, dimana target ini memposisikan capaian Sasaran sebesar 91,20%.

Program Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan indikator kinerja Peningkatan Wilayah yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian merupakan salah satu alternatif untuk menggerakan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi manakala dihubungkan dengan

pusat-pusat perekonomian akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara langsung maupun tidak langsung akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak didaerahnya.

Pusat-pusat perekonomian seperti pasar dan tempat wisata mampu memberikan output yang tinggi pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multifiler effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian tersebut menurut kewenangan pengelolaanya terdiri dari Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Adapun panjang jalan Kabupaten dari tahun 2016-2020 adalah sama yaitu sepanjang 571.584 km

Grafik 3.1 Panjang jalan kabupaten tahun 2016-2020

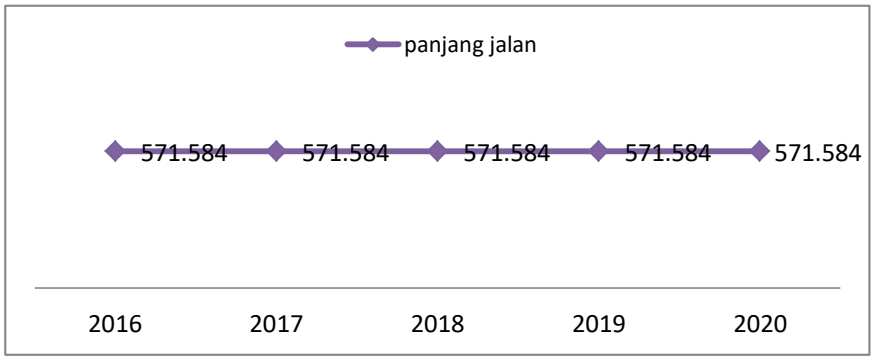

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat

Seperti yang dapat dilihat diatas, Panjang Jalan Kabupaten Lombok Barat mencapai 446,48 Km pada tahun 2014–2015 dan 571,584 Km pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Data diatas mengasumsikan bahwa panjang jalan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kewenangan kabupaten untuk yang mengelola. Sehingga bertambah dan berkurangnya panjang jalan tergantung pada pelimpahan jalan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kabupaten Lombok Barat. Namun yang perlu diperhatikan dan tentunya ditelaah realisasi capaiannya adalah dari total Panjang jalan kabupaten tersebut, berapa persen jalan dengan kualitas baik dan buruk.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Table 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021

Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target		Capaian Kinerja	
			2020	2021	2020	2021
Peningkatan Konektivitas Wilayah	1. Capaian Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	14 trayek (45,16 %)	15 trayek (48,39%)	16 trayek (51,61%)	15 trayek (48,39 %)	16 trayek (51,61%)
	2. Persentase jalur trayek menuju pusat perekonomian	24/32 75 %	25/32 78,13%	26/32 81,25%	24/32 75%	24/32 75%
	3. Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata	43/50 86 %	43/50 86 %	43/50 86 %	43/50 86%	43/50 86%

Keterangan : 1 2 3 dijelaskan dalam tabel dibawah

Tabel 3.18 Capaian Indikator Utama Konektivitas Antar Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

1

No	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Panjang Jalur Trayek (Km)	Jumlah Moda Transportasi					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	U.01	Gunung Sari – Mambelan – Lilir – Kekeri – Segerongan – Terep – Peteluan Indah – Selagalas – Mandalika, Pp.	12,1	1	0	0			
2	U.02	Gunung Sari – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.	7	0	0	0			
3	U.03	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan,Pp.	20,5	30	76	41			
4	U.04	Senggigi – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.	8,8	3	4	6			
5	U.05	Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.	11	27	48	45			
6	U.06	Gunung Sari - Lilir - Kekeri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.	12,2	1	0	0			

7	U.07	Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.	12,2	7	1	1			
8	T.01	Keru – Narmada – Mandalika , Pp.	11,3	29	28	21			
9	T.02	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.	21	18	12	11			
10	T.03	Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.	13,9	10	1	1			
11	T.04	Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp.	15,5	0	1	1			
12	T.05	Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel – Mandalika, Pp.	11	0	1	1			
13	T.06	Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gn. Sari,Pp	10,3	0	1	0			
14	T.07	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.	25	7	3	4			
15	S.01	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.	21,59	25	37	33			
16	S.02	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.	47,7	12	28	22			
17	S.03	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.	40,6	0	0	1			
18	S.04	Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.	68,2	0	0	1			
19	S.05	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp	13,5	0	0	0			
20	S.06	Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.	16,1	0	0	0			
21	S.07	Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.	15,4	3	3	3			
22	S.08	Gerung – Rumak – Gunung Pengsong – Prampuan – Bajur – Pagutan, Pp.	17,2	0	0	0			
23	S.09	Gerung – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika -, Pp.	8,5	0	0	0			
24	S.10	Gerung – Gapuk – Banyumulek – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika,Pp.	22,4	1	0	0			
25	S.11	Prampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.	8,4	0	0	0			
26	S.12	Prampuan – Bajur – Bengkel – Mandalika, Pp.	12,1	0	0	0			

27	S.13	Kediri – Bagekpolak – Jerneng - Prampuan, Pp.	8,1	0	0	0			
28	S.14	Gerung – Tempos – Aik Ampat – Dasan Geres – Gerung, Pp.	6,5	0	0	0			
29	S.15	Gerung – Menang – Aikampat – Dasan Geres – Rumak – Labuapi, Pp	12,3	0	1	1			
30	S.16	Gerung-Banyu Urip-Aik Ampat-Gerung,Pp	15,5	0	0	0			
31	S.17	Gerung-Rumak-Banyu Mulek-Suka Makmur-Mesanggok-Gerung,Pp	15,1	0	0	0			
Jumlah			***540,99***	***174***	***245***	***193***	***0***	***0***	***0***
Capaian Kinerja				14	15	16			
			%	45,16	48,39	51,61			
Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rpjmd				**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
			%	**45,16**	**48,39**	**51,61**	**54,84**	**58,06**	**61,29**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi target IKU yaitu dengan adanya peningkatan jalur trayek yang memiliki pelayanan moda transportasi dimana tahun sebelumnya berjumlah 15 jalur trayek hingga tahun 2021 ini menjadi 16 jalur trayek, sehingga dapat dikatakan bahwa target IKU terkait penyediaan jalur trayek aktif untuk tahun 2021 dapat terpenuhi.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Utama Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perekonomian (Pasar) Tahun 2021

2

Kecamatan	Daya Tampung	2017	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Sekotong	**479**	**4**	**479**			
Pasar Sekotong	146		146		Pematangan Lahan Pasar Sekotong Tengah	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.
Pasar Tawun	76		76			Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Pelangan	177		177			Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Kedaro	80		80			

Lembar	**256**	**3**	**256**			
Pasar Lembar	146		146		Landscape Pasar Jelateng Eat Mayang	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Jembatan Kembar	65		65			Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Lendang Garuda	45		45			
Gerung	**1142**	**4**	**1208**	Pasar Tempos		
Pasar Gerung	975		975			Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
						Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.
						Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.
						Gerung – Rumak – Gunung Pengsong – Prampuan – Bajur – Pagutan, Pp.
						Gerung – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika -, Pp.
						Gerung – Gapuk – Banyumulek – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika,Pp.
						Gerung – Tempos – Aik Ampat – Dasan Geres – Gerung, Pp.
						Gerung – Menang – Aikampat – Dasan Geres – Rumak – Labuapi, Pp
						Gerung-Banyu Urip-Aik Ampat,Pp
						Gerung-Rumak-Banyumulek-Suka Makmur-Mesanggok,Pp
Pasar Beleke	25		25			-
Pasar Tempos	66		132			Gerung-Banyu Urip-Aik Ampat,Pp
Pasar Penarukan	76		76			Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
Labuapi	**445**	**3**	**445**			

Pasar Perampuan (Kr. Bongkot)	199		199			Prampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.
Pasar Jerneng	134		134			Prampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.
						Gerung – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika -, Pp.
Pasar Telaga Waru	112		112			Prampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.
Kediri	**629**	**3**	**629**			
Pasar Kediri	395		395			Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.
						Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.
						Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.
						Kediri – Bagekpolak – Jerneng - Prampuan, Pp.
Pasar Banyu Mulek	155		155			Gerung – Gapuk – Banyumulek – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika,Pp.
Pasar Jagaraga	79		79			Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.
Kuripan	**200**	**3**	**250**			
Pasar Kuripan	135		135	Pasar Kuripan Induk	Pasar Giri Sasak	-
Pasar Kuripan Utara (Pindahan Psr Kumbung)	65		65			-
Pasar Giri Sasak			50			-
Narmada	**1425**	**4**	**1425**			
Pasar Narmada	655		655	Pasar Keru		Keru – Narmada – Mandalika , Pp.
						Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.
						Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
						Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp.
						Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel –

						Mandalika, Pp.
						Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gn. Sari,Pp
						Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
Pasar Lebah Sempaga	125		125			Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
Pasar Keru	588		588			Keru – Narmada – Mandalika , Pp.
						Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
Pasar Endut	57		57			Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gn. Sari,Pp
Lingsar	**107**	**3**	**152**			
Pasar Jelateng	62		62	Pasar Duman, Pasar Jelateng Lingsar	Pasar Agro	Gunung Sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekeri-Duman-Segerongan
Pasar Duman (Sigerongan)	45		45			Gunung Sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekeri-Duman-Segerongan
Pasar Agro			45			Gunung Sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekeri-Duman-Segerongan
Gunungsari	**767**	**5**	**777**			
Pasar Lendang Bajur	587		587		Pasar Bukit Tinggi	Gunung Sari – Mambelan – Lilir – Kekeri – Segerongan – Terep – Peteluan Indah – Selagalas – Mandalika, Pp.
						Gunung Sari – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.
						Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
						Senggigi – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.
						Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Kekeri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.

Pasar Lilir	99		99			Gunung Sari - Lilir - Kekeri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.
Pasar Sidemen	27		27			Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.
Pasar Sesela	54		54			-
Pasar Bukit Tinggi			10			-
Batulayar	0	0	0			
Jumlah	**5450**	**32**	**5621**	**171**		

Jumlah Pasar	32
Pasar Memiliki Trayek	24
Pasar Tidak Memiliki Trayek	8
Persentase Pasar Memiliki Trayek (%)	75

Berdasarkan tabel atas dimana Dinas Perhubungan Kabupaten memiliki target penyediaan jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar), dimana dapat terlihat dari tabel tersebut masih terdapat 8 pusat perekonomian (pasar) yang belum memiliki jalur trayek antara lain : Pasar Kedaro, pasar lendang Garuda,Pasar Tempos, Pasar Kuripan, Pasar Kuripan Utara, Pasar Giri Sasak. Delapan pusat perekonomian ini menjadi salah satu terget IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, hingga tahun 2021 ini belum terdapat penambahan jalur trayek menuju pusat perekonomian, dikarenakan kajian dan perencanaan jalur trayek tersebut belum dapat dilaksanakan terkait adanya refocusing anggaran sehingga capaian IKU untuk indikator ke- 2 ini masih sebesar 75% dengan rasio ketidaktercapaian target sebesar 6,25 %.

Tabel 3.20 Capaian Indikator Ketersediaan Jalur Trayek Menuju Pusat Pariwisata Tahun 2021

3

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata		Jaringan Trayek
1	Gunung Sari	1	Cafles Water Park	Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.
		2	Pasar Seni Sesela	

		3	Ecobrick Midang	
		4	Bukit Tiga Rasa	Gunung Sari – Mambelan – Lilir – Kekeri – Segerongan – Terep – Peteluan Indah – Selagalas – Mandalika,Pp
2	Batulayar	1	Taman Langit	
		2	Pantai Duduk	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
		3	Tanjung Bias	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
		4	Makam Batulayar	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
		5	Pura Batu Bolong	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
		6	Pantai Loco	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
		7	Pantai Kerandangan	Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
3	Lingsar	1	Taman Pura Lingsar	Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
		2	Pemandian Sarasute	Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
		3	Aiq Manggong	Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gunung Sari, Pp
		4	Karang Bayan	Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gunung Sari, Pp
4	Narmada	1	Taman Narmada	Keru – Narmada – Mandalika , Pp.
				Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.
				Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
				Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp.
				Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel – Mandalika, Pp.
				Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gn. Sari,Pp
				Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
		2	Botanic Garden	Keru – Narmada – Mandalika , Pp.
		3	Masjid Cina Pakuan	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
		4	Aiq Nyet	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.
				Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
		5	Gunung Jae	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
		6	Air Terjun Segenter	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
		7	Air Terjun Timponan	
		8	Kolam Cinta	Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp.
5	Kediri	1	Kokoq Babaq	Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.

6	Labuapi	1	Pantai Uringin	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
		2	Pantai Kuranji Dalang	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
7	Kuripan	1	Gunung Sasak	
		2	Giri Tembesi	
8	Gerung	1	Pantai Induk	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
9	Lembar	1	Pantai Cemara 1	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.
				Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		2	Pantai Cemara 2	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.
				Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		3	Pantai Cemara 3	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel – Mandalika, Pp
				Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
10	Sekotong	1	Bangko-Bangko	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
		2	Zero Kilometer	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
		3	Pao-Pao	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
		4	Pantai Mekaki	
		5	Gili Gede	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		6	Gili Nanggu	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		7	Gili Sudak	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		8	Gili Air	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.

				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		9	Mangrove Bageq Kembar	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		10	Mangrove Tanjung Batu	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		11	Pantai Elak-Elak	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		12	Pantai Tanjung Kelor	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		13	Pantai Batu Putih	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		14	Dermaga Tawun	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		15	Gili Kedis	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		16	Gili Asahan	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		17	Dessert Point	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		18	Batu Kijuk	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
		19	Buwun Mas	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.
				Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.

Dari Tabel di atas dapat dilihat dari 50 Pusat Pariwisata yang ada di Lombok Barat masih terdapat 7 Pusat Pariwisata yang belum meliliki jalur trayek antara lain : Pasar Seni sesela, Ecobrick Midang, Tamana Langit, Air Terjun Timponan, Gunung Sasak, Giri Tembesi, Pantai Mekaki. Ketujuh tujuan wisata ini menjadi salah satu target indikator

kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat hingga tahun 2024 dimana capaian saat ini berada pada posisi 86%.

Setelah dilakukan analisis terhadap program dan indikator kinerja Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian, diperoleh hasil penjabaran capaian kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan pada item capaian kinerja tahun 2021 dapat diambil kesimpulan terkait dengan permasalahan dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di Perangkat Daerah.

Permasalahan.

1. Masih kurangnya pelayanan sarana dan transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas menuju daerah wisata dan kawasan strategis
2. Masih kurangnya SDM teknis di bidang Perhubungan
3. Belum tersedianya shelter/terminal yang memadai di wilayah Kabupaten Lombok Barat
4. Belum tersedianya angkutan masal perdesaan yang aman, nyaman dan berkepastian
5. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan

Faktor Penghambat.

1. Kurangnya sarana trasportasi yang melayani daerah terpencil guna meningkatkan kesejahteraan daerah
2. Terbatasnya anggran Diklat Teknis di Bidang Perhubungan
3. Tidak tersedianya menu pembangunan Terminal pada alokasi DAK penugasan di Kementerian Perhubungan
4. Kurangnya moda transportasi umum yang melayani jalur – jalur trayek di wilayah Kabupaten Lombok Barat
5. Kurangnya pendanaan untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan

Faktor Pendukung.

1. Terdapat anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melayani masyarakat daerah terpencil melalui dana DAK Reguler berupa pengadaan moda transportasi darat dan laut
2. Tersedianya diklat teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD tahun 2019 -2024

4. Terdapat anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melayani masyarakat daerah terpencil melalui dana DAK Reguler berupa pengadaan moda transportasi darat
5. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 5% fasilitas keselamatan pada setiap paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Terkait kendala di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan beberapa alternative untuk dapat menghadapi kendala tersebut di atas sekalipun jalan yang ditempuh belum mampu mencapai target sasaran. Adapun langkah-langkah alternative tersebut antara lain :

1. Membuat dokumen usulan kegiatan yang dapat dilakukan dengan sumber pendanaan melalui APBD I maupun APBN.
2. Atas terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat maka langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain (lintas sektor) agar secara bersama-sama dapat mengefisiensikan Sumber Daya Manusia yang ada pada masing-masing sektor untuk dapat melaksanakan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, upaya lain yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat secara mandiri melakukan kewajiban sebagai masyarakat dalam membantu dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Sasaran 5.
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Capaian rata-rata indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar adalah 109,01% pada tahun 2020, dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu 100,04%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian rata-rata kinerja tahun 2021 adalah 98,27%. Angka ini terbilang tinggi mengingat jangka waktu sampai dengan akhir tahun RPJMD adalah 3 tahun.

- **Persentase Rumah Layak Huni (RLH)**

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut : 1) jenis lantai

bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat seperti yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.21 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah layak huni	unit	173.791	176.287	178.606	219.759	224.138
2.	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	41.071	39.739	38.508	6.314	5.326
3.	Jumlah seluruh Rumah	unit	214.862	216.026	217.114	226.073	229.464
Rumah Layak Huni		%	80,88	81,60	80,19	97,21	97,68
Rumah Tidak Layak Huni		%	19,12	18,40	17,74	2,79	2,32

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, 2021

Berdasarkan Validasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB jumlah rumah kurang/tidak layak huni tahun 2019 masih terdapat 6.314 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat atau masih terdapat 2,79 % rumah tidak layak huni. Sementara rumah layak huni pada tahun 2019 telah mencapai 97,21 %, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 80,19% yang artinya adanya peningkatan jumlah rumah dan rumah layak huni sementara jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni menurun menjadi 5.326 unit atau 2,32%, dan jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 97,68% atau sejumlah 224.138 unit.

Semakin Padatnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan tempat tinggal menjadi tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup, akhirnya banyak ruang terbuka yang dijadikan bangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak tepat disertai kurang baiknya infrastruktur pendukung perumahan menyebabkan permasalahan semakin sulit untuk diatasi.

Capaian kinerja sasaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2021

Indikator	*Satuan*	*Tahun 2021*		
		Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja (%)**
Prosentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	17,60	18,37	104,37
Prosentase Penanganan kawasan kumuh	%	25,97	28,97	111,55
Persentase Ketersedian PSU	%	72,55	72,57	100,03

Dari hasil analisa capaian kinerja meningkatnya Rumah Layak Huni (RLH), Menurunnya Kawasan Kumuh Permukiman dan Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan PSU pada tujuan renstra yaitu meningkatnya akses infastruktur dasar yang melebihi target semua rata – rata di atas 100 % .

Untuk indikator kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yang mencapai 18,37 % dengan target 17,60 % sebesar 104,37 %, di sebabkan nya meningkatnya di sebabkan adanya kegiatan Rumah Tidak layak huni yang targetnya kinerja masih di sesuaikan dengan target renstra kondisi awal renstra perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman, sedangkan untuk indikator Prosentase Penanganan kawasan kumuh dengan capaian 28,97 % dengan target 25,97% yaitu sebesar 111,55 % di sebabkan karena ada capaian kawasan kumuh yang di laksanakan melaui kegiatan kotaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, sedangkan indikator Persentase Ketersedian PSU dengan capaian 72,57 % dengan target 72,55 % yaitu sebesar 100,03 % dikarenakan ada kegiatan yang dilaksanakan dengan pada Program/kegiatan/sub kegiatan untuk urusan penataan dan pengelolaan PSU.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Pencapaian Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Lombok Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pemerintah fokus pada penurunan angka kemiskinan, dimana rumah merupakan indikator yang berpengaruh cukup besar, sehingga alokasi anggaran untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni juga meningkat.

2. Meningkatnya kondisi perekonomian secara keseluruhan menyebabkan masyarakat mampu memperbaiki kondisi perumahan secara swadaya menjadi rumah layak huni.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Belum optimalnya Peran dan partisipasi aktif Pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kawasan permukiman.
3. Belum optimalnya peran masyarakat dan dunia usaha termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
4. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan prasarana Utilitas Umum (PSU) hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di kawasan permukiman.
5. Masih terbatasnya fasilitas umum (pertamanan) yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan serta membangun prasarana ruang publik.
6. Belum memadainya Penerangan jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Barat khususnya di tempat – tempat yang rawan kecelakaan.
7. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kabupaten Lombok Barat, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.
8. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman.
9. Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang didaerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal.
10. Penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, system pembuangan sampah, system pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai. Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar padahal kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran terbatas.

11. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
12. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan belum optimal khususnya perumahan vertical/rusunawa
13. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
14. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota (taman kota) dan Penerangan Jalan Umum yang memadai.
15. Pencapaian terhadap isu gender harus senantiasa menjadi bahan bagi perencanaan dan penganggaran.
16. Belum seimbangnya antara pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan jalanu mum (PJU) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam APBD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah.
17. Penanganan Rumah akibat bencana banjir yang telah terjadi pada tanggal 6 Desember 2021 yang terjadi di 3 wilayah Kec.Batulayar dan Gunungsari dan Kec.Sekotong sebanyak 145 unit dengan rincian sebagai berikut rusak berat,rusak sedang sebanyak 45 unit, 50 unit perlu di relokasi sedangkan yang 50 unit lagi keadaan rumahnya masih utuh akan tetapi lokasi rumah tersebut berada di lokasi lereng gunung dan di bantaran sungai sebanyak 50 unit maka dari itu perlu juga harus di relokasi, jadi total yag di relokasi sebanyak 100 unit.
18. Adanya virus Covid 19 yang menimbulkan dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih di pusatkan penganggaran untuk Penanganan Covid 19 dan yang di arahkan ke biaya vaksinasi.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Solusi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni (RLH) adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat
2. Membantu pemerintah dalam menuntasakan virus covid 19 agar segera normal sehinga perekonomian, PAD, pariwisata perhubungan dan lain lainnya bisa berjalan sesuai dengan rencana /target.

3. Pendataan ulang /validasi ulang rumah akibat bencana baik KTP,KK dan Bukti kepemilikan lahan.
4. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan KTP, KK dan status lahan, sehingga pendataan rumah akibat bencana jelas peruntukannya.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.
6. Penambahan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian sasaran SPM seperti merekrut tenaga fasilitator lapangan atapun mengontrak tenaga ahli individual terutama dalam bidang IT.
7. Meningkatkan koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan,
8. Meningkatkan kontinuitas komunikasi dan pembinaan terutama terhadap program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari bantuan luar negeri, sehingga dapat terealisasikannya bantuan langsung kepada masyarakat,
9. Mengoptimalkan pencapaian sasaran secara prioritas dan penyusunan rencana pembiayaan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.

- **Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum**

Peningkatan jumlah penduduk menuntut peningkatan sarana prasarana pendukung, salah satunya terkait ketersediaan sarana air minum layak. Air bersih merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Pelayanan air bersih, khususnya air minum perpipaan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penataan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, dalam menjalankan tugas penyediaan air minum perpipaan ini masih belum mencapai target pelayanan secara keseluruhan.

Terkait dengan pencapaian target program dari indikator kinerja Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku, mendukung ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air di wilayah permukiman
2. Percepatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum, mensinergikan program dengan institusi yang terkait

3. Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong kepedulian masyarakat dalam kepedulian/ pelibatan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman maupun instalasi air minum
4. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis secara terjadwal dan evaluasi langkah tindak lanjut
5. Penyiapan rencana kerja pelaksanaan fungsi tugas untuk pencapaian target pada setiap tahapan program/ kegiatan.

Tabel 3.23 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Indikator Kinerja	*Target (%)*	*Realisasi (%)*	*Capaian Kinerja*
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak	82,02	82,13	100,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak sebesar 82,13% melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi yang melayani penduduk sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 148.139 KK (592.556 jiwa) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 180.370 KK atau 721.481 jiwa. Pada tahun 2021, capaian IKU sebesar 100,13 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Sudah semakin baiknya penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah yang dilakukan oleh kepala dinas, dengan melakukan monitoring dan rapat evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Sudah semakin baik dan intensifnya koordinasi antar bidang, dan koordinasi internal dinas untuk menunjang kelancaran seluruh pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021.
3. Dari rencana kinerja terdapat beberapa indikator yang belum optimal, disebabkan ketersediaan anggaran untuk indikator dimaksud dialihkan untuk mendukung program prioritas.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, baik berupa sumber daya sarana prasarana perkantoran maupun sumber daya manusia menujukkan efisensi yang cukup baik, dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang ada (257 personil) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan jabatannya sudah menunjukan tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penempatan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang yang tersebar di masing-masing bidang tugas sudah sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target organisasi adalah :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang memiliki *output* cakupan layanan rumah tangga yang menggunakan air minum layak.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang meintikberatkan pada dukungan penyediaan sarana sanitasi layak bagi masyarakat perdesaan.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program ini berisi 3 (tiga) subkegiatan yang memiliki output dalam penyediaan air multisektoral dan air irigasi untuk pertanian.

d. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Perumusan program strategis beserta kualitas indikator kinerja harus terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan diselaraskan dengan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan agar diupayakan terakselerasi dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja program strategis yang ingin dicapai.

2. Komitmen Personil dan perangkat Dinas agar ditingkatkan dalam pencapaian program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas.
3. Perencanaan dan penyediaan dana untuk pembiayaan kegiatan agar terus diupayakan guna pencapaian program strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kegiatan yang kurang efektif mejadi lebih efektif dalam pencapaian indikator kinerja.
4. Peningkatan kualitas SDM Dinas harus terus ditingkatkan, khususnya mengenai Sistem AKIP.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan agar lebih ditingkatkan kualitasnya

Sasaran 6.
Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan belum mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 87,09 %. Berbeda dari tahun sebelumnya, Tahun 2021 rata-rata capaian berada di atas 100% yaitu pada angka 100.40%.

- **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi. Pada Tahun 2021 Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam Target Tahunan untuk APBD, tidak dapat tercapai 100 % yaitu berada pada angka 93,57 %. Keadaan ini berbanding terbalik pada realisasi PAD jika dibandingkan dengan target RPJMD, yaitu realisasi sebesar 14.91% dari target 14.85%.

  Perkembangan penerimaan PAD mengalami fluktuasi yang diakibatkan oleh adanya bencana di beberapa tahun terakhir seperti gempa bumi di tahun 2018 dan pandemi Covid-19 di tahun 2020. Nilai realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi tetapi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastic karena adanya pandemi Covid-19.

Grafik 3.2 Penerimaan PAD Kabupaten Lombok Barat 2016-2021

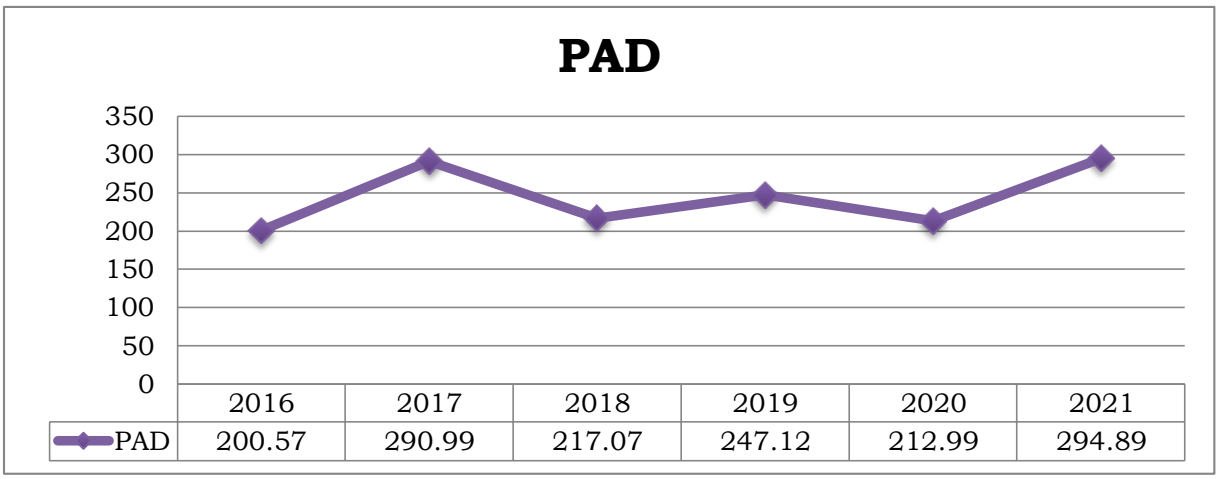

sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2020

Rata-rata pertumbuhan pos PAD pada tahun 2016-2021 sebesar 7,38%. Pada tahun 2016, realisasi PAD sebesar Rp. 200 Milyar lebih dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai Rp. 290 Milyar lebih. PAD pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 294,899,799,910.97 atau 93,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 314,918,940,275.00. Adapun rincian komponen pendapatan daerah, dan PAD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Rincian Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN	*ANGGARAN 2021*	*REALISASI 2021*	*%*
PENDAPATAN DAERAH	1,761,638,061,414.00	1,709,673,251,673.97	97.05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	314,918,940,275.00	294,899,799,910.97	93.64
Pajak Daerah	129,895,955,102.00	85,917,260,689.71	66.14
Retribusi Daerah	17,588,700,000.00	16,857,187,574.03	95.84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,008,894,967.00	12,812,440,435.79	71.15
Lain-lain PAD yang Sah	149,425,390,206.00	179,312,911,211.44	120.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,370,024,665,947.00	1,340,148,642,763.00	97.82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,291,046,775,743.00	1,271,504,743,296.00	98.49
Dana Perimbangan	1,092,995,346,743.00	1,073,521,262,302.00	98.22
Dana Insentif Daerah (DID)	35,571,106,000.00	35,571,106,000.00	100.00
Dana Desa	162,480,323,000.00	162,412,374,994.00	99.96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78,977,890,204.00	68,643,899,467.00	86.92
Pendapatan Bagi Hasil	78,977,890,204.00	68,643,899,467.00	86.92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76,694,455,192.00	74,624,809,000.00	97.30
Pendapatan Hibah	2,804,000,000.00	1,800,000,000.00	64.19
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73,890,455,192.00	72,824,809,000.00	98.56

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2021 (*Un Audit*)

Tabel 3.25. Perbandingan hasil capaian PAD Tahun 2021 dan 2020

Tujuan	*Sasaran*	*Indikator sasaran*	*Satuan*	*2021*			*2020*		
				Target	**Realisasi**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**%**
Optimalisasi penerimaan PAD dalam rangka meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. M	314,92	294,68	93,57	*250,32*	*218,66*	*87,35*

Sumber : Bapenda Kabupaten Lombok Barat, 2021

Dilihat dari tabel di atas, bahwa capaian PAD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, persentase capaian PAD mengalami kenaikan 6,22%. Hal ini mengindikasikan capaian kinerja Pemerintah Daerah meningkat walaupun dalam situasi Pandemi.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja

1. Faktor Pendorong Keberhasilan :
   a) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai **Sangat Tinggi** dalam pencapaian realisasi kinerja Tahun 2021 apabila berdasarkan rasio target RPJMD Tahun 2019-2024. Baik dari sisi Kinerja Fisik maupun Keuangan, yaitu mencapai 98,08% dalam capaian kinerja fisik dan keuangan sebesar 97,49%. Dan apabila berdasarkan target Renja Bapenda tahun 2021 baik dari sisi Kinerja Fisik maupun Keuangan, yaitu mencapai 98,08 % dalam capaian kinerja fisik dan keuangan sebesar 97,99 %.
   b) Kepemimpinan yang revolusioner dan mampu membangkitkan motivasi kerja bawahannya serta menciptakan budaya / lingkungan kerja yang kondusif.
   c) Motivasi dan semangat kerja yang tinggi seluruh jajaran Bapenda dari lini paling atas hingga lini terendah, sehingga segala upaya dan kemampuan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya target PAD Bapenda Tahun 2021 khususnya dan tercapainya target PAD pada umumnya walaupun ditengah keadaan yang sulit ini. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya realisasi PAD sebesar Rp. 294,68 M dari target Rp. 314,918 M atau sebesar 93,57 %. Dan dari sektor Pajak Daerah yang menjadi leading sektor Bapenda, yaitu tercapai sebesar Rp.

85,917 M dari target sebesar Rp. 129 M atau tercapai 66,15%.

d) Inovasi, kreatifitas dan kerja keras serta kerja sama yang kuat dari seluruh jajaran Bapenda dalam rangka mencapai target kinerja yang maksimal dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal. Sebagai contoh (eksternal) yaitu bekerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Sosialisasi PDRD dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Desa, bekerja sama dengan Pihak DJP untuk pengawasan bersama, bekerja sama dengan Bank NTB untuk Tapping Box serta bekerja sama dengan BNI untuk pembayaran non tunai.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan :

a) Adanya Pandemi Covid - 19 yang berawal pada bulan Desember 2019 di Wuhan - Cina dan mulai mewabah di Indonesia pada pertengahan bulan Maret Tahun 2020 masih berdampak negative hingga akhir tahun 2021.

b) Adanya kendala pada triwulan I dalam mengimplementasikan aturan pusat terhadap System Informasi Pemerintahan Daerah dalam hal tata laksana keuangan sehingga program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tidak dapat terdanai dan tidak dapat terlaksana kecuali Gaji dan TPP atas hutang bulan Desember 2020. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada bulan April dan Mei 2021.

c) Adanya aturan Pemerintah Pusat untuk merefocusing Anggaran DAU dan DID untuk kebutuhan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Bapenda merefocusing anggaranya sebesar Rp. 1,214 M dari anggaran Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN khususnya Insentif PPJ sebesar Rp. 0,214 M dan dari Sub Kegiatan PDSOP sebesar Rp. 1 M serta pada bulan Juli 2021 Bapenda kembali terefocussing sebesar Rp. 859 juta dan terasionalisasi sebesar Rp. 100 juta pada APBD Perubahan.

d) Pertumbuhan ekonomi nasional yang walaupun sudah mulai merangkak naik sebesar 3,5% menurut data Statistik. Namun belum maksmal berdampak positif pada pendapatan pajak daerah Lombok Barat yang mengandalkan pada sektor pariwisata khususnya Pajak

Hotel, Restoran dan Hiburan. Dikarenakan beberapa kali diberlakukannya kebijakan PPKM sehingga kunjungan wisatawan belum pulih dan daya beli serta daya bayar masyarakat masih lemah.

e) Akibat dari daya beli dan daya bayar masyarakat khususnya atas kewajiban pajak yang masih lemah tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak sektor lainnya.

3. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :
   a) Menetapkan Target PAD pada APBDP sesuai dengan kondisi yang ada, walaupun pada akhirnya tidak tercapai 100 %.
   b) Merasionalisasi Anggaran Belanja dengan skala super prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
   c) Melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
   d) Melakukan optimalisasi penagihan PBB P2 dengan Pelayanan langsung pembayaran pajak ke lokasi-lokasi perumahan/ permukiman terutama pada hari libur dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai Bapenda.
   e) Memberikan keringanan / penghapusan pembayaran denda PBB P2.
   f) Pemanfaatan teknologi berbasis online pada E BPHTB dan SIM PBB.
   g) Bekerja sama dengan pemerintahan desa melakukan sosialisasi ketentuan perpajakan daerah
   h) Melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Subjek Objek Pajak secara mandiri.
   i) Dibawah pengawasan KPK bekerja sama dengan Bank NTB untuk pemasangan Tapping Box pada Wajib Pajak hotel, Restoran dan Hiburan
   j) Bekerja sama dengan BNI 46 untuk Transaksi Non Tunai, dengan diawali pada Retribusi Pelayanan Pasar (QRIS).
   k) Memberikan Punisshment bagi Wajib Pajak yang menunggak Pajak dengan memasangkan stiker dan spanduk .
   l) Berkoordinasi dengan BPN untuk Zona Nilai Tanah (ZNT).
   m) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak parkir.
   n) Merancang System Pelayanan dan Pembayaran serta pengadministrasian Pajak dan Retribusi Daerah (Si Jempol Jari) walaupun tahun 2021 belum bisa diaplikasikan dikarenakan belum tersedianya anggaran.

o) Melakukan mapping dan pencadangan piutang daluwarsa atas Piutang PBB P2 dan PHR yang rencananya akan dihapus pada tahun 2022.

b. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerjanya Dimasa Mendatang

1. Lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis.
2. Melakukan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mengingat kemampuan keuangan daerah dimasa pandemi ini.
3. Perlunya Koordinasi yang intens baik dilingkungan internal maupun eksternal Bapenda terutama yang berkaitan dengan leading sektor.
4. Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis System yang terintegtasi khususnya Transaksi Non Tunai (Si Jempol Jari).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perpajakan.
6. Pemutakhiran Subjek dan Objek Pajak Daerah khususnya PBB P2.
7. Memperkuat basis data Pajak Daerah secara *Up date*.
8. Melakukan penghapusan Piutang PBB P2 dan PHR yang telah daluwarsa.
9. Meningkatkan SDM ASN dengan mengikutsertakan pada diklat dan bintek PDRD, Pemeriksaan Pajak, Penilaian Pajak, Pelayanan Prima dan Juru Sita Pajak.
10. Mengoptimalkan pelaksanakan kegiatan *Tapping Box* bekerjasama dengan pihak Bank NTB dibawah pengawasan KPK.
11. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam melakukan penagihan aktif dan penegakan hukum atas wajib pajak yang membandel.
12. Mengoptimalkan pemberian *reward* dan *punishment* atas kepatuhan wajib pajak.
13. Bekerjasama dengan BPN untuk Zona Nilai Tanah (ZNT).
14. Bekerjasama dengan pemerintahan desa untuk mensosialisasikan ketentuan pajak daerah dengan memanfaatkan DBH PDRD untuk desa.
15. Melakukan Kegiatan penataan arsip dinamis.
16. UPTD membutuhkan Anggaran Belanja dan Pendapatan tersendiri sehingga dapat lebih maksimal dan mudah untuk

dievaluasi oleh Kepala Badan, mengingat secara struktur organisasi UPTD berada dibawah Kepala Badan Langsung

- **Nilai PDRB Perkapita**

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik Lombok Barat, PDRB per kapita (ADHK) di Lombok Barat pada tahun 2021 sebesar Rp 14,310,255.76 per kapita, meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 14,038,361.39 per kapita dengan perolehan persentase 98.62%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada tahun 2018 mengalami penurunan akibat gempa bumi. Kenaikan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan kembali dan kini akibat pandemi *covid*-19. Dampak yang paling terasa adalah pada dampak ekonomi karena segala aktifitas menjadi sangat terbatas sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Akan tetapi kondisi ini pun tidak bertahan lama, Pemerintah Daerah mulai sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan event dunia yaitu Mandalika *Super Bike* tahun 2021 sebagai ajang untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang terkenal akan wisata alamnya. Keindahan alam yang masih alami menjadi daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga hal tersebut menjadi sangat berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021

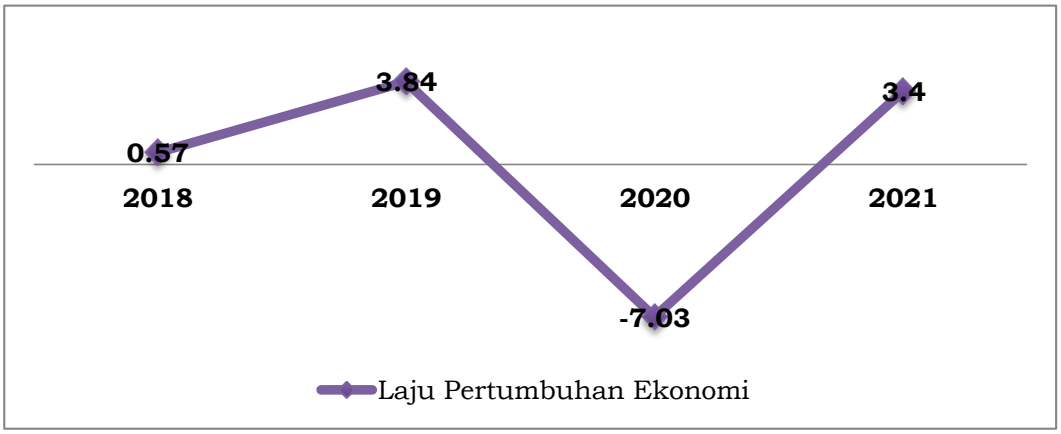

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

Kondisi perekonomian Lombok Barat menunjukkan tanda pemulihan sejak tahun 2017. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK. dimana untuk tahun 2018 PDRB berdasarkan ADH Berlaku sebesar 14.470 trilyun rupiah, pada tahun sebelumnya sebesar 13.955 trilyun rupiah. Sementara untuk ADH Konstan pada tahun 2018 sebesar 10.491 trilyun rupiah dan sebelumnya sebesar 10.432 trilyun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2017	13.955.402	10.432.305
2018	14.470.435	10.491.747
2019	15.452.078	10.894.637
2020	14.568.486	10.128.396
2021	15.408.634	10.472.388

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

Grafik 3.4 PDRB Perkapita Tahun 2019-2021

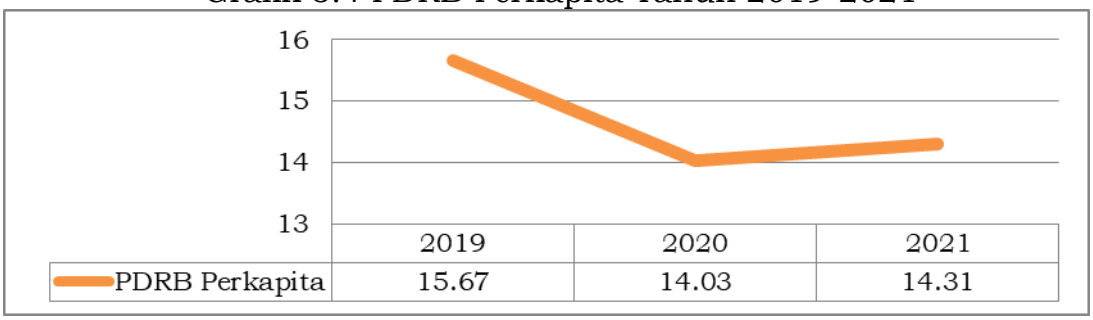

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

Menurut data BPS, Nilai PDRB per kapita Lombok Barat (ADHK) tahun 2019 yaitu Rp 15,675,962.39 dengan jumlah penduduk 694.999. pada tahun 2020 jumah penduduk meningkat menjadi 721.480 sehingga PDRB Perkapita menjadi turun ke angka Rp 14,038,361.39. kemudian di tahun 2021, walaupun jumlah penduduk meningkat sebanyak 10.330 orang, PDRB Per Kapita juga ikut naik dari tahun lalu yaitu sebesar Rp14,310,255.76.

- **Nilai Investasi (PMA) dan Nilai Investasi (PMDN)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Penanaman Modal Asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI)

pada tahun 2021 (Januari-Desember) mencapai angka sebesar 23.490.750 US $. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2021 yaitu sebesar 127.462.308 US $, dengan tingkat capaian sebesar 18,43 % atau sangat rendah.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi investasi PMDN yang ditopang oleh pengusaha lokal yaitu sebesar Rp. 1.250.731.324.505 dengan capaian sebesar 213,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 589.728.158.607. Ini sinyal positif pengusaha domestik kita mulai baik.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.27 Target dan realisasi jumlah investasi dan nilai investasi PMDN/PMA berfasilitas fiscal tahun 2021

No.	Jenis Investasi	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Nilai Investasi	Jumlah Proyek
1.	PMDN (Rp)	135	589.728.158.607	162	1.250.731.324.505	213,78	120,00
2.	PMA (US $)	91	127.462.308	251	23.490.750	18,43	275,82

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat, 2021

Melihat tabel tersebut di atas untuk mewujudkan realisasi investasi PMDN sudah tercapai dan PMA belum tercapai Karena dengan adanya pandemi Covid 19 dan berdampak kepada semua sektor yang mengakibatkan lambatnya realisasi PMA, sehingga banyak perusahaan PMA dan PMDN yang menghentikan/menunda sementara kegiatan investasinya di Lombok Barat dan ditambah dengan adanya larangan berpergian ke Indonesia dari negara asal danuntuk mewujudkan realisasi penerbitan izin juga belum tercapai.

Tabel 3.28 Realisasi Nilai Investasi PMDN/ PMA Tahun 2020– 2021

No.	Kecamatan	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rupiah)		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (USD)		Ket
		Realisasi PMDN 2020	Realisasi PMDN 2021	Realisasi PMA 2020	Realisasi PMA 2021	
1	Gerung	-	278.924.000	134.510	149.425	
2	Narmada	73.175.008.432	11.371.186.168	-	-	
3	Gunungsari	3.580.643.676	9.630.049.907	-	-	
4	Kediri	2.784.778.650	12.453.523.529	150.000	-	
5	Kuripan	-	17.141.615.906	-	-	
6	Labuapi	270.349.254	17.943.162.573	437.553	19.599	
7	Batulayar	236.559.918.498	278.870.008.739	11.137.037	11.156.458	
8	Lingsar	246.370.000	1.113.668.207	145.844	2.213	

9	**Lembar**	820.252.760.000	901.638.525.904	2.110.855	7.274.067
10	**Sekotong**	10.498.300.000	10.290.659.572	17.654.850	4.888.988
	Jumlah	**1.147.368.128.510**	**1.260.731.324.505**	**31.770.649**	**23.490.750**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat, 2022

Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN sulit dipredikasi karena obyeknya belum / tidak jelas. DPMPTSP hanya bisa memberikan fasilitas pelayanan saja. Realisasi investasi juga sangat dipengaruhi oleh iklim yang kondusif khususnya di Lombok Barat dan Indonesia pada umumnya. Kecamatan Lembar menjadi primadona para investor PMDN dan Untuk Investor PMA di Kecamatan Sekotong. Kedua kecamatan tersebut merupakan kawasan wisata. Tetapi untuk investasi non fasilitas pada umumnya investor (pelaku usaha) lokal mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 141.039.100.002,-. dan tahun 2021 sebesar Rp 44.157.900.000,-. Untuk penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 361 orang melalui PMDN Non Fasilitas

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih sangat kurang kegiatan yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Sebaran potensi investasi masing-masing sektor belum ada, perlu ada kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah. Dengan demikian belum ter-Up Date-nya SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah). Pada tahun 2020 dokumen potensi unggulan daerah dalam proses penyusunan, dan pada tahun anggaran 2021 kemarin belum disediakan anggaran untuk pengelola/ peng-up date SIPID. Selain itu SIPID untuk kabupaten sendiri masih dalam proses pembenahan-pembenahan, jadi sulit untuk diakses.
2. Pelayanan perizinan sudah menggunakan aplikasi OSS dan SiCANTIK. Namun diperlukan adanya pengembangan dan back-up sistem informasi penanaman modal.

b. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerjanya Dimasa Mendatang

Pada tahun 2021, target yang telah ditetapkan terlampaui (tercapai). Tercapainya target peningkatan realisasi investasi PMDN tahun 2021 berkat beberapa upaya sebagai berikut :

1. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM

2. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegerasi secara elektronik (OSS).

3. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
4. Tersedianya *Help Desk*
5. Implementasi perizinan secara online dengan Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK).
6. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.

Untuk mendukung peningkatan investasi di Lombok Barat ini diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor. Kepastian hukum berusaha dan investasi diharapkan tercipta seiring implementasi UU Cipta Kerja. Begitu juga, adanya iklim ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi. Kemudahan usaha dan investasi juga diwujudkan melalui, antara lain, pelayanan perizinan investasi dengan *online single submission* (OSS), insentif fiskal dan nonfiskal untuk investasi teknologi menengah dan tinggi, dan pengawalan dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait.

Diharapkan para investor yang menunda eksekusi pada 2021 akan merealisasikan di 2022. Harapannya di tengah-tengah wabah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, program vaksinasi bisa menjadi *game changer* menuju perekonomian yang lebih baik. Faktor kuncinya datangnya investasi. Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan daerah. APBN saja tidak akan cukup untuk menutup seluruh pembiayaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah daerah untuk mempermudah adanya investasi.

Sasaran 7.
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Pada tahun 2021 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat** yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu 1). Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian 95,60% dari target 13,86% dengan capaian realisasi sebesar 14,47%, 2). TPT dengan capaian 98,78 % dari target 3,28 % dengan capaian realisasi sebesar

3,32%. Dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase angka kemiskinan. Pada indikator kinerja TPT, capaian 2020 terjun bebas ke angka 56,88%, dan mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan angka capaian 98,78%.

- **Persentase Angka Kemiskinan**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi masalah di daerah. Berdasarkan pemutakhiran data PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2020 jumlah penyandang dari berbagai jenis PMKS sebesar 7.245, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5.360. Jumlah PMKS tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 80.220 sebagai dampak bencana gempa bumi yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan yang merupakan salah satu jenis PMKS. Jumlah PMKS pada tahun 2020 sebanyak 7.245 yang perlu mendapatkan penanganan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraaan sosial yang dibagi masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS/PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan danpenyediaan anggaran;
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas; dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan nlevel masih belum optimal.

Memperhatikan hal tersebut, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggrakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh

dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengarus terhadap capaian kinerja peneyelenggraan Kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS/PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2017-2021) mengalami penurunan seperti gambar berikut:

Grafik 3.5 Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

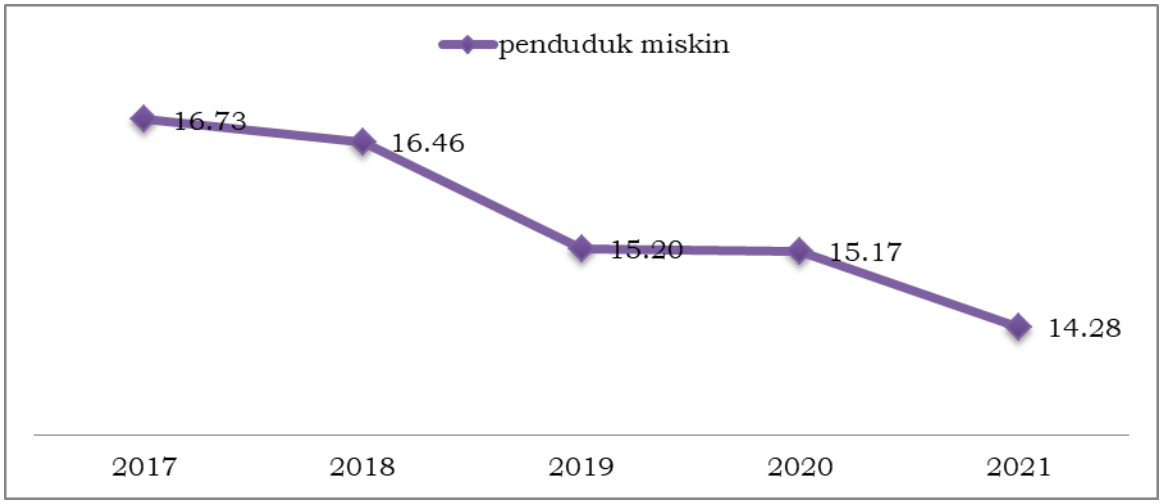

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2017-2021) mengalami penurunan secara konsisten, namun angkanya masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 16,73 persen, menurun menjadi 14,28 persen pada tahun 2021 atau sebanyak 10.600 (2,45 persen) jiwa.

- **Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang**

Dari hasil inventarisasi beberapa isu tersebut, yang menjadi pokok penanganan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yaitu:

1. Peningkatan kualitas penanganan PMKS/PPKS Peningkatan kualitas penanganan PMKS/PPKS dilakukan melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial disertai dengan Profesionalitas, Pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial 27 (PSKS) dan Pengembangan IPTEK. Peningkatan dalam pembaharuan (updating) data PMKS/PPKS harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial dengan perkembangan IPTEK haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan PSKS Peningkatan kualitas pemberdayaan PSKS dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan PSKS perlu ditingkatkan kepedulian dan rasa Kesetiakawanan di lingkungan masyarakat. Agar timbul sinergitas dalam penanganan masalah PMKS/PPKS.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan

program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu :

- Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
- Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
- Ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dengan melihat Rasio Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja, sedangkan rasio orang bekerja menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja pada angkatan kerja

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Table 3.29 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang Bekerja (Ribu Orang)	309.811	316.827	279,31	335,79	341,09
2	Angkatan Kerja (Ribu Orang)	463.615	480.959	289,1	348,9	357,47
3	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	66,83	65,87	96,61	96,61	95,42

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat,2021

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sebesar 66,83% dari angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 33,17% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang bekerja sebesar 65,87% sedikit mengalami penurunan sebesar -0,96% dari tahun 2016, dengan kata lain masih terdapat 34,13% angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Rasio penduduk yang bekerja tersebut menunjukkan dari 100 orang terdapat 65-66 orang yang bekerja, menganggur dan sedang bekerja. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan jumlah angkatan kerja, yang berarti semakin rendahnya kesempatan kerja yang memadai. Dengan demikian terdapat 34,13% yang akan menjadi pengangguran dan berdampak buruk bagi lingkungan sosial, serta menimbulkan beban penyediaan layanan sosial dan ekonomi, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan lebih banyak peluang usaha baru yang menciptakan kesempatan kerja, diantaranya dengan meningkatkan peran industri kreatif yang ada.

Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Lombok Barat mencapai 480.959 orang, penduduk bekerja sebanyak 316.827 orang, sementara jumlah pengangguran sebanyak 10.749 orang, artinya masih terdapat 153.383 angkatan kerja (31,89%) yang bekerja namun tergolong setengah menganggur atau sebagai pengangguran terselubung. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2020 mencapai 4,58 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,76 persen. Lapangan usaha yang sangat terdampak akibat pandemic covid-19 adalah usaha perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi pariwisata, dan jasa-jasa

Menurut Badan Pusat Statistik Lombok Barat, tingkat pengangguran terbuka di Lombok Barat pada tahun 2021 sebesar 3,32%, masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2021 sebesar 3,28. TPT Lombok Barat tahun 2020 juga meningkat dari tahun sebelumnya (2019) yang mencapai angka 3,76%, dan berada pada posisi ketiga TPT tertinggi Di Nusa tenggara Barat setelah Kota Mataram (6,83) dan Kabupaten Sumbawa Barat (5,50) , serta masih berada dibawah TPT Provinsi NTB yang mencapai angka 4,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Barat disajikan pada gambar berikut.

Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2021

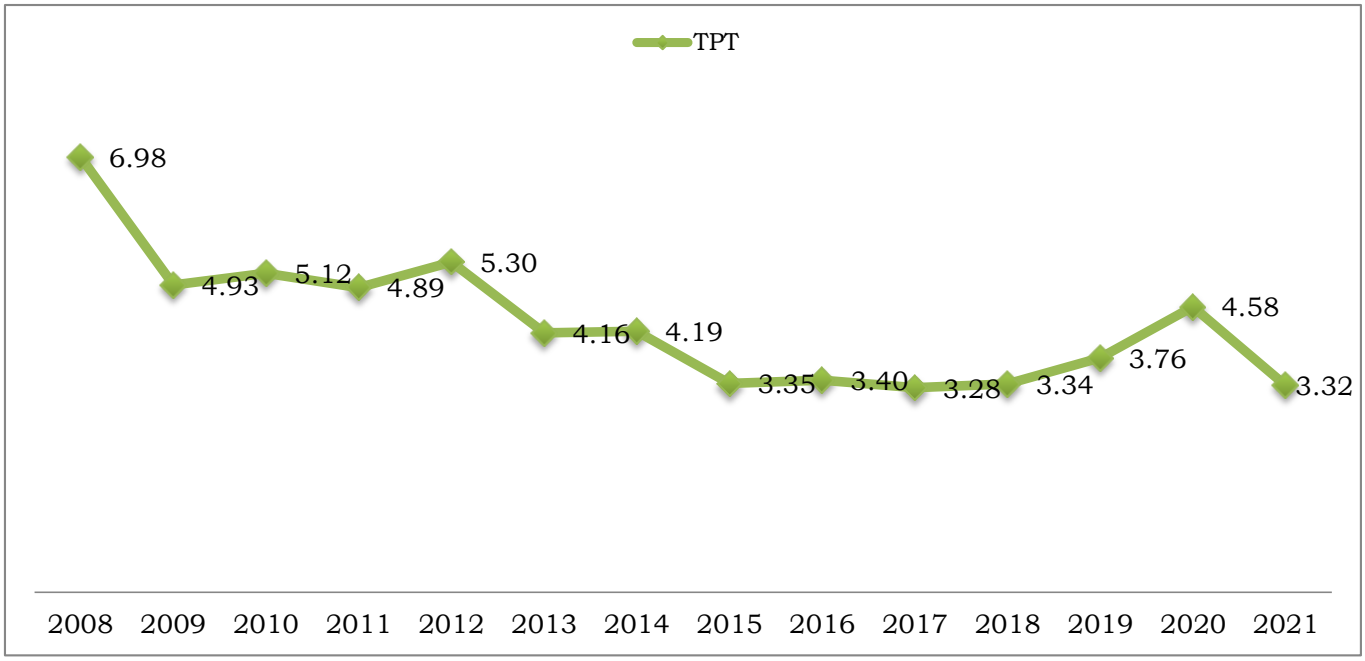

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

Angka TPT Lombok Barat ini bergerak cukup pelan dalam periode 7 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015-2021. Pada tahun-tahun sebelumnya tingkat pengangguran terbuka di Lombok Barat juga tergolong tinggi, tahun 2008 mencapai angka 6,98%, mengalami penurunan secara perlahan, dan pada tahun 2012 mencapai angka 5,30%. Pada tahun 2013-2019 tingkat TPT mengalami fluktuasi, walaupun tahun 2015 perolehan persentase TPT menurun, akan tetapi tahun 2016 kembali naik. Kondisi ini terus berulang setiap tahun hingga akhirnya di tahun 2021 tingkat TPT memperoleh persentase terendah kedua setelah tahun 2017.

Tabel 3. 30 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

	Kegiatan Utama	***Jenis Kelamin***		***Laki-laki + Perempuan***
		Laki-laki	**Perempuan**	
I.	**Angkatan Kerja**			
	1. Bekerja	212.474	159.905	367.379
	2. Pengangguran Terbuka	8.177	4.422	12.599
II.	**Bukan Angkatan Kerja**			
	1. Sekolah	18.910	20.694	39.604

2. Mengurus rumah Tangga	9.688	84.241	93.929
3. Lainnya	15.829	9.771	25.600
Jumlah	**265.078**	**274.033**	**539.111**

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

Upaya-upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sekaligus sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Diketahui bahwa penurunan dalam pengangguran sebesar 1% akan mampu mengungkit pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%.

Sasaran 8.
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Tahun 2020*			*Tahun 2021*			*Target Akhir Tahun RPJMD*	*Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD*
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Usia Harapan Hidup (UHH)	66,84	66,94	100,15	67,20	67,19	99,99	67,92	98,93%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup pada Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mencapai rata-rata kinerja 99,99% pada tahun 2021. Kurang 0,01 untuk mencapai 100% seperti tahun sebelumnya, yang melebihi dari target yang ditentukan.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlaksana 100% dari target yang ditentukan. Permasalahan tersebut teridentifikasi berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal, antara lain :

a) Faktor Internal

Terdapat beberapa permasalahan internal di Dinas Kesehatan dan jaringannya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sepanjang tahun 2021. Faktor internal sebagian besar

berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1) Penghitungan target sasaran program dan kegiatan menggunakan angka proyeksi pertumbuhan penduduk provinsi sehingga kemungkinan jumlah sasaran program dan kegiatan terlalu tinggi mengakibatkan beberapa capaian program dan kegiatan tidak sesuai dengan target.
2) Masih terdapat kekurangan tenaga maupun prasarana dalam melakukan pengambilan data terkait kegiatan penunjang penyelesaian permasalahan prioritas seperti kasus *stunting*, deteksi dini kasus gizi bayi dan balita, ibu hamil risiko tinggi maupun kasus lainnya.
3) Beberapa paket pekerjaan konstruksi telah selesai pekerjaan fisik, namun tertunda pembayaran disebabkan belum lengkapnya persyaratan administrasi.
4) Capaian indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi satu tahun penuh karena data yang berasal dari Puskesmas dan jaringannya belum terekapitulasi secara lengkap dan akurat sampai disusunnya laporan tahun 2021.
5) Data indikator kinerja sebagian besar sulit terkumpul pada awal tahun karena mesti menunggu rekapitulasi dari UPTD Puskesmas dan RSUD Awet Muda Narmada sehingga data sering menjadi kurang lengkap, kurang akurat dan tidak tepat waktu.

b) Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi terkait capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021, antara lain :

1) Penetapan target indikator kinerja bersumber SPM terbaru bidang kesehatan belum dapat diakomodir karena regulasinya keluar ketika dokumen renstra perubahan tahun 2019-2024 selesai dijilid dan diperbanyak, selain itu penafsiran akan SPM terbaru belum sepenuhnya dipahami karena belum tersedianya petunjuk teknis penerapan SPM bidang kesehatan yang terbaru.
2) Pelaksanaan tender paket pekerjaan khusus konstruksi bersumber DAK 2021 sangat terlambat sehingga waktu pelaksanaan efektif tidak mencukupi menyebabkan

banyak paket pekerjaan yang tidak dapat selesai tepat waktu sesuai kontrak.

3) Informasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana terutama bersumber APBN seringkali terlambat sehingga beberapa perencanaan kegiatan khususnya konstruksi batal dilaksanakan karena tidak cukupnya waktu pelaksanaan.

4) Terdapat efisiensi anggaran selain rasionalisasi anggaran yang terjadi pada pertengahan tahun pelaksanaan sehingga banyak kegiatan beserta indikator kinerjanya tidak dapat dilaksanakan.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Dalam rangka mengejar capaian kinerja yang dan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021, dapat diupayakan solusi sebagai berikut :

1) Melakukan penentuan target dan sasaran secara cermat dan proporsional berdasarkan berbagai referensi terkait sehingga ketimpangan antara penentuan target dengan realisasi tidak terlampua jauh.

2) Melakukan upaya pemenuhan sumber daya Dinas Kesehatan dengan melengkapi kebutuhan akan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui usulan kegiatan melalui berbagai sumber dana serta memaksimalkan peran tenaga yang ada ditambah rekrutmen tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3) Melakukan percepatan proses tender bagi seluruh paket pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pembangunan, rehabilitasi maupun renovasi sarana kesehatan.

4) Tetap melakukan monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan secara berkala, terus menerus dan berkelanjutan agar dihasilkan capaian yang sesuai target dan tepat sasaran.

5) Percepatan pelaksanaan vaksinasi masyarakat dapat mempercepat pemulihan Kesehatan, ekonomi, Pendidikan dan semua lini dikabupaten Lombok Barat.

6) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam mengatasi pandemi corona yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2022

Sasaran 9.
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.32 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Tahun 2020*			*Tahun 2021*			*Target Akhir Tahun RPJMD*	*Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD*
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan	13 Harapan lama sekolah (HLS)	13,2	13,71	103,86	13,75	13,95	101,45	14,50	96.21 %
	14 Rata-rata lama sekolah (RLS)	6,25	6,41	102,56	6,50	6,42	98,77	7,19	89.29 %
Rata-rata capaian kinerja				**103,21**			**100,11**		**92,75**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan sudah mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 103,21 %, dan 100,11 pada Tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 92,75 %.

- **Angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)**

  Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata- rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 25 Tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal dan non formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Lombok Barat.

  Data Capaian Rata rata Lama Sekolah merupakan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Lombok Barat. Tahun 2021 ini capaiannya belum memenuhi target, dengan realisasi capaian sebesar 6,42 tahun dari target 6,50 tahun, dengan prosentase capaian kinerjanya 98,77%.

  Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya Rata-Rata Lama Sekolah 12 tahun, antara

lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan yang lebih tinggi menjadi kendala selanjutnya. Intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung capaian Rata – Rata Lama Sekolah antara lain penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelnggaraan ujian paket C setara SMA bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang belum memiliki Ijazah

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

  Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lombok Barat pada tahun 2021 sebesar 13,95 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,95 tahun atau setara dengan Diploma II.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2021 dampak dari Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih membatasi proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar di tahun ini masih belum optimal.
2. Kegiatan dan program yang menunjang percepatan pencapaian peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah masih perlu dilaksanakan lebih optimal lagi. Peran seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk pelaksanaan akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Barat.
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang merupakan perubahan atas Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota masih belum optimal khususnya untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.

4. Kabupaten Lombok Barat termasuk sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap bencana alam. Pada akhir tahun 2021 lalu, kembali terjadi bencana banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lombok yaitu Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Sekotong yang mengakibatkan sarana dan prasarana pendidikan rusak. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap sekolah aman bencana.
5. Kegiatan dan program yang menunjang percepatan pencapaian peningkatan Angka rata-rata lama sekolah untuk jenjang kesetaraan kejar Paket B dan C masih memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Barat.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Langkah–langkah yang di ambil dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan capaian kinerja antara lain:

1. Pada masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melakukan sejumlah terobosan yang dilakukan secara cepat dan massif dengan kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat juga melakukan Evaluasi bersama Kepala Satuan Pendidikan dengan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.
3. Perencanaan Penganggaran yang lebih berbasis kepada percepatan pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah dalam bentuk program kesetaraan Kejar Paket B dan Kejar Paket C.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan komite sekolah dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan

pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan Program BOS yang tepat sasaran.

5. Perencanaan program dan penganggaran berbasis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan baik Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan telah menjadi based data dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021-2024 sehingga arah pelaksanaan program kegiatan diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang merupakan hak dasar seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
6. Keberlanjutan Satuan Pendidikan Aman Bencana harus tetap menjadi fokus perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudyaaan Kabupaten Lombok Barat untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Sasaran 10.
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.33 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

	Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Tahun 2020*			*Tahun 2021*			*Target Akhir Tahun RPJMD*	*Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD*
			Target	**Reali sasi**	**Capaian (%)**	**Target**	**Reali sasi**	**Capaian (%)**		
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	15 KLA)	30,00	30,00	100,00	650,00	604,92	93,06	910,00	66.47 %
		16 IPG	89,00	89,05	100,06	90,00	89,22	99,13	91,50	97.50 %
	Rata-rata capaian kinerja				**100,03**			**96.09**		**81.99**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan** sudah mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 100,03 %. Namun angka ini menurun pada tahun 2021 di pencapaian 96,09%. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 81,99 %.

- **Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

  Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan pernyataan perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tahunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A. Adapun capaian kinerja Dinas DP2KBP3A sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.34 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi Pelayanan DP2KBP3A Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya saing serta berdaya saing	Menurunkan angka kelahiran total	Persentase angka kelahiran	2.32	2.31	99.57
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya saing serta berdaya saing	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IPG	90	89.22	99.13
			Predikat KLA	650	604.92	93.06
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100.00	100.00	100.00

Sumber : DP2KBP3A Kab. Lombok Barat, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggunakan data proyeksi BPS karena DP2KBP3A tidak mampu mengolah data sendiri sehingga menggunakan data sekunder dari BPS.

Untuk persentase TFR menggunakan data dari BKKBN pusat yang menentukan TFR masing-masing Kabupaten/Kota se Indonesia

dan angka ini masih menggunakan angka tahun 2020 karna untuk tahun 2021 belum ada. Untuk persentase penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan sudah mencapai target 100% karena semua pengaduan kasus yang masuk semua diberikan penanganan.

Untuk penilaian Kabupaten Layak Anak Anak (KLA) memiliki skor tersendiri sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dari Kementerian PPPA. Adapun Indikator Kabupaten Layak Anak beserta Skor yang dihasilkan dapat dilihat dari Tabel dibawah ini

Tabel 3.35 Capaian Indikator Kabupaten layak Anak

	Indikator Kabupaten Layak Anak	***Ukuran***	***Nilai***
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Ada, dan mencakup 5 klaster KHA	60
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun	50
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada, dan meningkat setiap tahun	40
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hokum	40
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun	50
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30
8	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	100%	60
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun	45
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	40
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Menurun setiap tahun	25
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	25

13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga	30
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
16	Persentase ASI ekslusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	15
17	Jumlah Pojok ASI	Ada, dan meningkat setiap tahun	15
18	Persentase imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	20
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses oleh anak	20
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkat setiap tahun	20
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	20
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	20
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan	30
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan	50
25	Persentase sekolah ramah anak	Meningkat setiap tahun	20
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	20
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Ada, dan dapat diakses semua anak	45
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100%	40
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	30
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	20
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%	30
TOTAL NILAI			1000

Sumber : DP2KBP3A Kab. Lombok Barat, 2021

a. Analisis capaian kinerja Sasaran

Dari hasil penilaian Pengukuran Kinerja sudah memiliki keterkaitan dengan semua komponen yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A 2019 – 2024, walaupun harus diakui masih mengandung banyak kelemahan dalam strukturnya sehingga perlu memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada agar terjadi keselarasan visi, misi sampai kepada tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

1. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja

   Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih sangat kurang pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja antara lain :

   1) Masih belum efektifnya kelembagaan dan jejaring program KB, karena kurang motivasi dari Pemerintah Daerah disebabkan terbatasnya biaya.
   2) Keterlambatan transfer DAK ke daerah sehingga pemanfaatannya kurang efektif.

Gambar 3.4 Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor:347/MEN/TK.05/7/2021

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2021

Jakarta, 29 Juli 2021

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

   Pengukuran kinerja program kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 dilakukan terhadap anggaran dan realisasi APBD maupun DAK yang digunakan sebagai input pada masing-masing kegiatan kemudian dilakukan pengukuran. Masih ada efektifitas dalam penggunaan dana sebesar Rp 923.190.342,-atau 7,65% sehingga dana yang terserap sebesar Rp 11.137.491.575,-. Dari total belanja DP2KBP3A sebesar Rp. 12.060.681.917,-. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.36 dibawah ini

Tabel 3.36 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021 Menurut Sumber Dana

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Sumber Dana	Realisasi	%	Sisa	%
1	Tidak Langsung	5,313,515,467		5,188,936,889	97.66	124,578,578	2.34
2	Langsung	6,747,166,450		5,948,554,686	88.16	798,611,764	11.84
		5,607,398,500	DAK	4,857,428,859	86.63	749,969,641	13.37
		1,139,767,950	DAU	1,091,125,827	95.73	48,642,123	4.27
		12,060,681,917		**11,137,491,575**	**92.35**	**923,190,342**	**7.65**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2021

Program/kegiatan yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD yang terdiri dari sumber DAU dan DAK selama 1 (satu) tahun berjalan, yang merupakan penjabaran dari program tahunan dan merupakan tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Selain itu program/ kegiatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat menunjang kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat untuk mewujudkan visi dan misinya. Adapun APBD DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021, Belanja Langsung sebesar Rp 6.747.166.450,- dan realisasi keuangan Rp 5.948.554.686,- (88,16%), sisa anggaran yang tidak dicairkan sebesar Rp 798.611.764,- (11,84%).

Pembiayaan dengan sumber DAK dengan anggaran Rp. 5.607.398.500,-menyisakan anggaran sebesar Rp. 749.969.641,- penyebabnya antara lain karena :

- Adanya proses negosiasi harga yang menyebabkan pengadaan barang yang menggunakan proses pengadaan langsung sehingga menyebabkan sisa anggaran belanja cukup besar.
- Harga satuan yang ditetapkan dari pusat terhadap pengadaan barang terlalu tinggi sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan dengan harga barang yang ada di pasaran.
- Pada kegiatan distribusi alokon menyisakan anggaran yang cukup besar sebesar Rp. 185.548.100,- karena alokon yang didistribusikan tidak sampai ke jejaring/jaringan hanya

sampai ke Faskes induk, dan biaya pengepakan juga kurang serapan realisasi karna regulasi yang terkait masalah biaya pengepakan ini kurang detail dijelaskan.

- Pada kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menyisakan anggaran sebesar sebesar Rp. 138.157.000,- karena untuk pelayanan KB IUD Implan masih ada beberapa kecamatan yang tidak memenuhi target, sedangkan pelayanan KB MOP tidak ada realisasi sama sekali dan pelayanan KB MOW hanya mencapai 4 orang target akseptor. Sedangkan pembiayaan dengan sumber dana DAU juga menyisakan anggaran Rp. 48.642.123,-

3. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Karena keterbatasan dana dan adanya rasionalisasi ada beberapa kegiatan terpaksa ditunda pelaksanaan, dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak selesai/ tuntas sehingga capaian maupun dampak yang dihasilkan kurang signifikan. Ada juga kegiatan yang baru mulai persiapan tetapi harus dibatalkan karena adanya rasionalisasi yaitu kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

2. Upaya perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

Untuk masa yang akan datang kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat dibiayai dari dana selain DAU, harus diarahkan ke sana untuk mengurangi beban DAU. Karena kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana selain DAU peruntukannya sangat spesifik dan diatur di dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Lembaga terkait.

Setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap semua kegiatan diperoleh langkah-langkah yang dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja :

a. Melaksanakan kegiatan advokasi, penyuluhan, pembinaan tentang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga menuju keluarga kecil sehat bahagia dan sejahtera.

b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
c. Melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
d. Melaksanakan kegiatan perlindungan khusus anak termasuk anak berkebutuhan khusus.
e. Bekerja sama dengan dengan OPD perencana dan OPP terkait untuk mengevaluasi mengevaluasi indikator Kabupaten Layak Anak.
    - Hak Sipil kebebasan meliputi : akta kelahiran, informasi anak, partisipasi anak.
    - Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi : perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur layak anak.
    - Kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi : persalinan di faskes, prevalensi gizi, Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok,
    - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi : PAUD-HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Intregratif), wajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA).
    - Perlindungan Khusus meliputi : korban kekerasan dan ekploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, Anak Berhadapan Hukum (ABH), terorisme dan stigma.
f. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan).
g. Melaksanakan kegiatan updating database program keluarga berencana.

Sasaran 11.
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

Tabel 3.37 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17 IKLH		55,41	60,82	109,76	56,17	67,00	119.28	58,57	114.39 %
		1. Indeks Kualitas Udara	-	90,39	-	87,91	89.73	102.72	88,22	101.71
		2. Indeks Kualitas Air Sungai	-	50,91	-	42,30	54.26	128.27	42,60	127.37
		3. Indeks Kualitas Lahan	-	46,08	-	46,08	46.83	101.63	46,50	100.71

Untuk diketahui, pada Tahun 2020, IKLH menjadi Indikator Kinerja akan tetapi pada tahun 2021, IKLH dialihkan menjadi Tujuan. Indikator kinerja tahun 2021 tidak memiliki pembanding tahun sebelumnya mengingat IKU, IKA dan IKL tidak ada pada tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** sudah mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 60,82 % dari target yang ditetapkan sebesar 55,41 % dengan capaian kinerja 109,76%. Begitu juga dengan capaian rata-rata tahun 2021, memperoleh angka realisasi sebesar 119,28%. Demikian juga jika dibandingkan antara capaian tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD sudah mencapai taget dengan capaian kinerja sebesar 114,39 %.

Cara perhitungan IKLH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

IKLH Kabupaten Lombok Barat : IKLH
= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
= (0,376 x 54,26) + (0,405 x 89,73) + (0,219 x 46,83)
= 67,00

Perhitungan IKLH dilakukan melalui sistem yang dianalisa di Laboratorium Lingkungan Hidup. Dalam perhitungan IKLH perolehan datanya bekerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lombok Barat, DLHK Propinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Table 3.38 Skor dan Kriteria IKLH

Skor	Kriteria
>90	**Sangat Baik**
70- <90	**Baik**
50-70	**Sedang**
25-<50	**Buruk**
<25	**Sangat Buruk**

Dari data diatas dapat dilihat nilai IKLH Kabupaten Lombok Barat termasuk kategori **sedang**. Hal ini perlu perhatian khusus karena ada kecenderungan nilai IKLH akan menurun yang disebabkan Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi Pencemaran air dan udara serta berkurangnya tutupan lahan di Lombok Barat yang disebabkan Luasnya lahan kritis yang belum tertangani, Konversi lahan hutan, Ilegal loging dan bencana yang mengakibatkan Kerusakan hutan dan lahan. Untuk melaksanakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah daerah, swasta dan kesadaran masyarakat sehingga tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Perhitungan kualitas air sungai untuk parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS di sungai-sungai di Lombok Barat, dihitung berdasarkan baku mutu air. Dimana baku mutu air dipakai standar dalam menentukan air tersebut tercemar atau tidak. Melalui penghitungan ini, diharapkan kualitas sungai di Lombok Barat dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan standar baku mutu (parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS) pada sungai yang dipantau. Untuk pemeriksaan kualitas air sungai dilakukan pemeriksaan kualitas Fisika dan Kualitas Kimia. Untuk kualitas fisika di ukur 4 parameter yaitu paramerter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Untuk kualitas kimia diukur 6 parameter yaitu parameter Ph, DO, COD, BOD,Fe, dan parameter Mn. Sedangkan untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi digunakan dua parameter yaitu total Coli dan E-Coli. Sampai tahun 2019 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Mulai tahun

2020 pengukuran parameter Coli dan E-Coli dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran kualitas air sungai yang lebih valid.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Lombok Barat dilakukan 3 (tiga) kali setahun pada 11 sungai. Pada tahun 2021 ada 47 titik pemantauan yang dilakukan kolaborasi antara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, DLHK Propinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nilai IKA tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Gambar 3.5 *Screenshot* Nilai IKA Tahun 2021

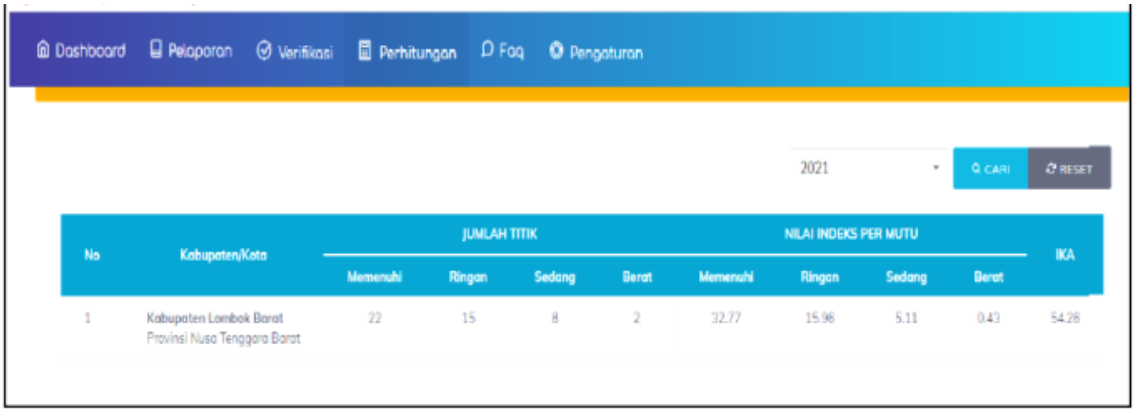

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	22	15	8	2	32.77	15.96	5.11	0.43	54.26

Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/iklh

Table 3.39 Kategori Indeks Kualitas Air (IKA)

Skor	***Kriteria***
90≤ x ≤100	Sangat Baik
70 x <90	Baik
50≤ x <70	Sedang
25≤ x <50	Kurang
0< x <25	Sangat Kurang

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 memiliki angka indeks kualitas air yaitu **54,26** dan berada dalam kondisi **Sedang**. Kondisi ini perlu diperhatikan dan dilakukan upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kualitas air sungai. Hal ini perlu dilakukan karena terdapatnya 22 (Dua puluh dua) titik pantau memenuhi baku mutu, 15 titik cemar ringan, 8 titik kondisi sedang dan 2 titik kategori cemar berat.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja IKA (Indeks Kualitas Air)

Pencapaian realisasi 128,27% dari target, dimana dari target Indeks kualitas air 42,30 terealisasi 54,26. Pencapaian dari target memang lebih tinggi akan tetapi dilihat dari kategori masih termasuk kategori

Sedang. Kondisi sungai dibeberapa titik yang dipantau masih dibawah standar baku mutu yang ditetapkan disebabkan beberapa hal:

a) Tingkat kesadaran masyarakat/Industri tentang pencegahan pencemaran sungai masih rendah.
b) Sungai yang dibawah standar baku mutu rata-rata berlokasi didaerah tambang yang disebabkan pembuangan limbah industri pertambangan yang tidak sesuai prosedur.

Beberapa kendala dalam Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan antara lain :

a) keterbatasan SDM dan sarana prasarana alat laboratorium dalam pemantauan kualitas air sungai
b) Lembaga penyelenggara kalibrasi alat laboratorium untuk akurasi hasil pengujian yang belum ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga harus dilaksanakan di Pulau Jawa.
c) Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat belum terakreditasi
d) Diperlukan tanggung jawab banyak pihak dalam usaha menjaga kualitas air sungai baik dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat

b. Upaya perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

1) Pengadaan peralatan Laboratorium lingkungan yang memadai dan peningkatan SDM laboratorium melalui diklat dan pelatihan.
2) Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran air.
3) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kualitas air sungai.

- **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Pencemaran udara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan. Kebutuhan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten dihitung setelah diperoleh data konsentrasi rata rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO2 dan NO2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran ini dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah

industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Beberapa parameter yang digunakan dalam perhitungan IKU yang umumnya terdiri dari lima pencemar utama, diantaranya bahan permukaan, oksidan/ozon di permukaan, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), dan nitrogen dioksida (NO2). Namun untuk IKLH 2021, perhitungan hanya dilakukan untuk dua parameter saja yang umumnya berasal dari kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Kedua parameter tersebut adalah NO2 yang mewakili emisi kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin dan SO2 yang mewakili emisi dari industry dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur. Data didapatkan dengan pengambilan sample di empat lokasi seperti wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode passive sampler yang dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Barat. IKU dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union Directives*

a. Analis capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara

Untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lombok Barat, maka:

- Rata-rata NO2 = Rerata hasil pengukuran NO2 dari 4 lokasi
- Rata-rata SO2 = Rerata hasil pengukuran SO2 dari 4 lokasi

Nilai IKU Kabupaten/Kota merupakan hasil rata-rata dari seluruh lokasi pemantauan udara pada wilayah administrasinya; Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Lombok Barat dilakukan di empat lokasi yang mewakili daerah permukiman, perkantoran, industri dan padat lalu lintas. Pemantaun ini dilakukan dengan metode *passive sampler* pada dua tahap pengambilan. Lokasi pemantauan tersebut yaitu :

Tabel 3.40 Lokasi Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

No	Level	Pemantauan	Latitude	Longitude	Nilai Pemantauan	
					NO_2	SO_2
1	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 4 Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang, Gerung (Kantor DLH Kab. Lombok Barat). 18-Agu-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA	-8,684217	116,137133	7.47	7.36

		SHU				
2	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 3 Jl. Jenderal Sudirman (BTN Pemda Gerung) 18-Agu-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,67155	116,136183	5.22	7.29
3	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 2 Jl. Raya Lembar (Kantor Syahbandar Lembar) 18-Agu-21 Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,721017	116,082133	7.18	10.55
4	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 1 Jl. By-Pass-BIL,Simpang 5, Monumen Patung Sapi,Gerung 18-Agu-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,664722	116,131944	5.06	3.48
5	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 4 Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang, Gerung (Kantor DLH Kab. Lombok Barat). 3-jun-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,684217	116,137133	4.68	8.6
6	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 3 Jl. Jenderal Sudirman (BTN Pemda Gerung) 3-jun-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,67155	116,136183	7.32	9.77
7	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 2 Jl. Raya Lembar (Kantor Syahbandar Lembar) 3-jun-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,721017	116,082133	6.67	11.63
8	PUSAT	KAB LOMBOK BARAT 1 Jl. By-Pass-BIL,Simpang 5, Monumen Patung Sapi, Gerung 3-jun-21 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	-8,664722	116,131944	6.96	7.2

Gambar 3.6 *Screenshot* Nilai IKU Tahun 2021

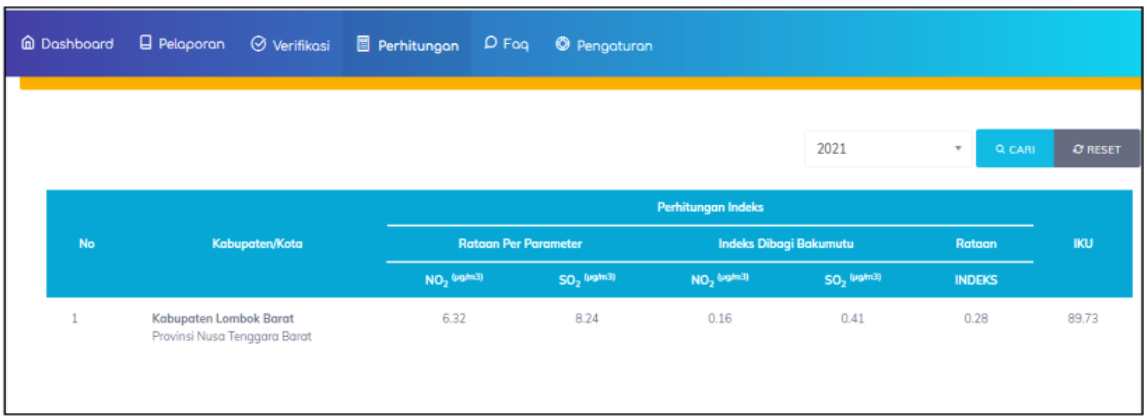

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO_2 (ug/m3)	SO_2 (ug/m3)	NO_2 (ug/m3)	SO_2 (ug/m3)	INDEKS	
1	Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.32	8.24	0.16	0.41	0.28	89.73

Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/iklh

Indeks kualitas udara pencapaiannya diatas target dimana target yang ingin dicapai 87,91 tercapai **89,73** dengan kategori pencapaian dikategorikan **Baik.**

Tabel 3.41 Kategori Indeks Kualitas Udara (IKU)

Skor	Kriteria
90≤ x ≤100	Sangat Baik
70 x <90	Baik
50≤ x <70	Sedang
25≤ x <50	Kurang
0< x <25	Sangat Kurang

b. Upaya perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

1) Mengusulkan Pengadaan peralatan uji kualitas udara supaya Kabupaten Lombok Barat bisa melakukan pengukuran sendiri terhadap kualitas udara di Lombok Barat.
2) Merencanakan Pelatihan SDM Laboratorium untuk operasional uji kualitas udara
3) Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran udara.
4) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral khusunya dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Permukiman dalam peningkatan kualitas udara.

- **Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Berdasarkan SNI 7645-2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan

produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Menurut UU No. 4 tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.
Tutupan lahan berdasarkan SNI 7645:2010 diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

- Daerah bervegetasi (hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman) Daerah bervegetasi merupakan Pendekatan konseptual struktur fisiognomi yang konsisten dari bentuk tumbuhan, bentuk tutupan, tinggi tumbuhan dan distribusi spasialnya. Daerah yang liputan vegetasi (minimum 4%) sedikitnya selama 2 bulan dalam 1 tahun / dengan liputan lichen/mosses lebih dari 25% (jika tidak terdapat vegetasi lain)
- Daerah tak bervegetasi Mengacu pada aspek permukaan tutupan, distribusi/kepadatan dan ketinggian / kedalaman objek. Daerah dengan total liputan vegetasi kurang dari 4% selama lebih dari 10 bulan, atau daerah dengan liputan lichens/mosses kurang dari 25% (juka tidak terdapat vegetasi berkayu herba).

Tutupan lahan hutan merupakan penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan antara lain mikro, tata air dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan memberikan dukungan terhadap keberlajutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dimana tutupan lahan difungsikan untuk penyerapan polutan tertentu serta menjaga debit air dan mengurangi erosi sedimentasi. Untuk ketersediaan data tutupan lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.

Dalam melakukan penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan), maka 4 (empat) data utama yang disajikan:

- Data Tutupan Hutan. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada: a. kawasan hutan; dan b. sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).
- Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan. b. Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang c. diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.
- Data rehabilitasi hutan dan lahan. a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan. b. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

Table 3.42 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

Pemantauan	*Luas wilayah*	*Luas Hutan*	*Luas Belukar dalam Kawasan*	*Luas Belukar pada Fungsi Lindung*	*Kebun Raya**	*RTH***	*Taman Kehati*	*Ruang Hutan dan Lahan*	*DKK*
04-Agu-21	94421.38	21317.61	2846.7	1264.2	0	196.03	0.0358	1.955.179.731	0

*Data LIPI
**Data Cipta Karya + DLH Provinsi NTB

Gambar 3.7 *Screenshot* Nilai IKL Tahun 2021

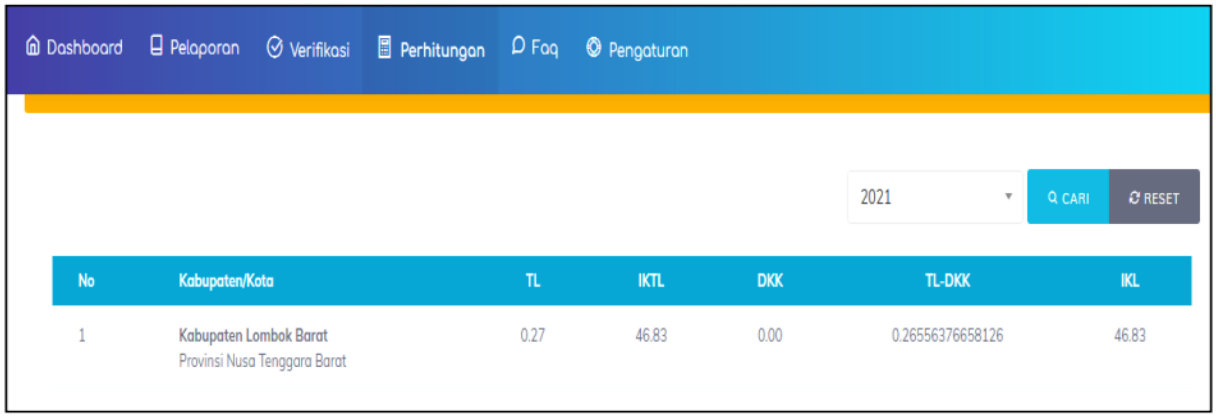

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	0.27	46.83	0.00	0.26556376658126	46.83

Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/iklh

Data Tutupan Lahan Kabupaten yang diperoleh adalah dari hasil analisis citra satelit Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 yaitu **46,83** dan berada dalam kondisi **kurang.**

Tabel 3.43 Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Skor	***Kriteria***
90≤ x ≤100	Sangat Baik
70 x <90	Baik
50≤ x <70	Sedang
25≤ x <50	Kurang
0< x <25	Sangat Kurang

Komposisi tutupan lahan 80% adalah kawasan hutan dimana sejak keluarnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat kewenangan kehutanan sudah diambil alih Pemerintah Daerah Provinsi.

Kondisi indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Lombok Barat yang berada pada kategori kurang ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Berbagai program/kegiatan harus dilakukan untuk menambah jumlah tutupan lahan di Kabupaten Lombok Barat. Program-program terkait pengurangan jumlah lahan kritis juga harus terus dilakukan.

b. Upaya perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1) Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah propinsi untuk meningkatkan tutupan lahan diwilayah Lombok Barat
2) Berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam mempertahankan luas kawasan pertanian sebagai salah satu komponen tutupan lahan.
3) Melakukan Program kegiatan yang mendukung peningkatan tutupan lahan ditingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada antara lain :
   - Kegiatan HMPI (Hari Menanam pohon Indonesia)
   - Konservasi Kawasan Esential Mangrove
   - Reklamasi Lahan Eks Tambang Galian Non Logam
   - Penanaman pohon tutupan vegetasi
   - Penanaman pohon disekitar mata air

Sasaran 12.
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.44 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 Menurunnya Indeks Risiko Bencana

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
11	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	18	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)	150,39	157,90	95.01	143,00	140,88	101,48	128,94	109.26 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB) pada **Sasaran Strategis Menurunnya Indeks Risiko Bencana** pada tahun 2020 masih belum mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 157,90 % dari target yang ditetapkan sebesar 150,39 % dengan capaian kinerja 95,01 %. Berbeda dari tahun sebelumnya, capaian rata-rata kinerja tahun 2021 adalah sebesar 101,48% dengan realisasi indikator kinerja 140,88 dari target 143,00. Demikian juga persentase capaian tahun 2021 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, sudah mencapai target sampai dengan 109,26%.

Indeks Kapasitas Daerah dihitung melalui aplikasi Tool Analisa Kapasitas Daerah, hasil penghitungan Indeks Kapasitas Daerah didapat dari penilaian 7 Indeks Prioritas sebagai berikut:

Table 3.45 Indeks Kapasitas Daerah

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,98	0,72	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,99		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,78		

Penurunan Indeks Resiko Bencana dapat dilakukan dengan Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah yang dapat dilaksanakan melalui Aplikasi INaRISK BNPB/ Tools Penurunan Indeks Resiko Bencana. Kenaikan Indeks Kapasitas Daerah berpengaruh pada Penurunan Resiko Bencana di Kabupaten Lombok Barat ,untuk tahun 2021 target RPJMD 2020 – 2024 sebesar 143 turun menjadi 140,88 ini menunjukkan suatu keberhasilan.

a. Analisis capaian kinerja Sasaran

Ada beberapa faktor yang menjadi **keberhasilan** dalam pencapaian Tujuan pada Badan Penanggulangan Bencana karena adanya perubahan paradigma penangulangan bencana yaitu :

1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat

Pelayanan Penanggulangan tahun 2021 terealisasi sebanyak 139 lokasi/kelompok masyarakat dari target sasaran sebanyak 139 lokasi/kelompok masyarakat dengan jenis layanan sebagai berikut:

Table 3. 46 Pelayanan Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	Jumlah Lokasi Rawan Bencana Suatu Daerah
1	Banjir Longsor	Penguatan tebing sungai dan pemukiman dengan talud pasangan dan bronjong	11 lokasi	11
2	Banjir Longsor	Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	2 lokasi	2 ,lokasi
3	Kekeringan	Pengurangan Resiko kekeringan dengan pemanfaatan sumur bor	3 lokasi	3 lokasi
4	Gempa	Fasilitasi Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana	2 lokasi	2 lokasi
5	Banjir dan longsor	Edukasi pengurangan resiko bencana kerjasama dengan PSP NTB	25 lokasi	25 Lokasi
6	Multi bencana	Penanganan Kejadian Bencana	94 kejadian	83 kejadian
		Jumlah	**139 Lokasi**	**126 lokasi**

Sumber: Lakip BPBD Tahun 2021

Adapun beberapa tindakan tindakan Penanganan Kejadian Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

1. Pemberian Paket Sembako ke daerah yang terdampak.
2. Pemberian selimut , pampers , dan family kit.
3. Pembersihan material banjir
4. Mendirikan tenda pengungsian sementara
5. Pemberian bantuan sembako, selimut,dll
6. Rehabilitasi tebing sungai/pemukiman akibat longsor.
7. Koordinasi dengan Instansi terkait.
8. Droping air bersih bagi daerah yang terdampak kekeringan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. BPBD Kabupaten

Lombok Barat memiliki 30 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Lombok Barat juga dibantu oleh satuan tugas operasional yaitu Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Team Siaga Bencana Daerah sebanyak 43 Orang. Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Lombok Barat pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assesment awal dan evakuasi. Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Lombok Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2021 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Lombok Barat selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Tak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana kebencanaan juga dapat diakses melalui program dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kondisi darurat saat bencana dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

b. Upaya perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

Ada beberapa rekomendasi yang harus ditingkatkan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana antara lain;

1) Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
2) Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah;
3) Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;
4) Pembangunan Desa Tangguh Bencana;
5) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng.

Sesuai dengan capaian kinerja tahun 2021 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan terus dijadikan sebagai masukan dan bahan

pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut .

1. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membantu Bupati Lombok Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Untuk mencapai integritas yang tinggi, sumber daya manusia (petugas lapangan) yang profesional, etos kerja yang tinggi serta moral yang baik tentu sangat diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai aspek misalnya anggaran yang cukup dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, personil/ pegawai yang cukup memadai dengan status pegawai negeri sipil (PNS), sarana dan prasarana yang lengkap sesuai SOP dan kesejahteraan pegawai/petugasyang cukup.

3.2.2. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 17 Program. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3) Program Peningkatan AKIP Daerah
4) Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
5) Program Peningkatan Rumah Layak Huni
6) Program Peningkatan Akses Air Minum Layak.
7) Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi
8) Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan
9) Program Peningkatan Investasi.
10) Program Penanggulangan Kemiskinan.
11) Program Penurunan Angka Pengangguran
12) Program Peningkatan Usia Harapan Hidup.
13) Program Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah.
14) Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah.
15) Program Pengurustamaan Gender.
16) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
17) Program Penanggulangan Bencana.

17 program tersebut ditujukan untuk mencapai 21 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke 21 Indikator Kinerja tersebut sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 dari total Anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 1,787,935,950,027.21

Berdasarkan data, tahun anggaran 2021 pada program utama yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja ke 21 indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 yang diserap sebesar Rp 1,661,793,854,210.49 dengan persentase capaian 94,58 % atau 2,11% lebih tinggi dari tahun 2020.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1) Ketepatan pelaksanaan program yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program tahun 2021.

Berikut tabel analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk tahun anggaran 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.47 Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Nama Program		Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian (%)			Pagu	Realisasi	%
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26	86,53	100,31	1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	92,527,878,407.00	85,853,445,099.00	92.79
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	2.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1,066,307,599,098.40	1,019,858,762,324.91	95.64
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)	63.76 (B)	87.34	3.	Program Peningkatan AIKP Daerah	8,327,307,440.00	7,687,727,745.00	92.32
4 MeningkatnyaKualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20	85,73	104,30	4.	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	73,392,194,936.00	65,254,731,992.00	88.91
5 Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80	97,76	99,96	5.	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	25,938,675,400.00	18,466,058,109.00	71.19
	6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak.	%	82,02	82,13	100,13	6.	Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	11,628,023,750.00	10,399,210,350.00	89.43
6 Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14.91	100.40	7.	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	983,202,355.00	938,985,038.00	95.50
	8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51	14,31	98,62	8.	Program Peningkatan PDRB Sektor-sektor Unggulan	73,329,548,694.00	67,796,280,501.00	92.45
	9	Nilai PMDN (Fasilitasi)	Milyar Rupiah	589,73	1.260,32	213,71	9.	Program Peningkatan Investasi	498,721,700.00	317,647,266.00	63.69
	10	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	127.46	23,49	18,43					
7 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi	11	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86	14,47	95,60	10.	Program Penanggulangan kemiskinan	27,661,546,431.00	27,169,442,981.00	98.22

	Masyarakat	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,32	98,78	11.	Program Penurunan Angka Pengangguran	14,492,624,510.00	14,415,947,211.00	99.47
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20	67,19	99,99	12.	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	190,119,623,377.81	179,762,832,472.58	94.55
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	Tahun	13,75	13,95	101,45	13.	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	17,166,131,360.00	16,895,601,060.00	98.42
		15	Persentase RLS	Tahun	6,50	6,42	98,77	14.	Program Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	138,412,684,254.00	131,539,249,196.00	95.03
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00	604,92	93,06	15.	Program Pengurustamaan Gender	5,814,786,950.00	5,264,085,053.00	90.53
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00	89,22	99,13					
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,91	89.73	102.72	16.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9,079,438,345.00	8,860,177,537.00	97.59
		19	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,30	54.26	128.27					
		20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,08	46.83	101,63					
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	21	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,00	140,88	101,48	17.	Program Penanggulangan Bencana	1,315,843,965.00	1,313,670,275.00	99.83
	Rata-rata Capaian						**102.09**			**1,756,995,830,973.21**	**1,661,793,854,210.49**	**94.58**

Keterangan:
- persentase capaian ≥100%
- persentase capaian ≥90,00 - <100%
- persentase capaian ≥80,00 - <90%
- persentase capaian <80%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 102.09% dengan realisasi anggaran sebesar 94,58% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 dengan realisasi sebesar Rp. 1,661,793,854,210.49. Terdapat 9 program yang sudah mencapai target dan 8 program yang belum mencapai target. Ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran, walaupun anggaran tidak mencapai 100% namun capaian kinerja sudah melampaui target yang diharapkan.

3.2.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Analisis efisiensi penggunaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan. Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 8,49 % atau sebesar Rp. 95,201,976,762.72 dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 dengan realisasi sebesar Rp. 1,661,793,854,210.49. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya rata-rata capaian melebihi target yaitu sebesar 102.09% dari target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunaan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun anggaran 2021 pada tabel berikut :

Tabel 3.48 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	92,527,878,407.00	85,853,445,099.00	92.79	6,674,433,308.00	7.21
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	2	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1,066,307,599,098.40	1,019,858,762,324.91	95.64	46,448,836,773.49	4.36
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	3	Program Peningkatan AKIP Daerah	8,327,307,440.00	7,687,727,745.00	92.32	639,579,695.00	7.68
4	MeningkatnyaKualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	4	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	73,392,194,936.00	65,254,731,992.00	88.91	8,137,462,944.00	11.09
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5	Persentase Rumah layak Huni	5	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	25,938,675,400.00	18,466,058,109.00	71.19	7,472,617,291.00	28.81
		6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	6	Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	11,628,023,750.00	10,399,210,350.00	89.43	1,228,813,400.00	10.57
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	7	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	983,202,355.00	938,985,038.00	95.50	44,217,317.00	4.50
		8	Nilai PDRB Perkapita	8	Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan	73,329,548,694.00	67,796,280,501.00	92.45	5,533,268,193.00	7.55
		9	Nilai PMDN (Fasilitasi)	9	Program Peningkatan Investasi	498,721,700.00	317,647,266.00	63.69	181,074,434.00	36.31
		10	Nilai Realisasi Investasi PMA							
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11	Persentase Angka Kemiskinan	10	Program Penanggulangan Kemiskinan	27,661,546,431.00	27,169,442,981.00	98.22	492,103,450.00	1.78
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11	Program Penurunan Angka Pengangguran	14,492,624,510.00	14,415,947,211.00	99.47	76,677,299.00	0.53
	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%

8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	12	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	190,119,623,377.81	179,762,832,472.58	94.55	10,356,790,905.23	5.45
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	13	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	17,166,131,360.00	16,895,601,060.00	98.42	270,530,300.00	1.58
		15	Persentase RLS	14	Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	138,412,684,254.00	131,539,249,196.00	95.03	6,873,435,058.00	4.97
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	15	Program Pengarusutamaan Gender	5,814,786,950.00	5,264,085,053.00	90.53	550,701,897.00	9.47
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	16	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9,079,438,345.00	8,860,177,537.00	97.59	219,260,808.00	2.41
		19	Indeks Kualitas Air Sungai							
		20	Indeks Kualitas Lahan							
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	21	Indeks risiko Bencana (IRB)	17	Program Penanggulangan Bencana	1,315,843,965.00	1,313,670,275.00	99.83	2,173,690.00	0.17
	TOTAL/RATA-RATA					**1,756,995,830,973.21**	**1,661,793,854,210.49**	**94.58**	**95,201,976,762.72**	**8.49**

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Selain sumberdaya anggaran pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh Sumberdaya Manusianya. Investasi yang paling penting bagi organisasi adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan organisasi agar tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Agar sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat memberikan kontribusi yang maksimal, maka sumber daya manusia itu perlu dikembangkan baik melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pegawai dapat terjadi secara formal ataupun informal dan sangat penting untuk individu maupun organisasi. Pengembangan tersebut dibutuhkan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu program pengembangan pegawai harus dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis. Berikut adalah Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021.

Tabel 3.49 PNS Kabupaten Lombok Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Dinas / Instansi	Diklat Struktural			Diklat Fungsional	Jumlah
		PKN/ PIM II	PKA/ PIM III	PKP/ PIM IV		
1	Sekretariat Daerah	-	5	13	20	38
2	Sekretariat DPRD	-	2	-	-	2
3	Inspektorat	-	9	12	5	26
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	3	3	35	41
5	Dinas Pemadam Kebkaran	1	1	5	-	7
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	2	8	-	10
7	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1	3	1	2	7
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	2	4	6	12
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-	18	3	21
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		3	5	-	8
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	1	-	2	4
12	Dinas Perumahan Dan Permukiman	-	3	10	-	13
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-	3	11	-	14
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	0
15	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	6	-	8
16	Dinas Pariwisata	-	4	17	-	21
17	Dinas Perhubungan	1	2	7	3	13
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	1	2	-	3
19	Dinas Pertanian	-	2	3	58	63
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	2	6	1	9
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	1	3	-	4

22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	6	1	10
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	2	2	50	54
24	Dinas Kesehatan	-	3	4	-	7
25	Dinas Sosial	1	1	7	-	9
26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	2	24	-	27
27	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	2	-	2
28	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	-	2	1	-	3
29	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	5	4	10
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	-	3	-	4
31	Badan Pendapatan Daerah	1	2	6	-	9
32	Badan Penanggulan Bencana Daerah	-	-	4	1	5
33	RSUD Patut Patuh Pathju	-	1	4	-	5
34	RSU Awet Muda Narmada	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0
35	Kantor Camat Gerung	-	-	3	-	3
36	Kantor Camat Lembar	1	-	1	-	2
37	Kantor Camat Sekotong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0
38	Kantor Camat Kediri	-	-	1	-	1
39	Kantor Camat Kuripan	-	-	3	-	3
40	Kantor Camat Labuapi	-	1	-	-	1
41	Kantor Camat Gunungsari	-	1	6	-	7
42	Kantor Camat Batulayar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0
43	Kantor Camat Lingsar	-	-	2	-	2
44	Kantor Camat Narmada	-	-	1	1	2
	Jumlah	**11**	**68**	**219**	**192**	**490**

Sumber: BKD dan PSDM Kabupaten Lombok Barat, 2021

Gambar 3.7 Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

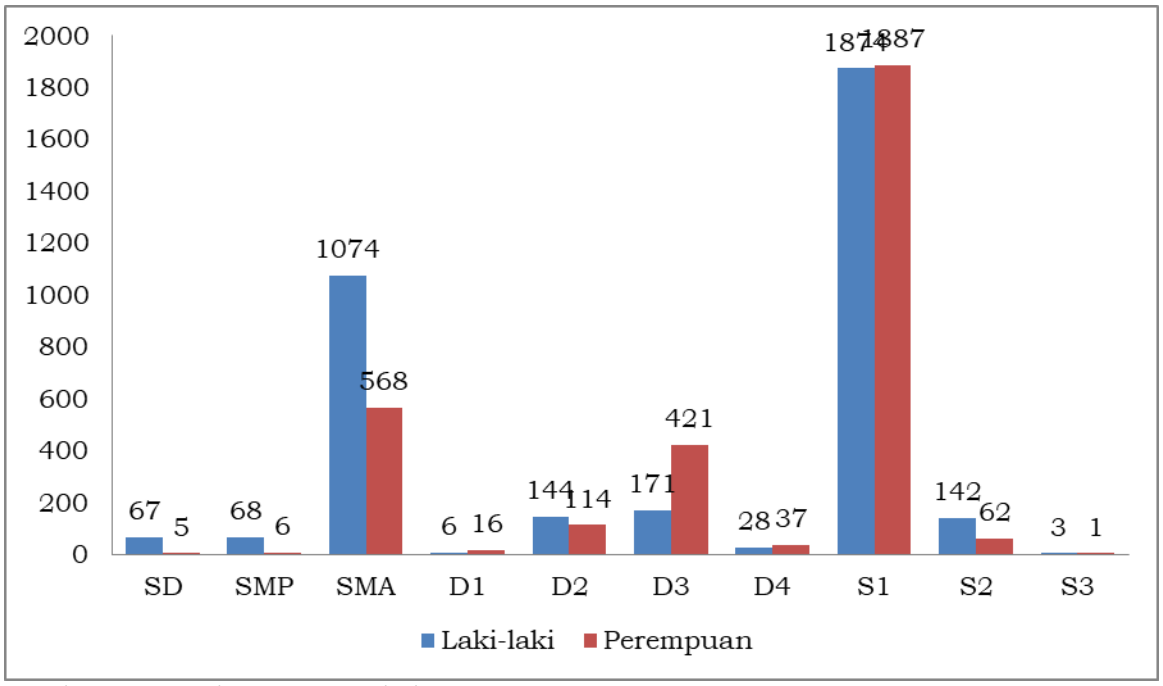

sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat, 2021

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 terdapat 6.694 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin. Dari Gambar 3.7 Di atas dapat dilihat PNS perempuan dengan jenjang pendidikan S1 lebih banyak daripada laki-laki. Akan tetapi jika jumlah keseluruhan PNS perempuan masih berada dibawah jumlah PNS laki-laki yaitu 3.577 dan 3.117.

Gambar 3.8 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat, 2021

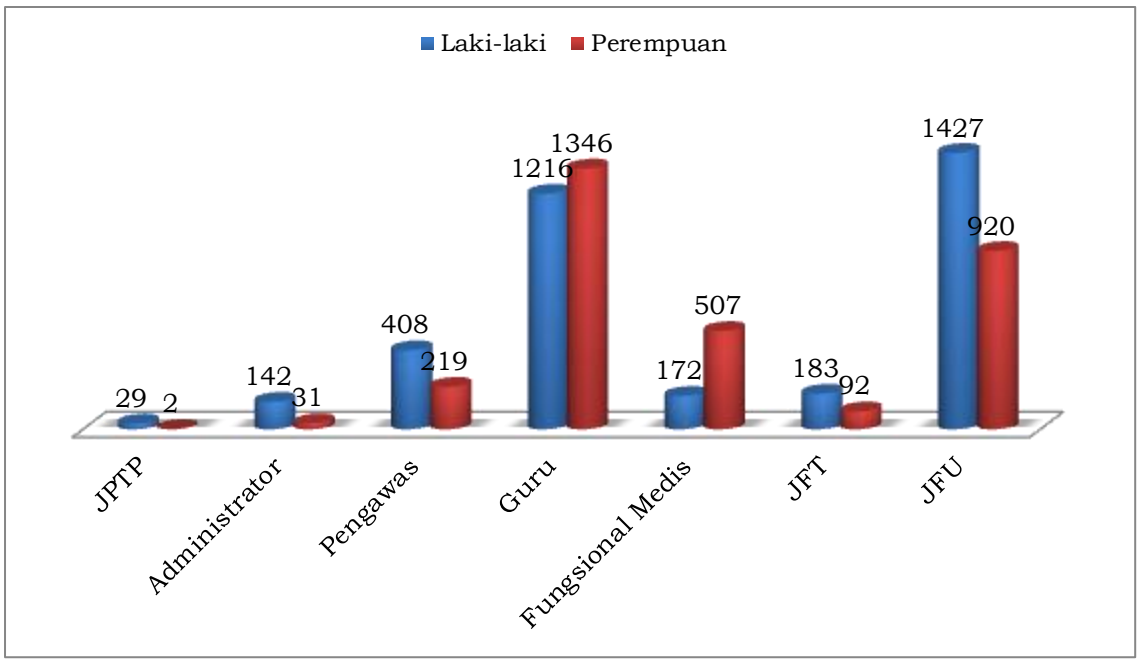

sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat, 2021

Dari Jumlah keseluruhan ASN di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021, yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) masih sangat minim bila dibandingkan dengan JFU/Pelaksana. Hal ini juga yang menjadi alasan KEMENPAN dan RB mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dalam komitmennya, Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penyederhanaan birokrasi melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Landasan hukum kebijakan penyederhanaan birokrasi juga diatur melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu daerah yang melakukan penyederhanaan birokrasi pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini

merupakan perwujudan loyalitas daerah kepada pemerintah Pusat yang dalam kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi sumber daya.

Table 3.50 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Yang Disetarakan

No	Urusan/Fungsi	Jumlah Jabatan yang Disetarakan
1	Sekretariat Daerah	20
2	Sekretariat Dawan Perwakilan Rakyat Daerah	11
3	Pendidikan dan Urusan Kebudayaan	8
4	Kesehatan	13
5	Sosial	13
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16
7	Perumahan dan Kawasan Permukiman	10
8	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Linmas	22
9	Komunikasi dan Informatika	8
10	Persandian	3
11	Statistik	3
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
13	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah	13
14	perpustakaan dan kearsipan	8
15	Penanaman Modal	18
16	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9
18	Lingkungan Hidup	13
19	Kepemudaan dan Olah Raga	7
20	Pariwisata	14
21	Kelautan dan Perikanan	11
22	Pertanian	26
23	Perindustrian	13
24	Tenaga Kerja	9
25	Perencanaan	12
26	Penelitian dan Pengembangan	1
27	Kepegawaian	9
28	Keuangan	8
29	Pendapatan Daerah	3
	Total	**327**

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2021

Berdasarkan data di atas, terdapat 327 jabatan pengawas dan jabatan administrator yang disetarakan. Hal ini berpedoman pada SK No. 998 tahun 2021 ditandatangani oleh Menteri pada tanggal 24 Juni 2021.

3.2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Target pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat pada anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1,761,638,061,414.00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1,709,673,251,673.97 atau 97.05%. Rincian target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.51 Laporan Realisasi APBD

Uraian	*Anggaran 2021*	*Realisasi 2021*	*%*
PENDAPATAN DAERAH	1,761,638,061,414.00	1,709,673,251,673.97	97.05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	314,918,940,275.00	294,899,799,910.97	93.64
Pajak Daerah	129,895,955,102.00	85,917,260,689.71	66.14
Retribusi Daerah	17,588,700,000.00	16,857,187,574.03	95.84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,008,894,967.00	12,812,440,435.79	71.15
Lain-lain PAD yang Sah	149,425,390,206.00	179,312,911,211.44	120.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,370,024,665,947.00	1,340,148,642,763.00	97.82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,291,046,775,743.00	1,271,504,743,296.00	98.49
Dana Perimbangan	1,092,995,346,743.00	1,073,521,262,302.00	98.22
DBH	51.836.989.743,00	55.053.216.777,00	106.20
DAU	716.749.817.000,00	716.749.817.000,00	100.00
DAK Fisik	159.758.424.000,00	143.046.223.867,00	89.54
DAK Non Fisik	164.650.116.000,00	158.672.004.658,00	96.37
Dana Insentif Daerah (DID)	35,571,106,000.00	35,571,106,000.00	100.00
Dana Desa	162,480,323,000.00	162,412,374,994.00	99.96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78,977,890,204.00	68,643,899,467.00	86.92
Pendapatan Bagi Hasil	78,977,890,204.00	68,643,899,467.00	86.92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76,694,455,192.00	74,624,809,000.00	97.30
Pendapatan Hibah	2,804,000,000.00	1,800,000,000.00	64.19
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73,890,455,192.00	72,824,809,000.00	98.56
BELANJA DAERAH	1,756,995,830,973.21	1,661,844,691,559.49	94.58
BELANJA OPERASI	1,239,101,279,647.21	1,192,458,299,777.99	96.24
Belanja Pegawai	762,530,791,152.40	734,165,553,240.91	96.28
Belanja Barang dan Jasa	443,354,912,333.81	425,618,014,834.08	96.00
Belanja Bunga	4,529,940,473.00	4,529,940,473.00	100.00
Belanja Hibah	28,313,135,688.00	27,772,291,230.00	98.09
Belanja Bantuan Sosial	372,500,000.00	372,500,000.00	100.00
BELANJA MODAL	237,310,562,310.00	204,504,713,135.50	86.18
Belanja Modal Tanah	11,308,760,000.00	8,160,594,944.00	72.16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64,179,054,272.00	58,135,108,726.00	90.58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68,303,868,156.00	54,510,480,150.00	79.81
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93,178,768,837.00	83,429,368,915.50	89.54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340,111,045.00	269,160,400.00	79.14
BELANJA TIDAK TERDUGA	22,294,573,906.00	10,006,894,858.00	44.88
Belanja Tidak Terduga	22,294,573,906.00	10,006,894,858.00	44.88

BELANJA TRANSFER	258,289,415,110.00	254,874,783,788.00	98.68
Belanja Bagi Hasil	14,748,465,510.00	11,330,418,632.00	76.82
Belanja Bantuan Keuangan	243,540,949,600.00	243,544,365,156.00	100.00
SURPLUS / (DEFISIT	4,642,230,440.79	47,828,560,114.48	1,030.29
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,827,829,086.21	10,573,062,748.52	97.65
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,527,829,086.21	10,527,762,748.52	100.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300,000,000.00	45,300,000.00	15.10
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15,470,059,527.00	15,470,059,527.00	100.00
Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15,470,059,527.00	15,470,059,527.00	100.00
PEMBIAYAAN NETTO	(4,642,230,440.79)	(4,896,996,778.48)	105.49
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	42,931,563,336.00	0.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2021 (*un-audited*)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi komponen pendapatan daerah mencapai 97.05%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mencapai Rp. 294,899,799,910.97 atau 93.64% dari target yang ditetapkan, sementara komponen Dana Perimbangan pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp. 1,073,521,262,302.00 atau mencapai 98.22% dari target yang direncanakan dan menurun 14,756,506,149.00 dari tahun 2020 serta komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 74,624,809,000.00 atau mencapai 97.30%.

Rendahnya realisasi komponen PAD masih disebabkan kejadian bencana non alam Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 yang masih berdampak pada sektor pariwisata di Senggigi sebagai sumber Pajak dan Retribusi Daerah sehingga realisasinya belum mencapai target yakni Pendapatan Pajak daerah yang capaiannya hanya sebesar 66.14% dan Hasil Retribusi Daerah yang capaiannya sebesar 95.84%. Namun jika dilihat dari perkembangan dari tahun lalu, Tahun 2021 mengalami peningkatan penerimaan PAD yaitu sebesar 86.93% menjadi 93.64% atau naik 6,71%.

Sementara itu kontribusi komponen-komponen Pendapatan Daerah terhadap pendapatan daerah sendiri didominasi oleh komponen Dana Perimbangan yakni sebesar 98.22%, hal ini disebabkan tingginya realisasi sub komponen pembentuk DAU yang mencapai 100%, DAK fisik yang mencapai 89.54% dan DAK Non Fisik sebesar 96.37%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat atau Provinsi.

Sementara untuk penyerapan anggaran belanja untuk program/kegiatan utama pada tahun 2021 dibagi menjadi 4 (empat)

yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasi, terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bansos dengan realisasi sebesar Rp 1,661,844,691,559.49 atau 94.58% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21. Sedangkan realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 1,192,458,299,777.99 atau 96.24% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1,239,101,279,647.21, dan belanja lainnya dapat dilihat di bawah ini.

a. Belanja Operasi sebesar Rp. 1,192,458,299,777.99 atau 96.24%
b. Belanja Modal sebesar Rp. 204,504,713,135.50 atau 86.18%
c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10,006,894,858.00 atau 44.88%
d. Belanja Transfer sebesar Rp. 254,874,783,788.00 atau 98.68%

Jika dikaitkan antara pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Strategis Daerah yang diturunkan menjadi 17 Program Prioritas dan 21 Indikator Kinerja adalah 102.09% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1,661,793,854,210.49 dari target Rp.1,756,995,830,973.21 atau dalam persentase sebesar 94.58% yang artinya Pemerintah Daerah dapat menghemat Rp.95,201,976,762.72 atau 8.49% dari keseluruhan anggaran.

BAB -4

INOVASI & PRESTASI KERJA

BAB IV
INOVASI & PRESTASI KERJA

4.1. INOVASI

Kabupaten Lombok Barat merumuskan program pembangunan daerah dengan mekanisme program prioritas yang memayungi beberapa program perangkat daerah yang mendukung ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Program prioritas atau Indikator Kinerja Utama akan dijabarkan melalui program unggulan yang dilaksanakan masing – masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Selain itu, Program Unggulan Kabupaten Lombok Barat juga tentunya memiliki sinergitas dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat demi ketercapaian tujuan bersama. Hal ini juga dalam upaya mendorong seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berinovasi.

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang innovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang innovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/pelayanan publik.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dijabarkan ke dalam program unggulan:

Tabel 4.1 Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Unggulan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 sertaketerdukungan terhadap Program Unggulan provinsi NTB

NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INOVASI/PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI NTB
	Jumlah Program Prioritas : 17 Program	**Jumlah Program Unggulan: 88 Program**	
1	Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik	Bupati Menyapa Desa	**Gemilang Birokrasi**
		Sekda Menyapa OPD	
		Sejelo Nyambang Dese	
		e-Demung	
		Agen Perubahan	
		Sekolah Perjumpaan	
		POCADI (Pojok Baca Digital)	
		Smart City	
		Pelayanan Malam dan Pelayanan Keliling Adminduk	
		PESTA (Pembakaran Sampah Tanpa Asap)	
		LAPOR POLPP	
		Pendolin (Pendaftaran Online)	
		SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)	
		E-SARAN	
		Kios Adminduk	
		E-Data Duk Kecamatan	
		LOBISA (Sejelo Bina Desa)	
		BABINSA (Bersama Membina Desa)	
		GIAT KORSA (Koordinasi Desa)	
		SMART Mangrove Sekotong	
		SIPAKALING (Sistem Pelayanan InformasiKeliling)	

2	Program Peningkatan Kualitas PengelolaanKeuangan Daerah	SIP Aset	Gemilang Ekonomi, Pariwisata,Pertanian dan Industri
		Gardu Mente	
3	Program Peningkatan AKIP Daerah	Plander (plan calender/reminder perencanaan)	Gemilang Birokrasi
4	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	SIMTARU	Gemilang Infrastruktur dan Tangguh Bencana
		E-Kir Lobar	
		INTRAS (Infrastructure Transparancy)	
5	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	Pembangunan 4000 Unit Rumah Layak Huni	Gemilang Pendidikan dan Kesehatan
		E-RLTH / Si Bedek (Sistem Informasi Bale Dendek Kadu)	
		E-EMON / SIMDAK	
		PSU / E-Iklan	
		WAJAH KOTA / Si Selfie	
		SMART PJU / Si Pujaan (Sistem Informasi Pengaduan dan Pengelolaan Lampu PJU)	
6	Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	Layanan Air Bersih Untuk Semua	Gemilang Pendidikan dan Kesehatan
7	Program Peningkatan PembangunanEkonomi	Samsat Keliling	Gemilang Ekonomi, Pariwisata,Pertanian dan Industri
		Pro U Kades (Program Unggulan Kawasan Perdesaan)	
		Ragamadu	
		Rumah Produksi untuk Produk Unggulan	
		Bela Beli Produk Lokal	
		Pembangunan Pasar Kuliner	
		Revitalisasi Pasar Tradisional	
		OVOP (One Village One Product)	
8	Program Peningkatan PDRB Sektor -Sektor Unggulan	Gardu Doa (Gerakan Terpadu Pemberdayaan Produk Lokal)	Gemilang Ekonomi, Pariwisata,Pertanian dan Industri
		Desa Wisata	
		#AyoKembaliKeSenggigi	
		#KeSekotongAja	
		Lombok Barat International Event	

		E-MPAK (Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan)	
		Agrifert	
		Clinic Agripest	
		Aplikasi Ayo Ke Lombok	
		E-PASAR	
		E-PASAR (SIDINDA)	
		E-Agroduct	
		E-Agrosell	
		SI Jempol Jari	
		E-Data Pajak Daerah	
		Aplikasi Pemetaan PBB-P2	
		SIM BPHTB	
		SIM PBB-P2	
		E-KIR LOMBAR	
		TAPPING BOX	
9	Program Peningkatan Investasi	SI Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perijinan Terpadu untuk Publik)	**Gemilang Ekonomi, Pariwisata,Pertanian dan Industri**
		OSS (Online Single Submission)	
		Anjungan Layanan Mandiri	
10	Program Penanggulangan Kemiskinan	Gerasak (Gerakan Sadar Administrasi kependudukan)	**Gemilang Ekonomi, Pariwisata,Pertanian dan Industri**
		Kabarku Pasti	
		E-Bindes	
11	Program Penurunan Angka Pengangguran	Lombok Barat Full Employment	**Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri**
		PENA GELORA	
12	Program Peningkatan Usia HarapanHidup	Gardu Santun Gerakan Terpadu Penuntasan Stunting)	**Gemilang Pendidikan dan Kesehatan**
		Aplikasi Stuntung dr. Sapto	
		Da'I Kesehatan	
		Pembangunan RSUD PPP	
		Telekonsultasi Dokter Umum dan Spesialis	

		Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Terintegrasi dengan Jejaring berbasis Online	
13	Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	Gardu Jaket (Gerakan Terpadu Kejar Paket)	**Gemilang Pendidikan dan Kesehatan**
14	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	PORTAL BUDAYA LOMBOK BARAT NOL DEDORO BANK SAMPAH SEKOLAH	**Gemilang Pendidikan dan Kesehatan**
15	Program Pengarusutamaan Gender	GAMAK (Gerakan Anti Merariq Kodeq) SI GAMAK PPA	**Gemilang Pembangunan Sosial Budaya**
16	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Gerabah (Gerakan Bebas Sampah) Pembangunan TPS3R Pembangunan PDU (Pusat Daur Ulang) E-DEDORO (Bank Sampah Berbasis Desa) SIMTARU	**Gemilang Lingkungan**
17	Program Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana K-Siaga	**Gemilang Infrastruktur dan Tangguh Bencana**

4.2. PRESTASI KERJA

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu perangkat daerah, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi diantara para pegawainya. Begitu juga dengan Pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih.

Prestasi Kerja yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

1. Penghargaan terbaik Kedua di Provinsi NTB atas Kepatuhan Terbaik dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI.

2. Penghargaan atas TPID Berprestasi Tahun 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 152 Tahun 2021
Memberikan Penghargaan Kepada:

Kabupaten Lombok Barat

NOMINASI TPID KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI
WILAYAH NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA

Jakarta, 7 Juli 2021
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

AIRLANGGA HARTARTO

3. Piala dan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yg telah berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak dan Perlindungan khusus anak meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor:347/MEN/TK.05/7/2021

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2021

Jakarta, 9 Juli 2021
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

4. Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Monitoring EValuasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Piagam

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Diberikan Kepada :

KABUPATEN LOMBOK BARAT

sebagai Nominasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Infomasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak

Jakarta, 22 Juli 2021

Dr. Susanto, M.A.
Ketua

5. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Desa Wisata Mekarsari, Desa Wisata Sekotong Tengah, Desa Wisata Senggigi, dan Desa Wisata Banyumulek pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021

6. penghargaan APE(Anugerah Parahita Ekapraya) Madya di tingkat Nasional

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 765/Men/KG.05/9/2021
Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Kabupaten Lombok Barat
Sebagai Kabupaten Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020
Kategori Madya

Jakarta, 6 September 2021
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.

7. penghargaan Puskesmas dengan peningkatan Indeks Keluarga Sehat tertinggi tingkat Provinsi NTB Tahun 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

kepada :

Puskesmas Suranadi
Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Puskesmas dengan peningkatan Indeks Keluarga Sehat tertinggi tingkat provinsi

(Kep.Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/6565/2021)

Jakarta, 3 November 2021

MENTERI KESEHATAN,

Budi G. Sadikin

8. Anugrah penyiaran KPID NTB 2022. Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemenang Katagori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran.. Lobar Terbaik karena adanya LPPL Suara Giri Menang

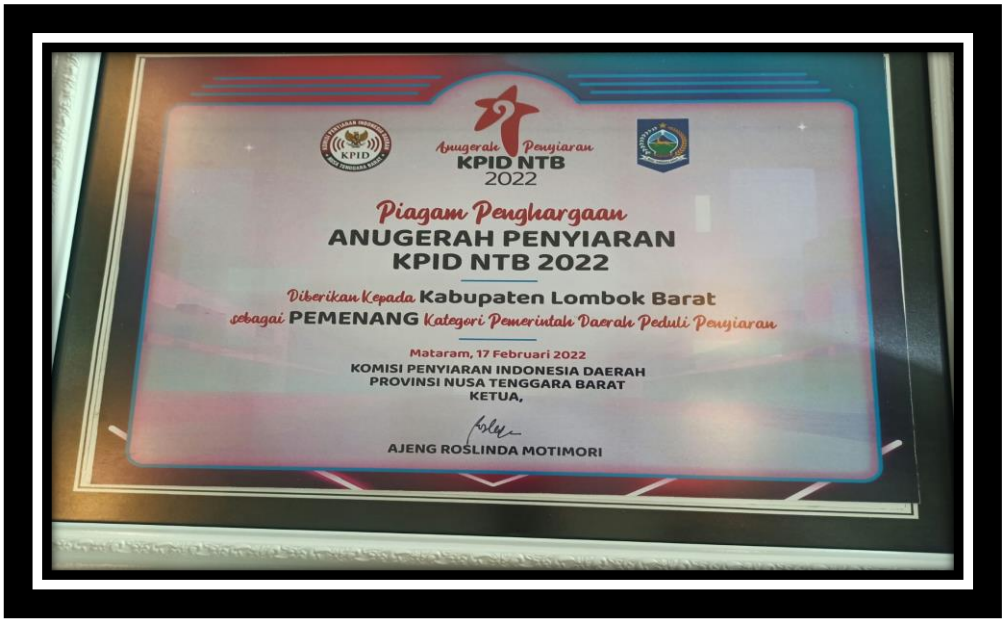

9. Anugrah Keterbukaan informasi Publik tahun 2021 Tingkat Propinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat tetap mempertahankan predikat Informatif. Tahun ini merupakan yang kelima kalinya Lobar memperoleh Predikat Informatif

10. Sertifikat Quality Management System Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat

Quality Management System

CERTIFICATE

No. MSAC-QMS-0075

This is to certify that :

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kab. Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat 83363

Has established and applies a

Quality Management System

for the scope of

Pelayanan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK.I), Kartu Data Pencari Kerja (AK.II), Kartu Permintaan Tenaga Kerja (AK.III), Kartu Pemanggilan Pencari Kerja (AK.IV), dan Surat Pengantar Dari Dinas Kabupaten/Kota Kepada Pemberi Kerja (AK.V)

And has been evaluated and found to be in line with the requirements of the following standard :

SNI ISO 9001:2015

Initial Certification Date : 27 September 2019 Certificate Issue Date : 29 November 2021 (S2)
Recertification Date : 26 September 2022 Certificate Validity Until : 26 September 2022

Authorized by Head of Certification Body

IAF KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-053-IDN

MANAGEMENT SYSTEMS ASSESSMENT MSA ISO 9001 REGISTERED

PT. MSA Certification – Perkantoran Tanjung Mas Raya Blok B1 No. 42 Lt.2, Jl. Tanjung Barat Raya No. 2, Jakarta 12530,
Validity of this certificate can be checked in www.msacertification.co.id or Email: info@msacertification.co.id
This certificate is property of PT. MSA Certification and shall be returned upon requested (F 26-06, Rev.1)

11. Penghargaan sebagai Mitra Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bank Indonesia

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA TAHUN 2020

SERTIFIKAT

Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada

Bagian Adm Perekonomian Setda
Kabupaten Lombok Barat

Mitra Terbaik Instansi Tingkat Kabupaten/Kota
Tahun 2020

Mataram, 3 Desember 2020
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Heru Saptaji
Kepala Perwakilan

12. Piagam atas partisipasinya dalam mengembangkan Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 5 Desa yaitu Desa Mareje, Desa Cendi Manik, Desa Banyu Urip, Desa Sekotong Timur, dan Desa Kuripan Selatan

Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DUSUN ASAK SIWAK DESA MAREJE KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.

Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DUSUN LINGKO JUET DESA CENDI MANIK KECAMATAN SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.

Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DUSUN BENTENU DESA BANYU URIP KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.

BAB 4

Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DUSUN KAMBENG BARAT DESA SEKOTONG TIMUR KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.

Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DUSUN TUNGGU LAWANG DESA KURIPAN SELATAN KECAMATAN KURIPAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.

BAB -5

PENUTUP

-Desa Wisata Senaot, Lombok Barat-

BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian terhadap 21 sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dapat diketahui keseluruhanya masuk dalam kategori **Sangat Baik** kecuali **indikator Nilai Realisasi Investasi PMA** yang kategori **Sangat Kurang**. Pencapaian indikator sasaran strategis pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Kate-Gori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,26	86,53	100,31	SB
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	SB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	73,00 (BB)	63,76 (B)	87.34	B
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	82,20	85,73	104,30	SB
5	Meningkatnya Akses	5	Persentase Rumah layak Huni	%	97,80	97,76	99,96	SB

	Infrastruktur Dasar	6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum layak	%	82,02	82,13	100,13	**SB**
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	14,85	14.91	100.40	**SB**
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	14,51	14,31	98,62	**SB**
			Nilai Investasi					
		9	Nilai PMDN (Fasilitasi)	Milyar Rupiah	589,73	1.260,32	213,71	**SB**
		10	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	127.46	23,49	18,43	**SK**
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11	Persentase Angka Kemiskinan	%	13,86	14,47	95,60	**SB**
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,32	98,78	**SB**
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,20	67,19	99,99	**SB**
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	Tahun	13,75	13,95	101,45	**SB**
		15	Persentase RLS	Tahun	6,50	6,42	98,77	**SB**
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	650,00	604,92	93,06	**SB**
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,00	89,22	99,13	**SB**
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,91	89.73	102.72	**SB**
		19	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,30	54.26	128.27	**SB**
		20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,08	46.83	101,63	**SB**
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	21	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	143,00	140,88	101,48	**SB**
	Rata-rata Capaian						**102,09**	**SB**

Dari 12 Sasaran Strategis dengan 21 indikator kinerja yang ada, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna Sangat Baik, namun ada 1 capaian indikator kinerja yang mendapat kategori Baik yaitu Sasaran Strategis

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Daerah pencapaian rata-rata 87.34 % dan 1 Sasaran Strategis yang rata-rata pencapaian kinerja yang dengan kategori Sangat kurang yaitu Sasaran Strategis Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA rata-rata pencapaian sebesar 18,43%.

5.2. UPAYA PERBAIKAN/PEMULIHAN

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan. Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 8,49 % atau sebesar Rp. 95,201,976,762.72 dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 1,756,995,830,973.21 dengan realisasi sebesar Rp. 1,661,793,854,210.49 atau 94,58%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya rata-rata capaian melebihi target yaitu sebesar 102.09% dari target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunaan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

Selanjutnya dalam upaya pengelolaan Covid 19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempercepat pemulihan ekonomi melalui pembangunan pariwisata, investasi, mitigasi bencana, peningkatan layanan dasar kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan perumahan berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa urusan yang diprioritaskan untuk didanai yaitu :

a. Industri Pariwisata, pendanaan diarahkan untuk melakukan event-event sebagai promosi wisata, yang didukung dengan lingkungan yang aman dan nyaman.
b. Investasi, diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan dan penciptaan iklim investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c. Pertanian, Industri dan Perdagangan dan Ketahanan Pangan, diarahkan dalam upaya meningkatkan produksi sebagai cadangan pangan, memberi nilai tambah produk dan meningkatkan pemerataan distribusi dan akes masyarakat.
d. Kesehatan, diarahkan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, meningkatkan PHBS, dan penanganan terhadap penyakit menular akibat Virus
e. Pendidikan, diarahkan untuk membudidayakan PHBS di Lingkungan Sekolah, penyusunan modul-modul terkait pencegahan Covid19 di lingkungan sekolah.
f. Infrastruktur, diarahkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur ekonomi berupa jalan, jembatan, infrastruktur transportasi berupa pelabuhan, terminal dan pasar, infrastruktur layanan dasar berupa puskesmas, dan sekolah-sekolah, serta infrastruktur dasar perumahan berupa RLH, akses terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi Layak
g. Mitigasi Bencana, diarahkan pada kesiapsiagaan SDM tanggap Bencana, masyarakat tanggap Bencana dan kesiapan alokasi Belanja Tak Terduga. Selain itu dalam upaya mitigasi bencana penting untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang baik.
h. Sosial, diarahkan dalam upaya memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana, untuk verivali data DTKS, pemberian bantuan dan penanganan PMKS.
i. Stimulus ekonomi kepada UKM/IKM sebagai upaya rehabilitasi ekonomi pasca Covid-19

Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Lombok Barat, terdapat 2.220 Usaha Mikro Kecil terdampak Covid yang bergerak pada beberapa sector yaitu: Sektor makanan, Sektor kerajinan, Sektor agribisnis, Sektor perdagangan, Sektor Conveksi/Fashion, Usaha jasa, Kuliner/rumah makan/restoran. Dampak yang dialami berupa : kesulitan pemasaran, kendala permodalan, dan kesulitan bahan baku.

Strategi peningkatan UMKM dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan dan memberdayakan produk UMKM adalah :

a. Melakukan pembinaan dengan melakukan pelatihan berupa promosi produk melalui mediia sosial contoh Instagram, Youtube, facebook, membuat platform, membuat pameran produk produk unggulan di luar daerah.

b. Pembangunan sarana dan prasarana tempat usaha berupa pembangunan rumah produksi bantuan peralatan untuk keberlangsungan produksi UMKM
c. Memfasilitasi ijin UMKM seperti sertifikasi Halal dan PIRT.
d. Berlakunya Peraturan Bupati mengenai Pemberdayaan Produk Lokal di Kabupaten Lombok Barat No. 21 th. 2017 tentang Penggunaan produk lokal unggulan daerah. Isi dari perbup ini untuk menjamin penggunaan produk produk lokal Kabupaten Lombok Barat mulai dari instansi pemerintah hingga swasta. Selanjutnya memfasilitasi produk utk keberlanjutan usaha serta kemudahan memasarkan produknya.

Dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu terkait dengan perumusan indikator kinerja daerah, maupun indikator kinerja utama pada tiap-tiap OPD agar dapat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berdasarkan kondisi senyatanya yang dihadapi, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya. Berkaitan dengan penggunaan sumberdaya (anggaran) dalam mencapai target yang ditetapkan, perlu dilakukan analisis standar kebutuhan anggaran terhadap target yang ingin dicapai agar target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau rendah.

Semoga Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

LAMPIRAN

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 – 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Indikator Kinerja Daerah adalah Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infomasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome),* dampak *(impact).*

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 2

(1) Indikator Kinerja Daerah terdiri dari :
   a. Indikator Kinerja Utama Daerah;
   b. Indikator Kinerja Kunci Daerah.

(2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator sasaran RPJMD yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Indikator Kinerja Kunci Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah indikator tujuan RPJMD, indikator sasaran RPJMD dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Pasal 3

(1) Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Daerah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu).
(2) Indikator Kinerja Kunci Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, indikator kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua).
(3) Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga).

BAB III

PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA,

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 4

(1) Perencanaan kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan penyusunan perjanjian kinerja.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen RPJMD dan dokumen Renstra Perangkat Daerah.
(3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tahunan yang merupakan Perjanjian Kinerja Bupati di tingkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan level eselon III dan eselon IV.
(4) Penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

Pasal 5

(1) Pengukuran Kinerja dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
(2) Pengukuran kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
(4) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Inspektorat Kabupaten Lombok Barat melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
(2) Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kewenangannya.
(3) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektorat kepada Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 18 November 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2019-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	nilai	Pihak Independen	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	Opini	BPK	BPKAD	Semua OPD
3 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Daerah	3 Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf dan Angka	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4 Persentase Wilayah terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Indeks composit	PU,perindag,Dishub	Dishub	Dishub,Disperindag, dan PUTR
5 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5 Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}}$ x 100	%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PUTR
	6 Persentase Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi}}{\text{Jumlah penduduk X100}}$ X 100	%	Dinas PUTR	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Dinas PUTR
6 Meningkatnya Daya Saing sektor ekonomi unggulan	7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ x 100	%	Bapenda dan BPKAD	Bapenda	OPD Penghasil PAD
	8 Nilai PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Rp.Juta	BPS	Seluruh OPD	Seluruh OPD
	9 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :			DPMPTSP	DPMPTSP	Dinas PUTR, Pariwisata dan SETDA
	PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas) tahun yg dihitung	Rp. Milyar			
	PMA	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	$ juta			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 Meningkatnya Kemandirian ekonomi masyarakat	10 Indeks Gini Rasio	$G = 1 - \sum fi\ (Yi + Yi+1)$ G = Ratio Gini fi = Proporsi Rumah Tangga dlm Kls i Xi = Proporsi Jumlah Komulatif RT dlm Kls i Yi = Proporsi jumlah komulatif pendapatan dlm Kls i	Indeks	Badan Pusat Statistik	Disperindag, Dinas Koperasi,Dinas Pertanian, Dinas kelautan, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Badan Ketahanan Pangan Daerah	Dinsos, Disnaker, Koperasi, DPMD, DP2KBP3A
	11 Persentase Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinsos,Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh OPD, Forum CSR, BAZNASDA dan Pemerintah Desa
	12 Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah orang yang tidak bekerja}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Dieperindag, Diskop dan UKM, Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata
8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah umur semua penduduk yg meninggal}}{\text{Jumlah penduduk yang meninggal}}$	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Semua OPD
9 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	14 Rata-rata Lama Sekolah	[illegible]	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
	15 Harapan Lama Sekolah	[illegible]	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skors	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A	Bappeda, DP2KBP3A, DPMD,Dikes dan PKK.
	17 Indeks Pembangunan Gender	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100$	Skors	BPS	Bakesbangpoldagri, Satpol PP,BPBD,Damkar	Seluruh Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 40%)	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
12 Menurunnya Risiko Bencana	19 Indeks Risiko Bencana	Indeks Ancaman x Indeks Kerentanan / Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	BPBD	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran, SatPOLPP, Kesbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Nilai PDRB Perkapita	Nilai PDRB / Jumlah Penduduk	Juta Rupiah	Seluruh OPD	IKU
2	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	Indeks Gini Rasio	$G = 1 - \sum fi\ (Yi + Yi+1)$ G = Ratio Gini fi = Proporsi Rumah Tangga dlm Kls i Xi = Proporsi Jumlah Komulatif RT dlm Kls i Yi = Proporsi jumlah komulatif pendapatan dlm Kls i	Indeks	Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar, Dikpangan, Dinsos, DPMD, DP2KBP3	IKU
3	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin / Jumlah Penduduk X 100	Persen	Dinsos, Dukcapil, Dikpangan	IKU
4		IPM	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	Indeks	Seluruh OPD	INDIKATOR TUJUAN
5		Pertumbuhan Ekonomi	$Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{-t}} \times 100\%$	Persen	Bapenda, DPMPTSP, Disperindag, Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar,	INDIKATOR TUJUAN
6	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	RLS	$RLS = \frac{\sum_i P_i S_i}{\sum_i P_i}$	Tahun	DIKBUD	IKU
7		HLS	$HLS = PR \times \sum_{i=1}^{n} \frac{S_i}{n}$	Tahun	DIKBUD	IKU
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UHH	$P = P_{-1} - (B - D) + (N - R)$	Tahun	DIKES, RSUD	IKU
9		Pengeluaran Perkapita	$PPP_i = \prod_{j=1}^{m} \left(\frac{P_{ij}}{P_{0j}}\right)^{w_{ij}}$	Rp.(000)	Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar	Komponen Pembentuk IPM
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	TPT	Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja X 100	Persen	DISNAKER	IKU
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	Seluruh OPD	IKU
12	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PAD / Pendapatan Daerah X 100	Persen	BAPENDA	IKU

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	Penilaian BPK	Opini	BPKAD	IKU
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	Penilaian MENPAN RB	Nilai	BAPPEDA, SETDA, INSPEKTORAT Beserta Seluruh OPD	IKU
15		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian MENPAN RB	Indeks	SETDA, INSPEKTORAT Beserta Seluruh OPD	INDIKATOR TUJUAN
16		Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	(Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap x Persentase Wilayah Terhubung dengan moda transportasi x Persentase RLH x Persentase RT dengan akses air minum layak x Persentase RT dengan sanitasi layak) ^0,2	Persen	DPUTR, DISHUB	INDIKATOR TUJUAN
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 40%)	Indeks	DLH	IKU
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Persen	DPUTR	IKU
19	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100	Persen	DISPERKIM	IKU
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
20	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	Kasus Konflik Sara yang Terjadi / Kasus Konflik Sara yang Tertangani X 100	Persen	BAKESBANGPOL	IKK
21	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Penilaian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor	DP2KBP3A	IKU
22	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IPG	IPM Perempuan / IPM Laki - Laki X 100	Skor	DP2KBP3A	IKU

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
PENDIDIKAN						
23	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK			DIKBUD	IKK
		Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Jumlah Siswa TK/PAUD / Penduduk usia TK/PAUD X 100	Persen		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah Siswa SD / Penduduk usia SD X 100	Persen		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah Siswa SMP / Penduduk usia SMP X 100	Persen		
24		Angka Partisipasi Murni				
		Angka Partisipasi Murni TK/PAUD	Jumlah Siswa Usia TK/PAUD / Penduduk usia TK/PAUD X 100	Persen		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Jumlah Siswa Usia SD / Penduduk usia SD X 100	Persen		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Jumlah Siswa Usia SMP / Penduduk usia SMP X 100	Persen		
25	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah				
		Angka Putus Sekolah SD	Jumlah murid putus sekolah di tingkat pendidikan tertentu / Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu X 100	Persen		
		Angka Putus Sekolah SMP		Persen		
26		Angka Kelulusan				
		Angka Lulusan SD	Jumlah murid yang lulus di tingkat / Jumlah seluruh murid pada tingkat pendidikan tertentu X 100	Persen		
		Angka Lulusan SMP		Persen		
KESEHATAN						
27	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi (umur 0-1th) / Jumlah bayi lahir hidup X 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 KH	DIKES	IKK
28		Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian karena kehamilan, persalinan, masa nifas atau komplikasi2nya selama 1 periode / Jumlah kelahiran hidup selama periode yang sama X 100.000 KH	Per 100.000 KH		
29		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Jumlah Keluarga dengan IKS > 0,800 / Jumlah Seluruh Keluarga	IKS		
30		Persentase Stunting	Jumlah Balita dengan tinggi dibawah standar / Jumlah Balita Yang Diukur X 100	Persen		
31		Pemenuhan Indikator SPM RSUD	Jumlah Indikator SPM RS yang terpenuhi	Indikator	RSUD	IKK

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
32	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Sedang / Panjang Jalan X 100	Persen	DPUTR	IKK
33	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW / Rencana Peruntukan X 100	Persen		IKK
34	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	Jumlah Rumah TAngga dengan akses Sanitasi Layak / Jumlah Rumah Tangga X 100	Persen		IKK
35	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi / Jumlah Rumah Tangga X 100	Persen		IKU
36	Meningkatnya Penyediaan Air Irigasi dan Air Baku Untuk Produktifitas Lahan Pertanaian dan Pemenuhan Air Multi Sektor	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik / Panjang Saluran Irigasi seluruhnya X 100	Persen		IKK
Perumahan Permukiman						
37	Meningkatnya Penanganan Infrastuktur Yang Layak Di Kawasan Lingkungan Kumuh	Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Luas area permukiman kumuh tertangani / Luas area permukiman kumuh seluruhnya X 100	Persen	DISPERKIM	IKK
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
38	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran PERDA yang ditangani	Jumlah Pelanggaran Perda Yang Ditangani / Jumlah Seluruh Pelanggaran Perda X 100	Persen	SATPOL PP	IKK
39	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	(Indeks Ancaman X Indeks Kerentanan) / Indeks Kapasitas Daerah (Dengan Asumsi Indeks Ancaman dan Kerentanan Tetap)	Indeks	BPBD	IKU
40	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Pemenuhan komponen Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; Pengembangan Infirmasi, diklat dan logistik; Penanganan Tematik kawasan rawan bencana; pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan prb dan penguatan sistem pemulihan bencana	Indeks	BPBD	IKK
41	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	Jumlah Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit / Jumlah Seluruh Layanan kejadian kebakaran X 100	Persen	DISDAMKAR	IKK

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Sosial						
42	Meningkatkan Cakupan Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS	Persentase PMKS Yang Tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS X 100	Persen	DINSOS	IKK
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
43	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah penduduk usia kerja X 100	persen	DISNAKER	IKK
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
44	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan / Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan X 100	Persen	DP2KBP3A	IKK
Pangan						
45	Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan	Peningkatan Skor PPH	Persentase Angka Kecukupan Gizi X Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Poin	DIKPANGAN	IKK
Pertanahan						
46	Meningkatnya Penataan Asset Daerah	Persentase Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat	Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat / Jumlah Bidang pemda seluruhnya X 100	Persen	BPKAD	IKK
47		Konflik pertanahan yang Terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (Mediasi)	Jumlah Konflik pertanahan yang terfasiltiasi penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (mediasi)	Kasus		
Lingkungan Hidup						
48	Tercapainya Kelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya pengurangan dan penanganan Sampah	Persentase Pengelolaan sampah	Volume sampah yang dikelola / Volume produksi sampah perkotaan 1 tahun X 100	Persen	DLH	IKK
49	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Kualitas Air Sungai	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$	Indeks		
50		Kualitas Udara	100 - [50/0.9 x (leu - 0.1)]	Indeks		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
51	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan SDA untuk mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kualitas Tutupan Lahan	100 - ((84,3 - (TH x 100)) x 50/54,3)	Indeks		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
52	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran / Jml Penduduk Usia 0-18 Tahun X 100	Persen	DISDUKCAPIL	IKK
53		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Jumlah Penduduk ber KTP / Jumlah Wajib KTP X 100	Persen		
54		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah KK Yang diterbitkan / Jumlah Seluruh KK X 100	Persen		
55		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Akte Kematian Yang diterbitkan / Jumlah Kematian Yang Terlapor X 100	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
56	Meningkatnya Perkembangan di Bidang Pemerintahan, Kewilayahan serta Kemasyarakatan	Persentase Desa Dengan Kategori "Cepat Berkembang"	Jumlah Desa Dengan Kategori Cepat Berkembang / Jumlah Seluruh Desa X 100	Persen	DPMD	IKK
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
57	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	[illegible]	Persen	DP2KBP3A	IKK
Perhubungan						
58	Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Jumlah Trayek Aktif / Jumlah Trayek X 100	Persen	DISHUB	IKK
59		Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perekonomian (Pasar)	Jumlah Jalur Trayek Aktif / Jumlah Pasar (32 unit) X 100	Persen		
Komunikasi dan Informatika						
60	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi (KI) Prov.NTB	Predikat	DISKOMINFO	IKK
Koperasi dan UKM						
61	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Seluruh Koperasi X 100	Persen	DISKOP UKM	IKK
62	Meningkatnya Jumlah UMK	Persentase UMK	Jumlah UMK Formal / Jumlah Seluruh UMK X 100	Persen		IKK
Penanaman Modal						
63	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			DPMPTSP	IKU
		PMA	Nilai Realisasi PMA	Juta US $		
		PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas)	Milyar Rupiah		
Pemuda dan Olah Raga						
64	Meningkatnya Kompetensi dan Peran Serta Pemuda	Presentase wirausaha muda	Jumlah Wirausahawan Muda Yang Aktif / Jumlah Seluruh Wirausahawan Muda X 100	Persen	DISPORA	IKK
65		Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif / Jumlah Organisasi Pemuda X 100	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
66	Meningkatnya Cabor Potensial dan Unggulan	Persentase Prestasi Cabor Unggulan	Jumlah Perolehan Emas Pada Cabor Unggulan / Jumlah Cabor Unggulan (Sesuai SK Cabor Unggulan) X 100	Persen		
Statistik						
67	Meningkatnya Ketersediaan Data Penyelenggaraan	Ketersediaan data penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Data Sektoral Yang tersedia / Jumlah seluruh data sektoral X 100	Persen	DISKOMINFO	IKK
Kebudayaan						
68	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kondisi Baik	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kondisi Baik / Jumlah seluruh Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya X 100	Persen	DIKBUD	IKK
69		PErsentase Sanggar Seni Aktif	Jumlah Sanggar Seni Yang Aktif / Jumlah Sanggar Seni X 100	Kelompok		IKK
Perpustakaan						
70	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	DISARPUS	IKK
Kearsipan						
71	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku / Jumlah Seluruh OPD X 100	Persen	DISARPUS	IKK
Urusan Pilihan						
Pariwisata						
72	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dan Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sarana Penunjang di Destinasi Wisata	Jumlah kunjungan wiisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	DISPAR	IKK
73		Lama tinggal wisatawan *(Length OF Stay)*	Rata - Rata Lama tinggal wisatawan	Hari		
74		Jumlah desa wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa		
Pertanian						
75	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Tahun n - Produksi Tahun (n-1) / Produksi Tahun (n-1) X 100	Persen	DIPERTA	IKK
76	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun n - Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun (n-1) / Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun (n-1) X 100	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Perdagangan						
77	Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Daerah	Nilai eksport perdagangan	Nilai Eksport Perdagangan	US $	DISPERINDAG	IKK
Perindustrian						
78	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan industri	(Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun n-1) / Jumlah Industri Sampai Dengan Tahun n X 100	Persen	DISPERINDAG	IKK
Transmigrasi						
79	Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase transmigran yang diberangkatkan	(Jumlah Transmigran Yang diberangkatkan) / Jumlah Transmigran Yang diusulkan X 100	Persen	DISNAKER	IKK
Kelautan dan Perikanan						
80	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	DKP	IKK
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
Administrasi Pemerintahan						
81	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Nilai LPPD	Nilai LPPD	Nilai	SETDA	IKK
82		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	(Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur Yang tercapai) / Seluruh Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur X 100	Persen		
83	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	(Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan) / Seluruh Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan X 100	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
84	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perlengkapan, Umum, Humas dan Protokol	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra	Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra / Seluruh Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra X 100	Persen		
85	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda Inisiatif DPRD	Jumlah Perda Inisiatif DPRD / Jumlah Seluruh Perda X 100	Persen	SETWAN	IKK
Perencanaan Pembangunan						
86	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	Jumlah Program RKPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD / Jumlah Program Pada RPJMD X 100	Persen	BAPPEDA	IKK
87		Persentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	Jumlah Program Pada Renstra OPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD / Jumlah Program Pada RPJMD X 100	Persen		
88		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Jumlah Program pada Renja OPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD / Jumlah Program Pada RPJMD X 100	Persen		
Keuangan						
89	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Realisasi PAD	Nilai Realisasi PAD	Rp. Milyar	BAPENDA	IKK
90	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	BPKAD	IKK
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
91	Meningkatnya Kapasitas SDM ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural)	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural+Fungsional) / Jumlah Seluruh Pejabat Struktural X 100	Persen	BKDPSDM	IKK
92	Meningkatnya Peran Serta Peerempuan Dalam Pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)	Jumlah Pejabat Eselon II Perempuan / Jumlah Seluruh Jabatan Eselon II X 100	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Penelitian dan Pengembangan						
93	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan	Jumlah Kajian Yang Dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan / Jumlah Seluruh Kajian yang dilaksanakan X 100 X 100	Persen	BAPPEDA	IKK
Pengawasan						
94	Terwujudnya Wilayah Berintegritas	Persentase Unit Layanan Yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Unit Layanan Yang ditetapkan menjadi zona integritas / Jumlah Unit Layanan (33 unit) X 100	Persen	INSPEKTORAT	IKK
95		Persentase OPD mencapai Maturitas SPIP Level 3	Jumlah OPD Yang mencapai Maturitas SPIP Level 3 / Jumlah Seluruh OPD X 100	Persen		
96		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan X 100	Persen		
97		Persentase OPD dengan nilai AKIP A	Jumlah OPD dengan Nilai AKIP A / Jumlah OPD X 100	Persen		
98		Persentase OPD memiliki nilai/indeks Reformasi Birokrasi 83,85	Jumlah OPD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 83,85 / Jumlah OPD X 100	Persen		
99	Meningkatnya Profesionalitas SDM APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi standar kompetensi	Jumlah APIP yang sudah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat / Jumlah Seluruh APIP X 100	Persen		

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR ___ TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 – 2024

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: _____

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN
LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ___ Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinera dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ___ Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja (NAMA

PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat;

13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ___ Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020-2024.

KEDUA : Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian Program pada Sekretariat (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal: (tanggal akan di informasikan kemudian)

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUGAS DAN FUNGSI (NAMA PERANGKAT DAERAH)

A. TUGAS : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi OPD

B. FUNGSI : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Penangungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A : H. FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si.

J A B A T A N : BUPATI LOMBOK BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Gerung, 3 Januari 2022
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH		SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
					INDIKATOR	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,52	1.041.459.067.503,00
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	OPINI BPK	OPINI	WTP	674.790.969.698,00
3	MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja	3	NILAI AKIP DAERAH	Nilai	BB (75,00)	3.103.806.890,00
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	Persen	86,00	96.778.797.786,00
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	97,92	20.052.467.900,00
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	82,92	12.403.779.500,00
6	Meningkatnya daya saing sector ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,16	1.368.869.560,00
		8	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	15,20	49.769.323.325,00
		9	Nilai Realisasi Investasi			609.256.250,00
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US $	139,91	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	648,70	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	Persen	13,46	32.060.681.475,00
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,14	12.179.000.710,00
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,56	184.697.375.766,00
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,75	157.081.584.545,00
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,00	362.972.880,00
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	705,00	9.335.300.800,00
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,30	

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
				INDIKATOR	ANGGARAN
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17 IndeksKualitas Udara	Indeks	88,01	10.089.038.529,00
		18 Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,40	
		19 Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,15	
12	Menurunnya Risiko Bencana	20 Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,66	941.961.140,00

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M. Si.